



KONDISI SOSIAL EKONOMI
Masyarakat
DI LOKASI COREMAP II

Desa Sikakap, Kabupaten Mentawai

HASIL BME

KONDISI SOSIAL EKONOMI
Masyarakat

DI LOKASI COREMAP II

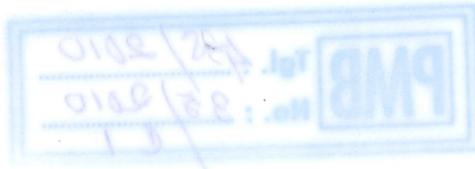
Desa Sikakap, Kabupaten Mentawai

HASIL BME



Oleh:

**SUKO BANDIYONO
NGADI
SUDIYONO**



COREMAP-LIPI

**Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II - LIPI)
Jakarta, 2009**



LIPI

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Desa
Sikakap, Kabupaten Mentawai: Hasil BME/Suko Bandiyono,
Ngadi, Sudyono – Jakarta: 2010.

xiv + 121 hlm.; 14,8 x 21 cm

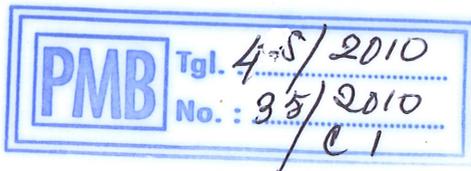
ISBN 978-602-8717-33-5

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333. 911



*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720
Telp.: (021) 5207205, 5221687
E-mail: ppk-lipi@rad.net.id



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya kecenderungan peningkatan tutupan karang merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan pendapatan per-kapita penduduk naik sebesar 2 persen per tahun dan terjadi peningkatan kesejahteraan sekitar 10.000 penduduk di lokasi program.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosial-ekonomi ini dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP. Selain itu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T1) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Barat. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari ke deputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Desa Sikakap, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai, CRITC Kabupaten Mentawai dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009

Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RINGKASAN

Penelitian benefit monitoring dan evaluasi Coremap tahun 2009 ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan program, terutama kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah Sikakap. Dengan demikian penelitian ini untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lebih khusus penelitian ini bermaksud : (1) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan COREMAP baik pada tataran kabupaten dan tataran desa; (2) Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai program COREMAP; (3) Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Coremap, sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan substansi program COREMAP di Sikakap adalah :

1. Program COREMAP yang dalam kenyataan cenderung bersifat *top-down* tetapi tanpa diikuti oleh pengelolaan yang profesional. Dalam pengelolaan yang baik seharusnya diawali dengan kajian yang benar, dilaksanakan dengan prinsip *good and clean*, dilaksanakan oleh tenaga yang handal, dan selalu melakukan evaluasi.
2. Banyak Pokmas yang dibentuk yang idenya datang dari pengurus LPSTK dan Fasilitator. Kelompok dibentuk bukan karena mempertimbangkan kemampuan berusaha. Masyarakat bersedia membentuk Pokmas karena pertimbangan praktis yaitu dengan mudah memperoleh uang, apalagi Fasilitator dan LPSTK telah memberi harapan bahwa kegiatan ekonomi dari kelompok sangat menguntungkan dan tidak ada sanksi hukum. Secara teknis pembuatan proposal Pokmas dibuat oleh anggota LPSTK bersama Fasilitator meskipun telah dibebani biaya. Kenyataan bahwa LPSTK

banyak melakukan pemotongan dana sehingga banyak Pokmas pun mengalami kesulitan untuk mencicil uang pinjaman bergulir sesuai kontrak.

3. Koordinasi dan manajemen organisasi dalam internal Pokmas juga mengalami permasalahan. Secara budaya mereka tidak terbiasa hidup secara berkelompok, mereka umumnya bekerja sendiri dan pada dasarnya menggantungkan pada sumber daya daratan. Kegiatan berkelompok merupakan loncatan budaya yang tidak mudah diikuti, karena mensyaratkan dapat saling tenggang rasa, keterbukaan dan memerlukan kedisiplinan. Apa yang terjadi bahwa mereka saling bekerja tetapi tidak saling bekerja bersama.
4. Untuk program tertentu yaitu budidaya rumput laut secara ekologis tidak cocok, dan secara ekonomis juga tidak layak. Tanaman rumput laut memerlukan lingkungan yang tidak terpengaruh air tawar, tumbuh di pantai berkarang putih yang jernih, ombak tidak besar, dan tidak ada predator (ikan baronang, duyung, dan penyu). Di Sikakap karena banyak predator maka usaha budidaya rumput laut harus menggunakan waring sehingga memerlukan biaya yang besar. Sementara itu belum ada kepastian untuk hidupnya rumput laut secara sehat maupun untuk memasarkannya. Dengan demikian pemikiran untuk dapat ekspor rumput laut masih mengalami banyak kendala teknis dan manajemen.
5. Pendamping yaitu Fasilitator Teknis apalagi ketua dan anggota Pokmas tidak menguasai sepenuhnya teknologi yang diperlukan tiap Pokmas misalnya dalam hal budidaya rumput laut, pembuatan batu bata dan budidaya kerapu. Hal ini karena rendahnya kualitas SDM mereka dalam penguasaan Iptek dan tidak serius menangani apalagi menangani jumlah Pokmas yang banyak. Kegiatan Pokmas umumnya merupakan hal baru yang belum pernah dilakukan kecuali kegiatan membuat ikan asin dan membuat minyak nilam secara tradisional.
6. Praktek perusakan ekosistem terumbu karang sulit dicegah antara lain kelemahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.

Nelayan lokal yang masih miskin pengetahuan dan miskin ekonomi dengan sendirinya tidak mampu bersaing dengan nelayan andon yang datang dari luar daerah seperti Sibolga, Padang, Bengkulu, Jakarta dan Jawa Tengah dengan penguasaan iptek yang modern.

Pemahaman masyarakat terhadap Coremap sudah cukup baik, terbukti sebagian besar masyarakat tahu program yang dijalankan oleh Coremap. Pengetahuan ini berdampak pada berkurangnya intensitas pengeboman ikan di laut oleh masyarakat. Akan tetapi penggunaan potassium masih banyak dilakukan oleh penduduk terutama nelayan penyelam. Penggunaan potassium sulit diberantas karena pemanfaatannya yang sembunyi-sembunyi dan tidak terlihat dari perkampungan.

Sampai tahun 2009 ini, dampak COREMAP terhadap perekonomian masyarakat di Desa Sikakap belum dapat terlihat dan sebagian responden mengaku belum merasakannya. Meskipun demikian, data statistik pendapatan penduduk menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan rumah tangga masing-masing sebesar 42,47 persen dan 37,98 persen selama tahun 2007-2009. Peningkatan pendapatan tersebut lebih besar daripada inflasi di daerah yaitu 6,9 persen pada tahun 2007 dan 13,45 persen pada tahun 2008. Dengan demikian, secara umum terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di desa lokasi studi. Peningkatan rata-rata pendapatan ini masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat karena hanya ada 15 persen masyarakat mengaku kehidupan mereka lebih baik dibandingkan dengan sebelum ada coremap, sementara 85 persen mengaku sama saja atau bahkan lebih buruk. Pendapatan perkapita penduduk di lokasi studi lebih kecil dibandingkan dengan garis kemiskinan di Padang tahun 2009 (217.649 rupiah).

Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayan mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir sebesar 19,34 persen, dan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 32,68 persen. Peningkatan pendapatan ini lebih rendah dari peningkatan pendapatan masyarakat dari seluruh sumber mata pencaharian. Hal ini menunjukkan

bahkan pertumbuhan pendapatan dari sector kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan sector yang lain. Jika dibandingkan dengan inflasi di daerah Sumatera Barat, pertumbuhan pendapatan perkapita dari kegiatan kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi. Hal ini menunjukkan selama dua tahun terakhir pendapatan penduduk dari perikanan relative stabil bahkan berkurang. Usaha ekonomi produktif yang sedianya digunakan untuk mendorong pendapatan dari sector perikanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga manfaat yang diambil dari program belum dapat dirasakan khususnya untuk peningkatan pendapatan nelayan.

Bertolak dari temuan penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang bisa diajukan antara lain:

- (1) Perlunya mengubah paradigma dalam merumuskan kegiatan COREMAP dengan mengedepankan azas partisipasi luas dan kepercayaan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan kegiatan, perlu diberikan pembelajaran melalui pembuatan demonstrasi plot untuk Pokmas yang telah layak untuk didanai, yang selektif jauh lebih bermakna daripada mengejar target proyek yang berskala besar dengan membuat banyak Pokmas.
- (3) Perlunya penguatan kelembagaan menyangkut peningkatan kemampuan managerial jajaran pengurus LPSTK, dan Pokmas percontohan. Hal ini penting, karena kegiatan COREMAP bertumpu pada kegiatan kelompok, dan rendahnya kemampuan berorganisasi serta peningkatan keterampilan dalam penguasaan teknologi bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan secara selektif.
- (4) Mekanisme penyaluran dana perlu diubah dengan mencontoh program PNPM yang dapat menghindari kebocoran dana dimana sangat ketat dalam pengawasan dan ada sanksi tegas bila terjadi pelanggaran.

- (5) Meningkatkan kemampuan SDM aparat pelaksana, keterbukaan manajemen administrasi keuangan, merupakan prasarat dibangunnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPSTK. Hal ini dapat ditempuh dengan reorganisasi LPSTK yang kebetulan masa baktinya telah berakhir. Anggota LPSTK yang dinilai bersih tetap dipertahankan dan sebaliknya mereka yang terlibat KKN segera diganti. Prakarsa reorganisasi dapat dilaksanakan oleh Kepala atau Sekretaris Desa Sikakap.
- (6) Kekurangpahaman tentang manfaat dan cara memanfaatkan ekosistem terumbu karang akan mempunyai pengaruh langsung dengan sikap dan tingkah laku yang tidak kondusif terhadap kesehatan terumbu karang dengan segala akibatnya. Oleh karena itu proses sosialisasi oleh COREMAP harus tetap digalakkan meskipun sebagian besar telah mengetahui hal ini. Kegiatan sosialisasi dan warta COREMAP sebaiknya diliput melalui media massa terutama lewat siaran radio amatir yang ada di Sikakap yang direncanakan akan memperoleh bantuan dana dari Pemda pada tahun anggaran 2010.

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	iii	
RINGKASAN EKSEKUTIF	v	
DAFTAR ISI	ix	
DAFTAR TABEL	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan Penelitian	6
	1.3. Metodologi	7
	1.3.1. Lokasi Penelitian	7
	1.3.2. Pengumpulan Data	8
	1.4. Gambaran lokasi penelitian	10
	1.4.1. Keadaan Geografis	10
	1.4.2. Kondisi Sumber daya Alam dan pengelolaannya	15
	1.4.3. Sarana dan Prasarana	20
	1.4.4. Kependudukan	24
BAB II	PENGELOLAAN COREMAP	33
	2.1. Tingkat Kabupaten	33
	2.2. Tingkat Desa	36
	2.3. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan/Program COREMAP	75
BAB III	PENDADAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA	83
	3.1. Pendapatan Penduduk	84
	3.2. Pendapatan Anggota Pokmas	88
	3.3. Pendapatan dari kegiatan kenelayanan	91

3.4. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Penduduk	95
3.4.1. Kebijakan Pemerintah (COREMAP dan Program Pemerintah lainnya)	96
3.4.2. Faktor Internal	98
3.4.3. Faktor Eksternal	100
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	103
4.1. Kesimpulan	103
4.2. Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kerusakan Karang Nasional	4
Tabel 1.2.	Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Sikakap 2007	26
Tabel 1.3.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin di Desa Sikakap, 2007	27
Tabel 1.4.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Suku Bangsa di Desa Sikakap. 2007	28
Tabel 1.5.	Kegiatan Utama yang Dilakukan Menurut Jenis Kelamin di Desa Sikakap. 2007	30
Tabel 1.6.	Jenis Pekerjaan Utama Menurut Suku Bangsa di Desa Sikakap, 2007	31
Tabel 2.1.	Pengetahuan Responden tentang Program/ Kegiatan COREMAP	77
Tabel. 2.2.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan COREMAP	78
Tabel 2.3.	Pendapat Responden tentang Manfaat Program Kegiatan COREMAP	79
Tabel 2.4.	Program Kegiatan COREMAP II Di Desa Sikakap Kondisi dan Permasalahan	80
Tabel 3.1.	Statistik Pendapatan penduduk di Desa Sikakap, Tahun 2007 dan 2009	86
Tabel 3.2.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009	87

Tabel 3.3.	Statistik Pendapatan anggota kelompok masyarakat di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009	89
Tabel 3.4.	Distribusi Rumah Tangga Pokmas Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009	90
Tabel 3.5.	Statistik Pendapatan rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009	92
Tabel 3.6.	Statistik Pendapatan rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan menurut musim di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009	93
Tabel 3.7.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, Tahun 2007 dan 2009	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daerah Mentawai merupakan kepulauan, karena terdapat 252 pulau kecil dan 4 pulau besar, dan 91 persennya merupakan wilayah laut. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi utama daerah tersebut terkait dengan ekosistem pesisir. Salah satu dari tiga ekosistem penting daerah pesisir dan sekaligus suatu sistem ekologi laut yang mempunyai sifat kompleks adalah terumbu karang (*gadung*). Dalam ekosistem terumbu karang diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem tersebut dan telah diidentifikasi lebih dari 93 ribu spesies yang hidup. Komunitas terumbu karang yang saling berinteraksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik telah membuat pesisir sebagai habitat perlindungan, pemijahan dan pembesaran berbagai biota laut. Ini berarti bahwa dalam ekosistem terumbu karang mempunyai kekayaan plasma nutfah yang sangat besar. Terumbu karang kendati mempunyai sifat yang dapat pulih kembali (*renewable*), namun kemampuan untuk pulih kembali bila mengalami kerusakan sangat terbatas dan memerlukan tempo yang panjang. Oleh karena itu kerusakan pada ekosistem terumbu karang akan berakibat terputusnya hubungan kait-mengkait antar komponen biotik dan antar komponen abiotik, termasuk tidak berfungsinya sebagai pelindung dari ombak dan abrasi laut.¹

Selain terumbu karang mempunyai nilai ekologis, terumbu karang dilihat dari kepentingan kehidupan manusia merupakan sumber bahan makanan dan sekaligus sumber bahan obat-obatan dan kosmetik

¹ Uraian lebih dalam tentang isu terumbu karang dapat dibaca dari buku Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Terumbu Karang. Oleh Panitia Program MAB Indonesia, LIPI. Jakarta: 10-12 Oktober 1995.

yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini dan masa mendatang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap hari tanpa disadari penduduk telah memanfaatkan sumber daya laut dan ekosistem terumbu karang, antara lain berbagai jenis ikan karang, udang-udangan, dan kerang-kerangan tidak sekedar untuk konsumsi rumah tangga namun telah menjadi komoditi ekspor ke luar negeri (Daliyo dan Suko Bandiyono. 2002: 1). Selain itu kondisi lingkungan laut yang apik bahkan telah menjadi obyek wisata bahari yang banyak dicari oleh wisatawan asing, antara lain daerah tertentu di Mentawai seperti di pantai barat P. Pagai Utara dan daerah Tuapejat. Perkembangan wisata bahari kalau dikelola secara baik dengan sendirinya akan memberi pengaruh ganda antara lain pengembangan resort, perhotelan, rumah makan, kerajinan, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Habitat ekosistem terumbu karang hanya cocok di daerah tropis yang mempunyai suhu laut antara 28-31 derajat Celcius, sehingga di daerah tersebut terdapat kekayaan biota laut, 60 % terumbu karang berada di Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, Malaysia, Philipines dan Kep Solomon. Oleh karena itu wilayah laut di Indonesia telah menjadi obyek perburuan berbagai biota laut oleh nelayan internal yang umumnya hidup dalam kemiskinan, jumlahnya hampir 3 juta orang dan nelayan internasional atau asing antara lain datang dari Thailand, Filipina, Korea, dan China. Nelayan tersebut mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi penangkapan yang berbeda-beda, tergantung latar belakang kemampuan sosial-ekonomi mereka. Sebagian hasil tangkapan nelayan Indonesia telah dipasarkan ke luar negeri, antara lain lobster, ikan kerapu (*kurep*) dan ikan hias bahkan karang hidup, guna memburu keuntungan besar. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekosistem terumbu karang di Indonesia terkait dengan persoalan modernisasi struktur ekonomi global yang cenderung mementingkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pertumbuhan produksi. Hal ini dipicu oleh kerakusan yang menunjang keinginan "modernisasi", masyarakat kaya yang terus memburu kenyamanan hidup.

Nelayan yang mempunyai kemampuan sosial-ekonomi kuat cenderung memiliki alat teknologi yang lebih maju dan mempunyai kemampuan jelajah yang lebih jauh. Perbedaan kemampuan penguasaan pengetahuan dan teknologi juga berkorelasi positif dengan kemampuan mengeksploitasi sumberdaya laut. Nelayan tradisional seperti di Sikakap yang umumnya tergolong miskin, mereka tidak mampu bersaing dengan nelayan dari daerah lain (nelayan andon). Dengan demikian daerah Mentawai, termasuk kawasan Pagai, telah dijadikan obyek penangkapan oleh nelayan andon, misalnya nelayan yang datang dari Sibolga, Bengkulu, Padang dan dari Jawa. Puluhan kapal pukat cincin beroperasi di kawasan tersebut dan mereka sering singgah di pelabuhan perikanan di Sikakap untuk mengisi air dan es curah.

Daerah yang menjadi sasaran penangkapan umumnya sekitar terumbu karang, karena ditempat tersebut berkumpul banyak ikan, antara lain di sekitar P. Semego. Dalam kenyataan banyak kegiatan penangkapan ikan di daerah terumbu karang yang tidak ramah lingkungan, antara lain menggunakan racun dan menggunakan bom. Eksploitasi yang berlebihan dengan mengabaikan kaidah konservasi telah menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Karang laut dan pasir laut juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat terutama untuk kebutuhan fondasi jalan, saluran air, pagar pekarangan dan fondasi rumah. Sejalan dengan meluasnya sosialisasi program COREMAP, penambangan karang dan pasir laut di Sikakap mulai menurun, namun penangkapan ikan kerapu, lobster dan ikan hias dengan potasium masih berlangsung. Menurut salah satu responden yang biasa melakukan praktik pembiusan mengatakan bahan potasium bisa didapatkan di Sikakap dengan harga Rp.75 ribu rupiah per kilonya. Perdagangan potasium tersebut dilakukan secara tertutup, hanya nelayan tertentu dan dipercaya yang bisa memperolehnya. Praktik pemotasan tersebut jelas telah merusak ekosistem terumbu karang.

Hasil penelitian Tim Ekologi LIPI telah mengukur kerusakan karang di 686 lokasi stasiun di Indonesia. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Kerusakan Karang Nasional

Wilayah Indonesia	Jumlah lokasi stasiun	Kualitas karang			
		Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang
Barat	278	5,40	24,10	34,17	36,33
Tengah	213	6,10	31,92	45,07	16,30
Timur	195	6,15	21,03	30,77	42,05
Indonesia	686	5,83	25,66	36,59	31,92

Sumber: Suharsono.2005 (www.coremap.go.id)

Catatan: Nilai kategori:

Sangat baik	: 75-100 %
Baik	: 50-74,9 %
Cukup	: 25-49,9 %
Kurang	: 0 -24,9 %

Atas dasar hasil penelitian tersebut jelas menunjukkan bahwa hampir sepertiga karang di Indonesia kualitasnya tergolong kurang baik, bahkan untuk wilayah Indonesia Barat (termasuk daerah Mentawai) persentasenya telah mencapai 36,33 persen. Di wilayah barat kondisi karang yang tergolong sangat baik hanya 5,4 persen, lebih rendah daripada kondisi nasional sebesar 5,83 %. Ancaman kerusakan terumbu karang juga dipengaruhi perubahan suhu global yang makin panas, sehingga temperatur air laut dapat naik lebih dari 31 derajat Celcius. Khusus untuk daerah Mentawai ancaman kerusakan terumbu karang karena faktor alam diperkirakan akan dialami bila terjadi gempa-tsunami di daerah tersebut, yang waktunya belum dapat dipastikan, namun diprediksi akan terjadi. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah terjadi gempa di laut, dengan kekuatan lebih 9 skala

Richter dan menimbulkan tsunami besar pada tahun 1797 dan 1833 (Kompas 23 Juni 2007).

Sebagai respons atas kondisi terumbu karang, pemerintah Indonesia dengan bantuan dana dari ADB dan Bank Dunia, telah meluncurkan program pengelolaan terumbu karang yang disebut COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). Dalam program tersebut, kebijakan implementasi telah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang berkelanjutan, namun dikoordinir secara nasional. Selain itu dana untuk program COREMAP seperlimanya berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Instansi pemerintah daerah yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat kabupaten. Desentralisasi pengelolaan terumbu karang ini dilakukan untuk mendukung dan sekaligus memberdayakan masyarakat pantai. Diharapkan dalam program COREMAP tersebut bahwa masyarakat pantai dapat melakukan *co-management* secara berkelanjutan agar kerusakan terumbu karang dapat dicegah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program COREMAP 2005-2009 terutama akan dilihat dari segi *output*, *outcome* dan *impact* yang meliputi aspek biofisik dan aspek sosial-ekonomi. Indikator dari aspek biofisik bahwa program tersebut akan dapat meningkatkan tutupan karang paling tidak 5 persen per tahun, sampai tercapai pada level yang sama dengan daerah lain yang telah dikelola dengan baik atau daerah terumbu karang yang masih asli/belum dimanfaatkan (*pristine area*). Menurut Project Appraisal Document, ADB tahun 2005, indikator keberhasilan dilihat dari aspek sosial-ekonomi adalah :

1. Pendapatan per kapita masyarakat di lokasi target COREMAP naik sebesar 2 persen per tahun.
2. Terdapat peningkatan taraf hidup sekitar 1000 rumah tangga di seluruh lokasi pada akhir program.

Sejalan dengan program COREMAP II, lebih dahulu diadakan penelitian data dasar aspek sosial-ekonomi terumbu karang pada bulan Juni 2007, meskipun di Sikakap program COREMAP telah dilakukan (T0). Desa Sikakap telah dipilih menjadi obyek COREMAP II atas dasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mentawai No.52, tertanggal 14 Mei 2005. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan sebagai penentu data dasar atau titik awal (T0) yang dapat menggambarkan kondisi obyektif kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum program intervensi COREMAP II dilakukan.

Meskipun demikian, dalam kenyataan sebelum penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2009, di Sikakap lebih dahulu telah dimulai intervensi program COREMAP I yaitu pendirian pondok informasi, usaha budidaya rumput laut, budidaya pembesaran kepiting bakau (*laguk*) di Sinaka. Selain itu beberapa ibu telah dilatih ketrampilan antara lain pembuatan baso ikan (*iba*), kerupuk ikan dan pembuatan ikan asin di Tuapejat. Dalam bulan Juni 2007, dua orang juga telah dikirim ke Situbondo, Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan ketrampilan memanfaatkan limbah kerang-kerangan untuk cinderamata. Setelah selesai mengikuti pelatihan mereka tidak berusaha membuat kerajinan, dengan alasan kesulitan bahan pelengkap yang tidak dapat diperoleh di Sumatera Barat. Beberapa orang staf LPSTK juga telah mengikuti pelatihan jangka pendek tentang budidaya di Lampung dan pelatihan di Padang. Setelah itu dalam program COREMAP II, Desa Sikakap telah mendapat prioritas pelaksanaan program COREMAP yang terlihat dari besaran dana dan sekaligus banyaknya Pokmas Usaha Ekonomi Produktif, antara lain pembuatan batu bata, pengolahan rumput laut untuk makanan, pembuatan ikan asin dan pembuatan minyak nilam.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tahun 2009 ini dimaksudkan sebagai monitoring dan evaluasi atau mengkaji dalam pelaksanaan program, terutama mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah penelitian Sikakap. Dengan

demikian penelitian ini untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan lebih khusus penelitian ini bermaksud :

- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan COREMAP baik pada tataran kabupaten dan tataran desa.
- Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai program COREMAP.
- Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat

1.3. METODOLOGI

1.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini telah ditetapkan oleh program COREMAP yaitu di kawasan Sikakap, Kabupaten Mentawai. Daerah ini ditetapkan sebagai daerah program COREMAP II atas dasar hasil penelitian sebelumnya tentang kondisi fisik dan biologis sumber daya laut yang menunjukkan bahwa daerah ini sangat potensial namun telah mengalami degradasi terumbu karang yang cukup memprihatinkan. Kawasan ini terletak di ujung timur Selat Sikakap yang mencakup sebagian kecil daerah P.Pagai Utara dan P.Pagai Selatan. Secara administratif kawasan ini adalah Desa Sikakap, merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Pagai Utara Selatan. Daerah penelitian tersebut terdiri atas 6 dusun yaitu Sikakap Timur, Sikakap Tengah, Sikakap Barat, Sibaibai, Berkat Baru dan Sei Baru. Dusun-dusun tersebut letaknya di kiri-kanan selat yang memanjang kearah barat dari ujung timur selat. Tiga dusun yang disebutkan terakhir terletak di P.Pagai Selatan. Konsentrasi permukiman penduduk lebih banyak berada di bagian utara selat sejalan dengan perkembangan sarana publik di daerah tersebut seperti perkantoran, PLN, pasar, penginapan, pertokoan dan pelabuhan. Dengan demikian distribusi responden yang menyebar di

semua dusun, namun lebih banyak berada di utara Selat Sikakap yaitu di P. Pagai Utara.

1.3.2. Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, lebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan beberapa metode : (1) observasi ; (2) survei; (3) wawancara mendalam ; (4) diskusi kelompok ; dan (5) pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dilapangan dilakukan pada minggu kedua hingga minggu keempat bulan Mei 2009. Dua tahun sebelumnya penelitian dasar (T0) juga telah dilakukan dengan metodologi yang sama Sebelum penelitian di Sikakap lebih dahulu tim peneliti mengumpulkan data dan informasi pada tataran kabupaten di Tuapejat terutama instansi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Yayasan Karekat.

Selanjutnya sebagai langkah awal penelitian, tim peneliti melakukan observasi terhadap berbagai obyek yang dianggap relevan yaitu lokasi rencana DPL, kondisi kawasan Desa Sikakap, alat tangkap; keramba apung; budidaya rumput laut, pelabuhan perikanan pantai, jenis komoditi di pasar, tempat alternatif pembuangan sampah, penyulingan minyak nilam di Dusun Sibai bai, kondisi pesisir, alat transportasi /komunikasi dan observasi keadaan selat Sikakap. Daerah yang menjadi obyek observasi tersebut kemudian direkam dengan foto digital. Bersamaan dengan waktu observasi kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan survei sosial ekonomi rumah tangga penduduk.

Survei dilakukan dengan mewawancarai responden yang sama pada saat survei pada bulan Juni 2007. Selain itu dalam survei 2009 jumlah responden ditambah sebanyak 30 keluarga, khusus mereka yang menjadi anggota Pokmas. Dalam penelitian ini telah ditetapkan target responden yaitu sebanyak 130 keluarga. Target responden tersebut didistribusikan secara proporsional sesuai dengan jumlah keluarga di tiap dusun. Dalam melakukan survei tim peneliti dibantu oleh pewawancara setempat, yaitu guru-guru SMA, guru SMP dan perangkat

dusun Sikakap Timur. Sebelum mereka melakukan tugasnya terlebih dahulu diadakan pelatihan, guna mengetahui latar belakang penelitian, tujuan penelitian, memahami tata cara wawancara dan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini apabila calon responden telah pindah atau pergi dalam waktu lama maka penghuni rumah tersebut atau tetangga terdekat digunakan sebagai pengganti. Tiap hasil wawancara yang menggunakan instrumen kuesioner, diperiksa oleh tim peneliti. Manakala isian kuesioner dianggap diragukan atau tidak wajar, wawancara ulang dilakukan kembali. Dengan melakukan teknik pengumpulan data tersebut maka dapat diperoleh variasi responden sesuai dengan kondisi riil di daerah tersebut dan responden yang menyebar di tiap dusun.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengerti tentang daerah tersebut dan masalah terumbu karang, antara lain kepala Sekretaris Desa Sikakap, kepala dusun, nelayan keramba apung, ketua LPSTK, sekretaris LPSTK, bendahara LPSTK, Fasilitator Teknis, Fasilitator Desa, nelayan pemancing, Ketua Pokmas budidaya rumput laut anggota Pokmas pembuatan Batubata, Ketua pokmas pengolahan hasil laut, Ketua Pokmas pengolahan minyak nilam, Ketua Pengolahan hasil rumput laut, pegawai DKP Kabupaten Mentawai di Sikakap, dan kepala dusun Sikakap Timur. Di samping itu juga diadakan wawancara dengan pengelola radio amatir. Dengan melakukan wawancara mendalam telah diperoleh pengetahuan yang meluas tentang daerah tersebut, terutama isu yang terkait dengan tujuan penelitian.

Diskusi kelompok dilakukan satu kali yaitu dengan kelompok pengurus LPSTK dan Fasilitator. Dalam diskusi kelompok yang diadakan di Kantor Pusat Informasi COREMAP Sikakap dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas baik masalah yang selama ini dihadapi dan pemikiran kegiatan yang perlu dilakukan, antara lain untuk mengatasi pembuangan sampah dan mengatasi kendala kegiatan. Untuk melengkapi penelitian, tim peneliti juga mengumpulkan data sekunder pada tataran kabupaten dan tataran desa.

1.4. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN ²

Bagian ini membicarakan gambaran lokasi daerah Mentawai, khususnya tentang kawasan Sikakap. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ilustrasi kondisi umum daerah tersebut yang melatarbelakangi persoalan sumber daya laut, terutama tentang terumbu karang. Gambaran lokasi tersebut meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sarana-prasarana dan kependudukan.

1.4.1. Keadaan Geografis

Desa Sikakap terletak di bagian paling timur Selat Sikakap yang meliputi kawasan yang masuk P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan. Desa Sikakap mempunyai luas 22,5 km². Permukiman penduduk cenderung menempati dataran rendah yang sempit, dan dibelakangnya merupakan perbukitan yang dijadikan kebun dan hutan (*leleu*). Dua pulau tersebut dipisahkan oleh selat yang panjangnya hanya 7 kilometer dan lebarnya tidak lebih dari satu kilometer. Lebar selat Sikakap sekitar 300 m, hampir sama dengan lebar S. Mahakam di Samarinda. Meskipun selat tersebut relatif sempit dan pendek, namun mempunyai kedalaman alur sekitar 40 meter. Dengan adanya alur laut yang dalam maka kapal besar dapat melintas pulau (*nusa*). Kondisi arus selat tersebut sifatnya bolak-balik dimana pada saat pasang, arus laut datang dari arah barat dan sebaliknya pada saat surut, arus laut datang dari arah timur atau dari Selat Mentawai.

Kondisi air laut di selat tersebut relatif tenang, karena terhalang pulau. Di bagian ujung timur Selat Sikakap terdapat P. Bakat Benuang. ke arah barat selat terdapat P. Karawet yang ditumbuhi mangrove (*balat*). Di kiri-kanan Selat Sikakap sekitar Dusun Sibabai ke arah barat sebagian tumbuh hutan mangrove yang lebarnya hanya sekitar 25 meter. Hutan mangrove yang cukup luas terdapat di bagian timur laut P. Pagai Selatan,

² Karena kondisi geografis dan sumberdaya alam di Sikakap tidak mengalami perubahan pada kurun waktu 2007-2009 maka tilisan pada bagian ini sebagian besar dikutip dari laporan penelitian tahun 2007.

meskipun jumlah pohon cenderung berkurang karena banyak ditebang. Selisih maksimum pasang-surut Selat Sikakap hanya 1,2 meter. Kondisi selat yang demikian sangat kondusif untuk pelabuhan. Oleh karena itu pelabuhan antar pulau, pelabuhan minyak Pertamina, pelabuhan kayu HPH, pelabuhan ASDP dan pelabuhan perikanan berada di selat tersebut.

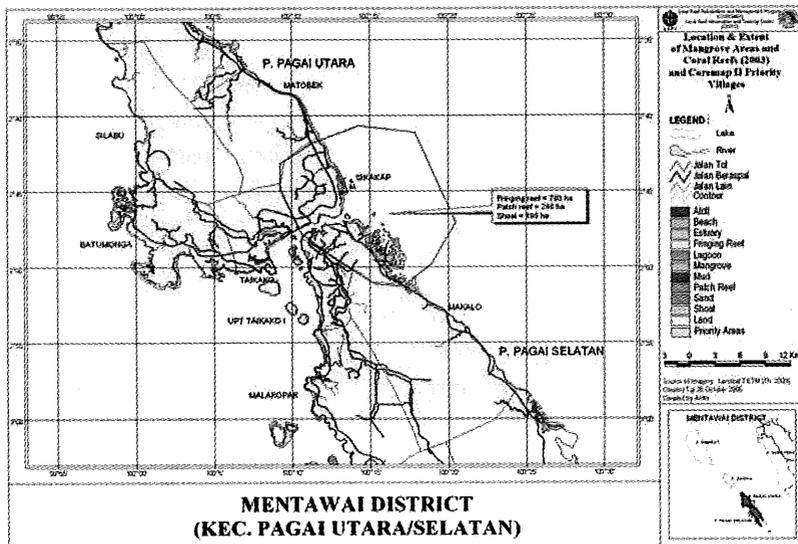
Kepulauan Mentawai, termasuk P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan terletak di Samudera Hindia, kurang lebih 100 kilometer sebelah barat dari daratan P. Sumatera. Letak kawasan Sikakap dari ibukota Kabupaten Mentawai di Tuapejat adalah 71 kilometer. Sedangkan jarak Sikakap dengan Kota Padang adalah 196 kilometer. Jarak tersebut kurang lebih sama dengan jarak ke Kota Bengkulu. Untuk mencapai ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi Sumatera Barat hanya tersedia sarana kapal laut. Adapun daerah penelitian yaitu Desa Sikakap, sekaligus merupakan tempat pusat pemerintahan Kecamatan Pagai Utara Selatan. Dengan demikian daerah ini merupakan pusat pertumbuhan untuk daerah Pagai Utara dan daerah Pagai Selatan.

Di bawah kepulauan Mentawai, dan di bagian barat selat Mentawai terdapat lempeng atau sesar yang memanjang dari sebelah barat Lampung menuju kearah utara melalui sebelah barat daerah Aceh. Dengan adanya lempeng samudera tersebut tentunya daerah Pagai mempunyai potensi bencana gempa dan tsunami dan bila terjadi akan terjadi perubahan topografi dan perubahan formasi terumbu karang. Hasil kajian ilmiah menunjukkan bahwa akibat pertemuan lempeng samudera Indo-Australia dengan lempeng Benua Eurasia pada tahun 1797 dan 1833 di daerah tersebut pernah terjadi bencana gempa dan tsunami. Pada saat gempa tahun 1883, pusat gempa berada di daerah P.Pagai.

Akhir-akhir ini tepatnya pada tanggal 12 November 2007 di utara P. Enggano telah terjadi gempa dengan skala 7,9 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di pinggir-pinggir sesar utama Mentawai, karena itu kemudian diikuti dengan puluhan gempa susulan. Kejadian gempa tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan ribuan rumah

yang melanda kawasan Bengkulu, Sumatera Barat dan daerah Jambi. Kerusakan bangunan di Sumatera Barat, juga terdapat di Kepulauan Mentawai yaitu daerah Siberut, Sipora dan Pagai.

Kendati gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami, namun Desa Sikakap juga memperoleh dampaknya yaitu terjadi kenaikan air laut setinggi 3 m sehingga naik ke jalan dan permukiman dekat pantai. Diperkirakan ada 186 bangunan kayu pinggir selat telah rusak, antara lain rumah-rumah responden. Bangunan yang rusak tersebut adalah mereka yang menempati daerah sepadan pantai yang sebenarnya dilarang dalam RTRW Kabupaten Mentawai Tahun 2005.



Dermaga pelabuhan Sikakap turun dan miring dan banyak bangunan di P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan juga mengalami kerusakan, termasuk gedung sekolah, Kantor Syahbandar pelabuhan Sikakap, dan Kompleks Kantor Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai. Akibat gempa tersebut banyak penduduk yang merasa ketakutan tinggal di daerah pantai dan mengungsi ke bukit. Beberapa

hari setelah gempa, beberapa desa di Pagai terjadi kekurangan suplai beras sehingga pada saat itu penduduk kembali mengkonsumsi makanan asli orang Mentawai yaitu ubi dan pisang. Sebagai dampak gempa tersebut 3 orang meninggal dunia.

Menurut hasil penelitian LIPI, pengulangan gempa besar akibat pertemuan lempeng utama tersebut dapat terjadi kembali yang diperkirakan sekitar tahun 2033. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada pengetahuan dan teknologi yang dapat memastikan kapan gempa akan terjadi. Gempa yang baru saja terjadi tanggal 12 November 2007, dikhawatirkan dapat mempengaruhi atau mengganggu Sesar Mentawai yang panjangnya 600 km dan apabila terjadi pelepasan energi dapat berpotensi terjadinya gempa di atas 8 skala Richter dan tsunami (Kompas, 13 September dan 6 Oktober 2007). Selain terdapat sesar Mentawai di sebelah barat Bengkulu baru saja ditemukan adanya gunung berapi dengan skala besar yang tumbuh di bawah laut. Gunung berapi di bawah laut tersebut juga merupakan ancaman terjadinya gempa dan tsunami apabila terjadi erupsi.

Kedadaan topografi P.Pagai merupakan perbukitan yang memanjang dari utara ke selatan. Sebagian besar areal P. Pagai Utara dan P.Pagai Selatan merupakan hutan belukar, dan sebagian masih terdapat hutan primer. Sebelum tahun tujuh puluhan P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan hampir seluruhnya masih ditutupi oleh hutan tropis yang masih perawan (hutan primer). Namun setelah pertengahan tujuh puluhan luas kawasan hutan primer berangsur-angsur berkurang sejalan dengan perluasan kawasan tebangan hutan oleh IPK.

Kerusakan ekosistem hutan (*le/leu*) dimulai sejak eksploitasi hutan oleh PT. Mundam Sakti dan HPH. PT. Minas Pagai Lumber Corporation (PT.MPLC) di bagian utara (*bare*) P. Pagai Utara. Hutan di daerah tersebut tumbuh di atas tanah jenis podsolid merah kuning. Hutan di daerah tersebut telah menjadi tumpuan kehidupan penduduk yang mendasarkan ketersediaan sumberdaya hutan. Permukiman penduduk cenderung tidak di daerah pegunungan tetapi menempati dataran rendah sempit yang letaknya terpencil-pencil di pesisir. Dengan

demikian 10 desa di Kecamatan Pagai Utara Selatan lebih mudah dicapai lewat laut daripada lewat darat yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua lewat jalan HPH. Meskipun di pantai barat tepatnya di daerah Silabu letaknya sangat terisolir namun terdapat resort yaitu fasilitas penginapan bagi wisatawan asing yang melakukan kegiatan selancar dan penyelaman. Kapal yang membawa wisatawan asing umumnya berlabuh di Sikakap untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke pantai barat lewat Selat Sikakap dengan menggunakan perahu motor. Sampai saat ini penduduk Sikakap belum mampu menangkap peluang ekonomi dengan adanya wisatawan asing yang masuk di daerah tersebut.

Kegiatan selancar dan kegiatan kenelayanan, dan mobilitas penduduk di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Secara umum daerah Pagai mempunyai curah hujan tahunan yang tinggi yaitu di atas 2500 mm, sehingga musim kemarau hanya terjadi beberapa bulan saja. Hal ini terjadi karena areal daerah Pagai relatif sempit (1.521 km²) namun terletak di Samudera Hindia yang sangat luas. Dengan demikian uap air di daerah tersebut sangat tinggi sehingga sangat berpotensi timbulnya hujan. Di daerah tersebut angin bertiup kencang pada saat musim gelombang kuat yang terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, musim pancaroba antara bulan November sampai dengan bulan Desember dan musim gelombang lemah terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei.

Pada saat gelombang kuat tiba yang sering disebut musim penghujan, ombak besar terjadi terutama di sebelah barat P. Pagai. Pada saat itu kegiatan nelayan cenderung berada di bagian timur P. Pagai, guna menghindari ombak besar, meskipun bagian timur pulau juga dipengaruhi pula. Namun, pada saat itu justru telah menjadi daya tarik wisatawan asing untuk melakukan selancar. Demikian pula sebaliknya pada saat musim timur berlangsung. Adapun kondisi perairan di Selat Sikakap cenderung kondusif sepanjang tahun, meskipun arus laut mengalami peningkatan pada saat musim barat (*skaleleu*) dan musim timur (*skolau balek*). Musim peralihan terjadi sekitar bulan Mei dan

sekitar bulan Oktober. Pada saat peralihan tersebut kondisi laut adalah tenang, sehingga pada saat itu kegiatan mobilitas di laut cenderung mengalami peningkatan. Pada saat akhir musim peralihan yaitu bulan Juli di daerah tersebut kepiting Anggau keluar dari sarangnya di lubang-lubang pasir untuk melakukan perkawinan, terutama pada saat bulan purnama. Pada saat itu pula penduduk setempat memanen kepiting Anggau untuk dimakan.

1.4.2. Kondisi Sumber daya Alam dan pengelolaannya

Telah disinggung dalam uraian geografi bahwa daerah belakang kawasan Sikakap merupakan daerah daratan dan daerah perairan. Secara umum daratan yang menjadi latar belakang Sikakap tersebut merupakan daerah pegunungan yang sebagian besar ditutupi hutan belukar. Hutan di daerah tersebut ditumbuhi oleh berbagai jenis kayu komersial yaitu meranti, manau (*bebeget*), kruing dan kayu kapur. Sebelum beroperasinya IPK PT. Mundam Sakti dan HPH PT. MPLC di daerah tersebut pada pertengahan tahun 70 an, ekosistem hutan di daerah tersebut masih utuh. Pada saat itu masyarakat asli masih menjadi bagian dari ekosistem hutan, karena hidupnya tergantung dari sumber daya hutan.

Pertengahan tahun tujuhpuluhan, di Indonesia pada umumnya dan di Pagai pada khususnya mulai terjadi perubahan yang dramatis yaitu masuknya kelompok kapitalis yang menanamkan modalnya untuk mengeksploitasi hutan primer guna mengisi kebutuhan kayu global. Jutaan kubik kayu komersial dari daerah tersebut ditebang. Pada tahun 2003 PT. MPLC tersebut sementara berhenti dan pada tahun 2007 mulai beroperasi kembali. Penebangan hutan. bergerak kearah selatan dan merambah P. Pagai Selatan bagian selatan. Pada waktu masih di Pagai Utara kayu-kayu yang telah ditebang kemudian diangkut lewat sungai menuju laut. Adapun pengangkutan kayu di Pagai Selatan , diangkut lebih dahulu dengan truk, setelah dikeluarkan dari hutan ke pinggir jalan tanah. Jalan tanah tersebut sengaja dibuat oleh perusahaan untuk mempercepat proses pengangkutan kayu ke Selat Sikakap. Selanjutnya

setelah kayu-kayu gelondongan terkumpul di laut kemudian ditarik dengan kapal tunda untuk meninggalkan daerah tersebut.

Hasil penelitian Yayasan Karekat Indonesia menyebutkan bahwa Desa Sikakap lebih maju dibandingkan kecamatan lain karena pengaruh masuknya pengusaha pengelola kayu PT. MPLC yang berjaya sejak tahun 70an hingga tahun 2003. Kegiatan daerah tersebut telah merubah wajah Sikakap menjadi kawasan industri, karena tumbuh industri kecil bidang perikanan. Namun demikian keberadaan HPH di daerah tersebut yang mengeksplotasi hutan secara besar-besaran telah menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian plasma nutfah dan menimbulkan erosi tanah. Pada saat hujan lebat warna air sungai menjadi keruh, putih kecoklatan. Hal itu terjadi karena penebangan hutan namun tidak diikuti dengan reboisasi kembali sebagaimana yang telah ditentukan. Berbagai jenis satwa seperti burung beo, burung murai batu, dan primata (monyet) berangsur-angsur punah. Padahal penduduk setempat, secara tradisi telah memanfaatkan daging primata untuk dikonsumsi guna memenuhi protein hewani. Sebagai kompensasi beroperasinya PT.MPLC di daerah tersebut tiap desa memperoleh bantuan dana 100 juta rupiah. Pada saat perusahaan tersebut berjaya penduduk setempat yang dekat dengan kantor PT.MPLC, terutama warga Dusun Seai Baru, juga dimanjakan dengan kebutuhan makan-minum secara gratis. Kantor PT.MPLC sekaligus tempat pengangkutan kayu letaknya juga di Desa Sikakap, di selatan selat. Sebelum kayu dikapalkan, terlebih dahulu diadakan pesta makan-minum bersama bagi masyarakat setempat, dengan menyembelih babi, kambing dan konsumsi ikan laut.

Dengan beroperasinya PT.MPLC di daerah tersebut ternyata telah membawa dampak terjadinya migrasi masuk. Banyak penduduk dari daratan Sumatera seperti orang Minang, orang Batak dan orang Nias yang mengambil peluang ekonomi antara lain dengan membuka warung makan, warung pakaian dan penginapan di Desa Sikakap. Sebelum tahun 2003, perusahaan kayu tersebut mempekerjakan kurang lebih 4.000 orang, yang umumnya datang dari luar Mentawai, seperti Jawa,

Lampung dan Sumatera Selatan. Pada saat ini, Juni 2007, jumlah pekerja di perusahaan tersebut masih terbatas, karena perusahaan yang ada sedang mempersiapkan untuk beroperasi kembali.

Lahan-lahan terbuka akibat penebangan hutan mulai terjadi. Lahan yang terbuka milik warga setempat sebagian ditanami tanaman keras seperti cengkih, kayu manis, cokelat, jengkol, bambu, durian, nangka, kelapa, langsung dan tanaman umur pendek seperti talas, ubi kayu, nilam dan pisang. Jenis komoditi yang dijual ke luar daerah antara lain cengkih, manau, pisang, nilam, coklat dan kelapa. Tanaman kelapa tumbuh subur sepanjang dataran pantai. Daerah tersebut sedikit sekali memproduksi sayuran, sehingga kebutuhan sayuran di Sikakap masih didatangkan dari Padang. Jenis sayuran yang masih didatangkan dari Padang antara lain tomat, wortel, kentang dan cabe merah. Orang Mentawai pada dasarnya mempunyai makanan pokok yaitu umbi-umbian, namun akhir-akhir ini mulai banyak mengkonsumsi beras yang sebagian besar didatangkan dari luar kabupaten, termasuk beras untuk rakyat miskin. Daerah persawahan terdapat di Sibaibai, Silabu, Taikako, Malakapa dan Semanganya. Di daerah Taikako persawahannya sudah ada irigasi, meskipun belum optimal dalam pemanfaatannya. Masalah pertanian sawah terkait dengan kesulitan tenaga kerja dan keterbatasan semangat bertani menetap, sehingga sawah yang ada belum dikelola secara intensif. Karena itu produksi beras lokal belum mencukupi kebutuhan penduduk.

Sumberdaya di daratan yang sifatnya non biotik adalah keberadaan batu putih dan pasir gunung. Sumberdaya ini masih sedikit dimanfaatkan untuk kebutuhan bangunan. Namun demikian sejalan dengan kegiatan penyelamatan karang, sudah ada pemikiran yang akan ditindaklanjuti yaitu penyediaan batu dan pasir gunung untuk kebutuhan konstruksi bangunan. Atas permintaan LPSTK Sikakap, pihak pimpinan PT.MPLC setempat (17 Juni 2007) secara lisan menyatakan kesediaan untuk membantu menyediakan material pasir gunung, karena tersedia truk dan alat berat lainnya. Pada minggu ketiga Juni 2007, perusahaan tersebut telah merealisasikan janjinya dengan pengadaan pasir gunung

sebanyak kurang lebih 120 kubik. Lokasi batu dan pasir gunung letaknya hanya sekitar 3 kilometer dari pinggir Selat Sikakap ke arah selatan, dekat dengan perkantoran PT.MPLC. Menurut rencana material batu gunung dan pasir gunung akan dikelola oleh LPSTK untuk dijual kepada khalayak umum dengan harga yang lebih ringan daripada harga batu karang. Dengan adanya material pengganti tersebut diharapkan penambangan batu karang di laut akan berhenti. Hal ini juga ditunjang oleh ketegasan pihak Polsek yang melarang penambangan batu karang. Manakala di Kabupaten Mentawai telah ada payung hukum yaitu peraturan daerah yang melarang penambangan karang laut, maka proses penuntutan bagi pelanggar, ke depan akan ditindaklanjuti. Selama ini penambangan batu karang meluas digunakan masyarakat, bahkan bangunan rumah pribadi bupati di Sikakap Barat dan bangunan Universitas Kristen Mentawai telah menggunakan karang laut dalam jumlah besar.

Persediaan pasir gunung secara swadaya masyarakat juga telah tersedia secara terbatas di Dusun Sibaibai. Pasir yang telah ditambang, kemudian dimasukkan ke dalam kantong, lalu dikumpulkan di pinggir jalan. Di Dusun Sibaibai juga tersedia batu gunung dalam jumlah yang besar, namun letaknya agak terisolir sehingga kalau mau dieksplorasi memerlukan perbaikan sarana jalan maupun jembatan agar kendaraan truk dapat masuk sampai ke pinggir bukit. Pada saat ini kondisi jalan dan jembatan mulai baik setelah program PNPM masuk ke daerah tersebut.

Di bagian timur Desa Sikakap, tepatnya di di Dusun Berkat terdapat gosong karang yang kelihatan saat air laut surut dan tidak kelihatan saat air laut mengalami pasang. Gosong karang yang oleh masyarakat setempat disebut *ambo*, merupakan lingkungan karang yang saat ini telah mati dan rusak, bukan saja karena dampak pemotasan tetapi juga menjadi obyek penambangan batu karang. Akibat pemotasan karang tersebut berwarna putih yang menunjukkan bahwa karang tersebut telah mati. Menurut salah seorang nelayan bernama Pak Edi, daerah tersebut sebelum rusak banyak terdapat ikan, lobster dan tripang. Saat ini daerah tersebut sudah sulit ditemui ikan kerapu, meskipun masih

ada ikan jenis putih yaitu ikan-ikan jenis pelagis. Pak Edi menuturkan bahwa saat ini untuk mencari ikan sudah jauh ke selatan yaitu memasuki kepulauan Siburiai, Pinatetet, Mabolak bahkan jauh di selatan masuk daerah Sinaka. Daerah tersebut masih banyak terumbu karang yang bagus, meskipun telah ada yang rusak akibat pemotasan dan pengeboman. Pada umumnya pengeboman dilakukan oleh nelayan andon yang menggunakan kapal dengan mesin berkekuatan di atas 40 Pk.

Jenis biota laut yang banyak ditangkap antara lain ikan jenis kakap, tenggiri, kerapu, ikan hias dan lobster. Banyak spesies ikan yang laku dipasaran lokal, namun untuk kebutuhan ekspor jenis ikan lebih selektif terutama spesies kerapu merah dan kerapu macan yang kondisinya masih hidup. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan hidup di Sikakap terdapat 4 orang penampung ikan yang aktif dan mempunyai keramba di belakang rumahnya, di Selat Sikakap. Di daerah tersebut juga telah dibuat 18 keramba apung dibiayai oleh APBD namun sebagian besar tidak aktif alias tidak digunakan.

Apabila jumlah ikan ekspor sudah cukup banyak, misalnya mencapai satu ton, kemudian pengelola keramba apung memberi tahu via telepon seluler ke pedagang eksportir. Dalam tempo beberapa hari saja "kapal Hongkong" datang ke Sikakap untuk membawa ikan-ikan tersebut. Kapal tersebut secara rutin beroperasi seputar P. Sumatera, dan bermarkas di Singapore. Mereka juga menampung hasil tangkapan lobster yang ditangkap oleh para nelayan. Lobster yang masih hidup kemudian dikirim ke Padang untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta dan Batam.

Di samping itu kawasan Sikakap juga mempunyai sumber daya laut yaitu kepiting bakau (*laguk*). Kepiting bakau yang di jual keluar daerah beratnya sekitar 0,75-2 Kg. Sebelum kepiting dikirim ke Padang lebih dahulu ditampung di pedagang penampung. Setelah jumlahnya cukup banyak kemudian kepiting hidup tersebut dikemas ke dalam kotak, untuk selanjutnya dikirim ke Padang lewat Kapal ASDP " Ambu-

Ambu". Seperti halnya lobster, kepiting tersebut oleh pedagang di Padang dikirim lagi ke Jakarta dan ke Batam.

1.4.3. Sarana dan Prasarana

Secara umum lokasi kawasan Sikakap adalah terisolir dari pusat kegiatan ekonomi Sumatera, karena berada di bagian barat P. Sumatera dan paling selatan dari kepulauan Mentawai. Meskipun demikian kawasan tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang relative lengkap untuk ukuran daerah kepulauan Mentawai. Pada saat ini di Sikakap terdapat infrastruktur publik yang cukup lengkap, meskipun masih pada skala terbatas.

Di bidang transportasi kawasan Sikakap menjadi tempat persinggahan beberapa kapal laut baik yang menghubungkan langsung dengan Kota Padang maupun harus lewat pelabuhan Tuapejat. Kapal-kapal yang dimaksud antara lain adalah Km. Ambu-Ambu, Km. Beriloga, Km. Sibulat, Km. Sumber Jaya, Km. Sumber Usaha Baru, Km Masabuk Jaya, Km Simasin, Km Mentawai Express dan Km Marusaha. Untuk melayani kebutuhan transportasi dengan Kota Padang maupun dengan Tuapejat bagi penduduk Sikakap dirasa telah mencukupi, namun untuk melayani transportasi laut ke desa-desa lain masih menghadapi banyak kendala, karena tidak ada kapal umum.

Di sektor pendidikan di daerah tersebut telah ada sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Sekolah-sekolah tersebut :

Taman Kanak-kanak ada 4 unit

Sekolah Dasar ada 5 unit.

Sekolah Menengah Pertama 3 unit

Sekolah Menengah Atas ada 1 unit, dan ada satu universitas. Sekolah-sekolah tersebut kondisi fisik bangunan masih baik. Universitas Kristen Mentawai yang baru saja berdiri, masih mengkhususkan pada bidang kajian dan pengembangan ilmu keagamaan. Berdirinya universitas tersebut antara lain mendapat bantuan dari yayasan Kristen

yang ada di Korea Selatan. Lokasi universitas tersebut terletak di Dusun Sibabai. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut dengan sendirinya telah menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tersebut, meskipun masih menghadapi berbagai kendala untuk mencetak anak didik yang berkualitas tinggi.

Di bidang kesehatan terdapat satu Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap. Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas yang ada juga dilengkapi satu mobil Puskesmas keliling. Operasional mobil yang ada tersebut sangat terbatas karena prasarana jalan di daerah tersebut masih sangat terbatas pula. Manakala anggaran daerah mencukupi, perlu tambahan fasilitas kapal Puskesmas, agar dapat menjangkau desa-desa lain yang letaknya menyebar sepanjang pantai. Puskesmas yang ada saat ini ada 3 orang dokter dan 19 paramedik.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di Puskesmas, di daerah tersebut terdapat pasien yang berobat terkait dengan kegiatan menyelam terlalu dalam tanpa perlengkapan yang memadai, yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan pecahnya gendang telinga. Hal ini karena di daerah tersebut masih ada pemotat yang menggunakan kompresor dan menyelam sampai lebih dari 20 meter. Satu dari 3 pasien yang berobat akhirnya meninggal dunia. Beberapa bulan terakhir tidak ada yang berobat karena resiko menyelam, karena ada salah satu pemotatan yang menjadi tahanan rumah. Akhir-akhir ini tidak ada yang berobat, kemungkinan khawatir kalau dilaporkan kepada Polsek.

Berdasarkan kenyataan bahwa Desa Sikakap telah berkembang dan untuk masa mendatang secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi perairan Selat Sikakap. Pada saat penelitian nampak bahwa sebagian besar rumah tangga membuang limbah rumah tangga, bahkan plastik ke laut Selat Sikakap. Limbah tersebut kemudian akan tidak nampak, karena terbawa oleh arus pasang yang datang dari arah barat. Artinya limbah tersebut akan terangkut ke laut di Selat Mentawai. Meskipun demikian selat Sikakap itu sendiri setiap saat terus mengalami polusi, dan dapat dipastikan telah menimbulkan degradasi kehidupan

biota termasuk terumbu karang. Terumbu karang di Selat Sikakap sebagian besar telah mati, karang telah berwarna putih.

Di sektor pemerintahan, daerah tersebut menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan, dan sekaligus menjadi desa Sikakap. Oleh karena itu di tempat tersebut terdapat Kantor Kecamatan, Kantor Polsek, Koramil, dan kantor Desa Sikakap. Di depan perkantoran tersebut adalah pelabuhan laut antar pulau. Dua kali seminggu di pelabuhan tersebut bersandar kapal dagang dan kapal penumpang. Kapal patroli TNI-AL kadang kala juga berlabuh di dermaga Sikakap. Di kompleks pelabuhan juga terdapat gudang pelabuhan.

Di samping itu di desa tersebut terdapat Kantor PLN dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang mengelola pengadaan es curah, penyaluran air dan pendaratan kapal ikan. Di kompleks pelabuhan perikanan pantai tersebut terdapat gedung Tempat Pelelangan Ikan seluas 480 m², namun tidak berfungsi dan bangunannya tidak terawat. Selain itu di kompleks yang luasnya 3,5 ha tersedia gedung pertemuan nelayan, ruang pendingin ikan, dan berbagai peralatan yang menunjang pengembangan industri perikanan. Manakala ada investor yang bergerak di bidang perikanan, dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Terkait dengan kegiatan perikanan, di Dusun Berkat Baru sedang dibangun proyek tempat budidaya ikan kerapu. Dengan anggaran daerah, bangunan pokok tempat pembibitan telah selesai dibuat. Letak bangunan di atas tanah urukan bekas rumpun bakau, menjorok sekitar 15 meter sehingga dekat air laut Selat Sikakap bagian selatan. Manakala proyek tersebut dapat berhasil membibitkan ikan kerapu (*kurep*), dapat dipastikan sangat menunjang program COREMAP di daerah tersebut. Namun demikian dapat diantisipasi bahwa untuk mewujudkan program tersebut masih memerlukan banyak upaya keras. Sangat disesalkan bahwa proyek yang bermasalah tersebut, telah mengalami kerusakan akibat bencana alam gempa, dan tsunami kecil.

Selain adanya kelembagaan tersebut di atas, daerah tersebut terdapat sarana peribadatan baik untuk kaum muslim maupun kaum protestan. Sarana peribadatan untuk kaum muslim yaitu berupa 3 masjid

serta 2 musola, dan untuk kaum Kristen yaitu 6 gereja yang menyebar di masing-masing dusun. Gereja di daerah tersebut adalah penganut Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM). Di daerah tersebut agama Kristen merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Meskipun terdapat perbedaan agama, namun kerukunan sosial antar umat sangat dijunjung sehingga tidak pernah terjadi konflik.

Untuk memenuhi kebutuhan energi BBM, di tempat tersebut terdapat depo Pertamina yang juga dibangun dipinggir Selat Sikakap, tepatnya di Dusun Sikakap Barat. Di kompleks Pertamina juga terdapat perumahan bagi karyawan, meskipun tidak selalu dihuni. Di Dusun Sikakap Barat, tepatnya dipinggir kompleks pelabuhan perikanan juga terjadi pasar sayur yang selalu ramai pada pagi hari. Di pasar tersebut terjadi jual beli hasil tangkapan ikan, ayam kampung dan berbagai jenis sayuran yang datang dari kampung sekitar. Jenis sayuran lokal antara lain terung, daun pakis, jengkol, daun ubi, dan bayam. Pasar tersebut belum mempunyai tempat khusus, namun secara spontan menempati pinggir jalan.

Di Kampung Sikakap Tengah, dikiri kanan jalan yang berukuran 5 meter berderet warung-warung pakaian, warung makan, wartel, wisma penginapan, bengkel motor, dan warung kelontong. Pengusaha warung-warung tersebut umumnya orang Minang yang datang dari daratan P.Sumatera. Sebagian kecil dari mereka mengontrak rumah, dan apabila dirasa tidak menguntungkan pindah dari daerah tersebut. Untuk menunjang kegiatan ekonomi di Desa Sikakap terdapat dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nagari.

Terkait dengan pogram COREMAP II, persis di belakang Kantor Desa Sikakap telah didirikan pondok informasi yang bentuknya rumah panggung. Pondok informasi tersebut diperuntukkan buat kegiatan LPSTK Sikakap, namun dalam kenyataan karena ketiadaan biaya operasional, pondok tersebut belum berfungsi. Pondok tersebut baru dimanfaatkan tahun 2008 Terkait dengan program COREMAP, salah satu warga Sikakap berinisiatif mendirikan pemancar radio amatir milik seorang warga desa Drs Amri S. Selain berprofesi sebagai seorang

penyiar radio, beliau juga bekerja sebagai staf pengajar senior SMP Sikakap Dalam acara siaran selain menyampaikan pesan pembangunan, hiburan juga iklan. Pada Bulan Juli 2007, Pak Amri S. secara sukarela bersedia membantu untuk melakukan sosialisasi program COREMAP. Mulai saat itu beberapa pesan tentang perlunya penyelamatan terumbu karang telah disiarkan.

1.4.4. Kependudukan

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi kependudukan Desa Sikakap, antara lain tentang jumlah, komposisi dan kualitas penduduk. Deskripsi tersebut diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam menjelaskan pendapatan penduduk dan kondisi sosial lain yang erat kaitannya dengan program COREMAP di daerah tersebut.

Penduduk Desa Sikakap tidaklah homogen, namun terdiri beberapa etnis seperti suku Minangkabau (40 %), suku Mentawai (30 %), dan suku lainnya antara lain Batak, Nias dan Jawa. Berdasarkan data dari Desa Sikakap dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk berjumlah 5.533 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 106. Dengan rasio jenis kelamin tersebut berarti jumlah laki-laki (2.853 jiwa) lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan (2.680 jiwa). Dari rasio jenis kelamin tersebut mengindikasikan bahwa Desa Sikakap merupakan daerah tujuan migrasi, karena umumnya daerah yang menjadi tujuan migrasi jumlah penduduk laki-laki lebih dominan daripada jumlah penduduk perempuan. Pada umumnya penduduk laki-laki lebih mobil daripada penduduk perempuan.

Dari sumber data yang sama juga dapat diketahui jumlah keluarga di Desa Sikakap adalah 1.158 dan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar 4,8 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut agama tampak bahwa persentase terbesar adalah Kristen Protestan (48 %), Islam (35 %) dan sisanya atau 17 % Kristen Katolik. Oleh karena itu di daerah tersebut dapat dilihat adanya sarana Masjid dan Gereja. Meskipun daerah tersebut terdapat perbedaan agama dan perbedaan

etnik namun sampai saat ini kerukunan diantara umat selalu terjaga. Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling bergotongroyong sehingga tidak menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan hasil survai ini dapat diketahui komposisi penduduk sampel Desa Sikakap menurut jenis kelamin. Secara umum data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki juga lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Data tentang komposisi penduduk menurut umur penting untuk melihat komposisi mereka yang berada pada usia sekolah, usia produktif dan angka beban tanggungan serta untuk mengetahui apakah desa tersebut termasuk dalam struktur penduduk usia muda atau telah mencapai struktur penduduk usia tua.

Atas dasar data yang tergambar dari Tabel 1.2 nampak bahwa struktur penduduk menurut umur masih tergolong muda yang ditandai bentuknya sebagai piramida atau kerucut. Penduduk umur muda yaitu di bawah 20 tahun yang jumlahnya masih banyak yang kemudian cenderung makin mengecil pada umur tua. Gambaran piramida penduduk tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa angka pertumbuhan penduduk alami di Desa Sikakap masih tergolong tinggi. Besarnya jumlah penduduk umur muda tersebut jelas menuntut perlunya fasilitas pendidikan yang kemudian akan diikuti dengan kebutuhan lapangan kerja bila mereka telah menamatkan sekolah menengah atas. Sebagai daerah kepulauan di daerah tersebut tentunya sangat diperlukan sekolah kejuruan yang bergerak pada bidang kemaritiman dan perikanan.

Tabel 1.2.
Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
di Desa Sikakap 2007

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki	Perempuan	
0-4	9,1	9,5	9,3
5-9	9,9	11,6	10,8
10-14	15,3	12,9	14,1
15-19	14,0	14,9	14,5
20-24	7,9	8,3	8,1
25-29	6,6	9,1	7,9
30-34	5,8	6,2	6,0
35-39	9,1	10,8	9,9
40-44	6,6	2,9	4,8
45-49	4,1	7,9	6,0
50-54	5,0	2,9	3,9
55-59	1,2	1,2	1,2
60-64	3,7	0,4	2,1
65 +	1,7	1,2	1,4
Jumlah	100,0 (242)	100,0 (241)	100,0 (483)

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2007.

Dengan melihat komposisi penduduk menurut umur di Desa Sikakap dapat diketahui proporsi penduduk usia produktif (15 -64 tahun) dan angka beban ketergantungan. Angka ketergantungan merupakan jumlah penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) dan penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Atas dasar formula tersebut dapat diketahui besarnya beban tanggungan di Desa Sikakap yaitu 0,55 Hal ini berarti bahwa tiap 100 orang penduduk produktif secara hipotetik harus menanggung 55 orang. Angka beban tanggungan tersebut masih jauh lebih besar daripada angka beban tanggungan pada tingkat nasional hasil Susenas tahun 2005 sebesar 0,51 per 100 (BPS. 2006). Adapun bila dibandingkan dengan beban tanggungan tingkat Kabupaten Mentawai pada tahun 2005 masih lebih

rendah yaitu sebesar 0,58. Untuk masa mendatang, diperkirakan angka beban tanggungan di Desa Sikakap akan mengecil sampai mendekati 0,44 pada tahun 2025.

Data primer hasil survei ini menggambarkan tentang tingkat capaian pendidikan penduduk Desa Sikakap berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan menurut jenis kelamin. Berdasarkan observasi sudah dapat diperkirakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa tersebut masih rendah. Hasil survei ini menunjukkan bahwa ada 58 persen penduduk usia sekolah yang capaian pendidikannya baru tamat SD ke bawah. Dengan kata lain penduduk yang mempunyai ijazah tertinggi SLTP ke atas hanya ada 42 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut tentunya tidak lepas dari letaknya yang terisolir sehingga kurang memperoleh akses pendidikan. Meskipun demikian saat ini sudah ada sekolah SMA dan baru saja didirikan perguruan tinggi ilmu agama Kristen yang mahasiswanya masih sangat sedikit. Tingkat pendidikan penduduk laki-laki nampak sedikit lebih baik daripada tingkat pendidikan perempuan. Data menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTP ke atas 42,5 persen dan tingkat pendidikan perempuan sebesar 40,4 persen.

Tabel 1.3.
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin
di Desa Sikakap, 2007

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki	Perempuan	
Belum/tidak Sekolah	5,7	4,3	5,0
Belum Tamat SD	25,4	23,1	24,2
SD Tamat	26,3	32,2	29,3
SLTP Tamat	23,4	21,2	22,3
SLTA Tamat	19,1	19,2	19,2
Jumlah	100,0 (209)	100 (208)	100 (417)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Tabel 1.4.
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Suku Bangsa
di Desa Sikakap. 2007

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Suku Bangsa		
	Minangkabau	Mentawai	Lainnya
Belum/tidak sekolah	6,3	15,2	5,3
Belum/Tidak tamat SD	6,3	33,3	0,0
SD Tamat	41,7	27,3	26,3
SLTP Tamat	22,9	12,1	36,8
SLTA Tamat ke Atas	22,9	12,1	31,6
Jumlah	100,0 (48)	100,0 (33)	100,0 (19)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sikakap dilihat dari komposisi menurut etnisitas atau suku bangsa ternyata menunjukkan perbedaan yang cukup menarik. Tingkat pendidikan penduduk etnik Mentawai ternyata lebih rendah daripada tingkat penduduk etnik pendatang. Penduduk etnik Mentawai yang berpendidikan SLTP tamat atau lebih tinggi hanya 24,2 persen, adapun tingkat pendidikan migran etnik Minangkabau 45,8 persen, bahkan bila dibandingkan dengan migran etnik di luar Minangkabau seperti Jawa, Nias dan Batak, berbedaannya jauh lebih besar. Tingkat pendidikan etnik lain yang tamat SLTP atau lebih tinggi mencapai 68,4 persen. Telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa Desa Sikakap merupakan daerah tujuan migrasi, antara lain karena merupakan daerah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa pemerintahan untuk wilayah Pagai Utara-Selatan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa migran adalah selektif dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Kegiatan ekonomi apa yang umum dilakukan oleh mereka dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah.

Jumlah penduduk di Desa Sikakap pada tahun 2005 sebesar 5.533 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 76.6 persen tergolong usia

kerja atau sejumlah 4.238 orang. Penduduk yang masuk usia kerja tersebut ada 45,3 persen tergolong angkatan kerja atau 2.506 orang. dan sisanya adalah penduduk bukan angkatan kerja, termasuk mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari sejumlah penduduk angkatan kerja tersebut ada 75 persen yang masuk kategori bekerja yang masuk kategori tidak mencari kerja dan yang mencari kerja sebesar 25 persen. Adapun mereka yang menganggur dan cari kerja adalah 8,6 persen dari angkatan kerja atau 215 orang. Adapun mereka yang bekerja sebanyak 1.879 orang dimana 22,9 persen bekerja sebagai nelayan atau 430 orang.

Mereka yang bekerja sebagai nelayan tersebut jumlahnya hampir sama dengan mereka yang bekerja sebagai tenaga penjualan yaitu 22,6 persen. Di sektor pertanian, yang menunjukkan bahwa pertanian baik tanaman pangan dan tanaman keras masih menjadi sektor utama bagi perekonomian penduduk di Desa Sikakap yaitu 20,34 persen. Tanaman keras yang menonjol adalah cengkih, pisang dan coklat. Adapun kegiatan pertanian pangan antara lain mereka yang menanam kangkung, talas dan singkong. Kegiatan pertanian lain yang menonjol adalah menanam tanaman nilam. Penanaman nilam dimaksudkan untuk bahan baku pembuatan minyak nilam yang umumnya masih diproses secara tradisional. Pada tahun 2009 harga minyak nilam berada pada level yang rendah yaitu Rp.300.000 per Kg. Pada tahun sebelumnya harga minyak nilam dapat mencapai sekitar Rp.700.000 per Kg. Jenis kegiatan pertanian tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang Mentawai, antara lain karena mendominasi pemilikan lahan pertanian dan kegiatan pertanian tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi. Orang Mentawai juga banyak yang bekerja sebagai tenaga kasar seperti bekerja buruh angkut di pelabuhan, tenaga penebang kayu dan pencari pasir gunung.

Dilihat dari perspektive jender, mereka yang masuk kategori bekerja tersebut sebagian besar dipegang oleh laki-laki. Mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang statusnya masih sekolah justru lebih banyak perempuan, walaupun tidak begitu besar selisihnya. Mereka

yang masuk kategori menganggur ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ada kecenderungan bahwa perempuan setelah menikah satu utamanya mengaku hanya mengurus kegiatan domestik rumah tangga. Meskipun demikian dalam kenyataan mereka membantu suami mencari nafkah, seperti ikut berjualan, ikut memasak sebelum disajikan di warung makan, dan ikut menjemur ikan. Kegiatan perikanan ternyata cukup memberikan sumbangan cukup besar pada penyerapan tenaga kerja di Desa Sikakap yaitu sebagai pekerja di perikanan tangkap, dan sedikit bekerja di perikanan budidaya. Perikanan tangkap mendominasi usaha penangkapan ikan, karena perikanan ini relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan ketrampilan khusus. Nelayan telah belajar menangkap ikan dari nenek moyang mereka sejak kecil. Modal yang diperlukan untuk usaha penangkapan ikan ini juga relatif kecil sebab nelayan di Sikakap kebanyakan terdiri dari nelayan tradisional yang membutuhkan peralatan relatif murah seperti pancing dan perahu.

Tabel 1.5.
Kegiatan Utama yang Dilakukan Menurut Jenis Kelamin
di Desa Sikakap. 2007

Kegiatan Utama yang Dilakukan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki	Perempuan	
Bekerja	49,8	13,1	31,6
Menganggur Tidak Mencari Kerja	8,6	5,3	7,0
Menganggur Mencari Kerja	5,7	1,5	3,6
Sekolah	33,0	37,4	35,2
Mengurus Rumah Tangga	0,0	39,4	19,5
Lainnya	2,9	3,3	3,1
Jumlah	100,0 (209)	100,0 (206)	100,0 (415)

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Tabel 1.6.
 Jenis Pekerjaan Utama Menurut Suku Bangsa di
 Desa Sikakap, 2007

Jenis Pekerjaan Utama	Suku Bangsa			Jumlah
	Minangkabau	Mentawai	Lainnya	
Nelayan	44,2	12,5	22,2	22,9
Petani tanaman pangan	0,0	31,3	5,6	11,8
Petani tanaman keras	0,0	18,8	11,1	8,6
Tenaga penjualan	39,5	9,4	5,6	22,6
Tenaga kasar	9,3	18,8	5,6	11,8
Tenaga jasa	7,0	9,4	44,4	15,1
Peternak	0,0	0,0	5,6	1,1
Jumlah	100,0 (43)	100,0 (32)	100,0 (18)	100,0 (93)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Catatan : Hanya responden kepala keluarga yang statusnya bekerja.

Jenis pekerjaan utama dilihat dari etnisitas nampak bahwa orang Minang di Sikakap sangat dominan bekerja di kegiatan kenelayanan dan perdagangan. Hampir setengah responden orang Minang bekerja sebagai nelayan, banyak yang mencari ikan dan ada yang membuat keramba ikan kerapu dan lobster hasil tangkapan. Keramba yang dibuat di pinggir Selat Sikakap bukan untuk pembesaran tetapi sebagai terminal sementara sebelum dijual ke luar daerah. Usaha warung makan, toko kelontong, toko pakaian hampir seluruhnya dilakukan oleh orang Minang. Mereka berusaha dan sekaligus bertempat tinggal di kiri-kanan jalan desa, memanjang dari kantor kecamatan ke arah kantor Desa Sikakap. Mereka tidak seluruhnya memiliki rumah sendiri, sebagian hanya mengontrak atau menyewa. Apabila keuntungan dianggap menguntungkan dan yang merasa tidak aman karena terlanda bencana

gempa bumi 12 September 2007, sebagian telah pindah ke kabupaten lain di daratan Sumatera Barat.

Orang-orang yang masuk kategori etnik lainnya (Jawa, Batak, Nias) umumnya bekerja sebagai tenaga jasa antara lain sebagai pegawai negeri sipil seperti guru, pegawai PLN dan pegawai Puskesmas serta pegawai pelabuhan, polisi dan pekerja hotel.



BAB II

PENGELOLAAN COREMAP

2.1. TINGKAT KABUPATEN

Di Desa Sikakap implementasi kegiatan COREMAP II pada tahun 2008/2009, ditekankan kepada kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA). Dalam tahun anggaran tersebut, kegiatan COREMAP di tingkat kabupaten telah terbatas. Meskipun demikian masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan, dan itu pun kinerjanya tidak berjalan secara optimal.

Kegiatan PIU di tingkat kabupaten antara lain mengadakan rapat koordinasi lintas sektor selaku mitra kerja DKP dengan kepolisian, Departemen Perhubungan, Kamla, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Dinas Kimpraswil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Yayasan Karekat. Agenda rapat koordinasi tersebut dalam implementasinya sering tidak berjalan secara optimal antara lain karena hanya dihadiri oleh wakil-wakil instansi yang tidak memiliki kapasitas dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan COREMAP.

Kegiatan pemantauan kondisi terumbu karang, potensi perairan dan penentuan tata letak lokasi DPL, sudah dilakukan pada tahun 2005 oleh team CRITIC Kabupaten dengan melibatkan pihak pemerintah desa, DPD, Perguruan Tinggi Universitas Bung Hatta, LSM Karekat, dan masyarakat. Hasil kegiatan tersebut sebagian terangkum dalam buku Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) 2006 yang tersimpan di Yayasan Karekat. Buku ini menjadi rujukan dalam merumuskan program kegiatan COREMAP II, yang sesungguhnya baru merupakan pedoman awal. Untuk sampai kepada perumusan rencana kegiatan, seharusnya pihak PIU masih harus menindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan pada masing-masing butir kegiatan, yang harus melibatkan

tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. Tahap selanjutnya, hasil studi kelayakan tersebut masih harus dibahas melalui sebuah forum konsultasi publik agar mendapatkan pembahasan dan masukan demi ketepatan dan kesempurnaan sebuah program kegiatan. Ke dua tahap yang terakhir ternyata tidak dilakukan.

Selain buku RPTK, juga telah disusun buku hasil pemantauan Tim CRITIC yang isinya memuat kondisi terumbu karang di perairan Mentawai, kususnya lokasi-lokasi yang akan dijadikan kawasan DPL. Tim peneliti PPK-LIPI tidak memperoleh buku laporan tersebut, karena pihak CRITIC Kabupaten Mentawai merasa keberatan mengingat hasilnya yang dinilai kurang lengkap, dan menganjurkan untuk lebih baik melihat hasil penelitian CRITIC LIPI yang dinilai hasilnya lebih sempurna, sehingga bisa dijadikan rujukan.

Pada tahun 2005 – 2006 konsentrasi kegiatan COREMAP di tingkat kabupaten lebih difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan penyadaran akan pentingnya upaya penyelamatan terumbu karang. Bentuk kegiatannya antara lain pembuatan pamflet, poster, billboard, papan-papan pengumuman yang memuat kegiatan program COREMAP, seruan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak terumbu karang, dan pembuatan buku-buku materi pelajaran lingkungan untuk murid-murid SD. Sosialisasi melalui Radio Daerah juga dilakukan dan dirasa cukup efektif dalam proses peningkatan pengetahuan program COREMAP. Khusus untuk daerah Sikakap siaran radio amatir justru terlupakan untuk dimanfaatkan. Pada hal radio ini merupakan sarana komunikasi yang penting untuk masyarakat yang tinggal di kepulauan Mentawai bagian ujung selatan. Media komunikasi radio dapat digunakan untuk menyampaikan himbuan yang memuat pesan-pesan pembangunan. Untuk memanfaatkan media radio amatir di Sikakap baru mulai digunakan pada tahun 2007 atas usulan Tim Peneliti PPK-LIPI.. Ke depan jangkauan siaran radio ini akan ditambah, dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menganggarkan dana untuk keperluan tersebut pada tahun 2010.. Rencana ini juga akan dikonsultasikan dengan pihak Departemen Perhubungan.

Menyangkut bidang pengawasan dan penyelamatan Terumbu Karang (MCS), sejauh yang peneliti ketahui, belum pernah ada kegiatan pelatihan bagaimana melakukan pengawasan dan patroli laut, bagaimana memberi pembekalan hukum kepada Pokmaswas, bagaimana melakukan pelaporan, bagaimana melakukan penangkapan kepada pihak pelanggar, bagaimana menyimpan barang bukti dan sebagainya. Dalam tahun 2008/2009 kegiatan yang dilakukan terutama menyeleksi proposal-proposal yang masuk ke PIU, serta kegiatan-kegiatan pelatihan MPA yang dilakukan di Balai Benih Lampung dan pelatihan pengolahan rumput laut di Dusun Berkat Baru.

Program kegiatan tahun sebelumnya (lihat laporan tahun 2007) seperti pengembangan wisata bahari, pengembangan kerajinan souvenir, kursus-kursus bahasa Inggris untuk pemandu wisata, pelatihan diving, Budidaya kepiting bakau, pembuatan buku panduan wisata, bahkan kegiatan penambangan pasir gunung dan batu gunung sebagai alternatif pengganti pasir laut dan terumbu karang terhenti. Kegiatan yang masih berlanjut adalah Budidaya rumput laut, meskipun mengalami kegagalan dan menyisakan persoalan yang cukup pelik. Kegiatan ini tetap dilanjutkan, bahkan dalam volume yang jauh lebih besar lagi.

Kegiatan yang baru seperti penyulingan minyak nilam, pengolahan ikan, pengolahan rumput laut, pembuatan bata, Budidaya ayam potong, penanganan sanitasi lingkungan berupa pembuatan MCK dan pembuangan sampah, dan pembuatan bangunan tambat perahu. Kesemua kegiatan tersebut dilakukan setelah melalui seleksi oleh pihak PIU. Dalam kenyataan proposal-proposal tersebut tidak ada yang gagal sepanjang mengikuti topik- topik yang telah ditentukan

Uraian mendalam dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada bagian pengelolaan COREMAP II pada tingkat desa atau lokasi.

2.2. TINGKAT DESA

Selama kurun waktu empat tahun terakhir 2006 – 2009, kegiatan COREMAP II di Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan, Kabupaten Mentawai Kepulauan, telah berhasil membentuk 39 Pokmas nelayan dan merekrut anggota sebanyak 258 orang. Banyak kegiatan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) telah dilaksanakan, antara lain Budidaya rumput laut, Budidaya ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA), pengolahan rumput laut, pengolahan ikan asin, pembuatan batu bata, pembuatan batako, penyulingan minyak nilam, dan pengadaan beberapa prasarana sosial dan perbaikan sanitasi lingkungan seperti penanganan pembuangan sampah, pembuatan MCK, dan pembuatan lokasi pasar ikan higienis.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai Kepulauan, bahwa hampir seluruh kegiatan COREMAP II telah berjalan baik dan lancar. Dikatakan bahwa :

1. Usaha budidaya rumput laut telah berjalan baik, bahkan sudah berhasil menjual bibit dan mengolahnya menjadi produk industri rumah tangga melalui program kesetaraan gender.
2. Kegiatan Pokmaswas berjalan rutin dan perahu dalam kondisi baik, dilengkapi dengan berbagai peralatan sesuai dengan petunjuk resmi aturan pelayaran yang berlaku. Selain untuk kegiatan pengawasan, perahu Pokmaswas juga difungsikan untuk mengantar kunjungan tamu dari berbagai instansi pemerintah guna memperlancar tugasnya.
3. Program perbaikan sanitasi lingkungan yakni pembuangan sampah dari lokasi permukiman penduduk ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang berlokasi di Dusun Mabola sudah berjalan baik. Alat yang digunakan untuk mengangkut sampah berupa kendaraan BECAK MOTOR (BETOR). Kendaraan ini pada saat berangkat ke TPA mengangkut sampah, dan pulang membawa pasir gunung.

4. Selanjutnya program *Village Grant* berupa pembuatan Pasar Ikan Higienis, MCK, dan bangunan tambat perahu sudah direalisasikan. Demikian juga bangunan pondok informasi sudah berfungsi dengan baik, dan sementara dipinjamkan Pos Jaga AL.
5. Demikian pula peta lokasi kegiatan COREMAP II, Struktur Organisasi LPSTK, jumlah pokmas dan kegiatannya, serta informasi lain terutama menyangkut program kegiatan COREMAP sudah terdokumentasi dengan baik.
6. Areal Daerah Perlindungan Laut (DPL) di kawasan perairan Siburiay telah terbentuk.
7. Radio Komunitas Sikakap menyangkut perluasan jangkauan wilayah siarannya, sudah diagendakan dalam tahun anggaran 2009, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai Kepulauan sedang menjajagi kemungkinan kerja sama dengan pihak Dinas Dekominfo. Harapannya, media elektronik radio ini akan digunakan sebagai cara penyadaran masyarakat (*public awareness*) yang dapat menjangkau di seluruh wilayah kepulauan Mentawai.

Informasi lebih lanjut yakni dari Pondok Informasi (Kantor LPSTK) tahun anggaran 2008 mencatat secara lebih terinci, antara lain program budidaya rumput laut telah dilaksanakan oleh sejumlah 15 Pokmas nelayan lengkap dengan nama pokmasnya masing-masing yakni; Pokmas Bola Baiki, Aileu Sita, Kina Bela, Simatulai, Sanggamuntogad, Pageta Sabau, Restu Selalu, Sukat Kai, Obboi, Saina Musara, Surya Mentawai, Saina Bangkit, Kelompok Mabola, Oftai Obak, dan Parurukat Saina. Beberapa kelompok pengolah rumput laut yakni, Si Umbu, Ogek Simabogad, Anggur Laut, Kampung Kaliang, dan Sei Melati. Beberapa pokmas pengolahan ikan yakni, Semangat Bersama, Tunas Muda dan Masabuk Jaya. Beberapa pokmas budidaya ikan kerapu, antara lain, Binuang Indah, dan KJA Sikakap.

Data tahun 2008 juga mencatat bahwa Pokmas Transportasi "Tuirere" yang ide awalnya untuk penyediaan sarana angkutan umum

terutama untuk anak-anak sekolah. Tetapi karena di daerah Sikakap sudah terlalu banyak sarana angkutan umum yang beroperasi, maka akhirnya digunakan untuk kegiatan pengawasan perairan pantai oleh Pokmaswas dan kadang digunakan untuk membantu transportasi para petugas atau tamu yang berkunjung ke lokasi kegiatan COREMAP.

Data tahun 2007 menunjukkan bahwa dua Pokmas Keramba Jaring Apung, yakni Mukerek Baga dan Pusarakat, kemudian Pokmas pembuatan batu bata, Pokmas Penyulingan minyak nilam diantaranya, Pokmas Tulasalingin, Buluk Simasingin, Gaba Ibarao, dan Kaatsimalalar, dan terakhir Pokmas ayam potong "Maju Bersama".

Data tersebut di atas menunjukkan betapa banyak macam dan ragam program kegiatan COREMAP II di Desa Sikakap yang harus ditangani oleh LPSTK. Lokasi kegiatan tersebut terpencar-pencar cukup jauh jaraknya dari kantor LPSTK. Timbul pertanyaan, bagaimana kegiatan tersebut bias dikelola secara efektif mengingat kondisi LPSTK sendiri dan jajaran instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II diperhadapkan dengan sejumlah keterbatasan, utamanya menyangkut kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini.

Sementara itu introduksi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan proses alih teknologi dari berbagai input teknologi baru, membutuhkan tenaga yang professional, pendampingan yang secara terus menerus berkelanjutan, dan komitmen yang tinggi dari setiap pihak yang terlibat agar masyarakat termotivasi, mau dan mampu, mengadopsi setiap pembaharuan yang diintroduksikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, sambil pada saat yang sama menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

Tulisan di bawah ini bermaksud ingin mengungkap secara lebih dalam bagaimana program kegiatan COREMAP II dikelola, persoalan-persoalan apa yang muncul kemudian, lalu bagaimana persoalan-persoalan tersebut ditangani oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP II. Sumber tulisan ini diangkat berdasarkan hasil

pengamatan langsung di lapangan, serta wawancara mendalam kepada para pihak pengelola kegiatan dan peserta anggota pokmas yang terlibat langsung dalam kegiatan.

Sudah barang tentu, mengingat keterbatasan waktu dan tenaga, tidak semua informasi kegiatan bisa diungkap. Kendatipun demikian, dari hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan program-program kegiatan COREMAP II dimasa yang akan datang. Selanjutnya perlu disadari bahwa kegiatan evaluasi ini tidak mungkin dilakukan dengan cara generalisasi setiap program kegiatan begitu saja, karena masing-masing Pokmas memiliki persoalan yang berbeda, latar belakang anggota yang berbeda, dan lingkungan ekologis yang berbeda pula. Kondisi yang demikian menuntut kepada pihak evaluator untuk menemukanli persoalan masing-masing Pokmas.

Pembentukan, kinerja dan kegiatan LPSTK

Salah satu persoalan serius yang banyak mendapat sorotan masyarakat adalah menyangkut lemahnya kemampuan managerial kepengurusan LPSTK dan kuatnya isu KKN dalam menjalankan program kegiatan COREMAP, serta kurang transparannya dalam administrasi keuangan. Persoalan ini diduga muncul karena lemahnya kinerja jajaran pengurus LPSTK, sehingga mengundang hadirnya pihak luar untuk ikut serta terlibat dalam mengatur kegiatan COREMAP yang sesungguhnya menjadi kewenangan penuh pihak LPSTK. Akibat intervensi ini, manajemen program COREMAP disetir oleh orang luar. Selanjutnya menyangkut kewenangan Petugas Fasilitator Teknis Desa, kewenangannya hanya sebatas mengatur persoalan-persoalan teknis yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program kegiatan COREMAP, mendampingi Pokmas secara rutin dan mencari solusi bila Pokmas dalam menjalankan kegiatannya menghadapi masalah. Kenyataannya Petugas Fasilitator Teknis Desa justru bermain di semua lini, bahkan dengan kehadiran seorang petugas dari Pusat Pembibitan Hatchery Sikakap, tugas LPSTK yang memiliki kewenangan penuh dalam

pengelolaan program COREMAP malah berada di bawah bayang-bayang pengaturan orang yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan mengatur LPSTK dan Pokmas binannya.

Sumber *miss management* selanjutnya adalah menyangkut banyaknya program kegiatan yang lokasinya terpencar-pencar, sehingga sulit dilakukan pengawasan. Kelemahan yang lain karena program COREMAP dijalankan tanpa melalui studi awal yang mendalam yang melibatkan dari berbagai disiplin ilmu, menyangkut soal kelayakan ekologis, ekonomis dan kesiapan sumber daya manusia baik sebagai kelompok sasaran binaan, maupun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Pada tahap implementasi kegiatan, juga tidak ada kegiatan pendampingan secara berkesinambungan yang melibatkan tenaga ahli sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukan.

Kesemuanya itu telah berujung pada kurang optimalnya capaian kegiatan. Bukan hanya itu, implementasi kegiatan juga telah menimbulkan keresahan masyarakat. Terjadinya disharmoni sosial terjadi bukan hanya pada tataran masyarakat atau pokmas binaan LPSTK, tetapi bahkan telah terjadi pada tubuh LPSTK itu sendiri yang dipicu oleh kurang transparansinya dalam pengelolaan administrasi keuangan. Fenomena sosial timbulnya resistensi masyarakat terhadap jajaran pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP juga sudah mulai menampakkan bentuknya. Contoh, pemasangan papan nama Pokmas "Saina Bangkit" yang dipasang secara terbalik, juga mengandung makna simbolik protes sosial terhadap kinerja jajaran LPSTK dan oknum-oknum tertentu dari aparat pemerintah yang tindakannya dinilai telah terbalik sehingga merugikan masyarakat. Sikap keras seorang warga yang meminta ditunjukkan keberhasilan program kegiatan Budidaya rumput laut kepada seorang petugas Fasilitator Teknis Desa juga harus dimaknai sebagai munculnya gejala resistensi masyarakat.

Suasana seperti itu telah mendorong pihak pemerintah desa memandang perlunya perubahan kinerja jajaran kepengurusan LPSTK serta meminta pertanggungjawaban administrasi pengurus LPSTK jika

kegiatan COREMAP masih ingin dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Kegiatan pengawasan

Pokmaswas dibentuk pada tahun 2006, beranggota 5 orang, dan 2 anggota tidak aktif karena bekerja di luar desa. Untuk keperluan kegiatan pengawasan, kelompok ini telah diberi prasarana penunjang yang memadai seperti kapal berukuran 3 GT, dilengkapi dengan mesin penggerak merek Dongfeng 23 PK. Dalam 1 tahun, dana pemeliharaan dianggarkan sebesar 2 juta rupiah, dan dana operasional sebesar 10 juta rupiah. Dana pemeliharaan dan operasional sudah turun 2 kali, yakni tahun 2007 dan tahun 2008. Kerusakan yang sering dialami kapal motor tersebut terutama pada bagian mesin.

Dalam aktivitas sehari-harinya, sarana ini digunakan untuk memancing, mengantar tamu-tamu yang mau berkunjung ke lokasi-lokasi kegiatan COREMAP, dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas di laut. Sekiranya Pokmaswas menemukan tindak pelanggaran dan kejahatan, lembaga ini hanya mencatat dan melapor kepada petugas keamanan laut, bisa ke Kamla AL, dan ke Kepolisian. Pihak DKP sendiri belum memiliki Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kapal patroli. Permasalahan yang dihadapi oleh Pokwasmas ini adalah belum dimilikinya kewenangan yang jelas, menyangkut tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh Pokmaswas serta lemahnya dukungan dari aparat terkait dalam melakukan penegakan hukum. Kurangnya dukungan dari setiap jajaran instansi terkait dalam upaya penegakkan hukum, mengakibatkan pihak Pokmaswas ragu dalam bertindak.

Kasus pengambilan batu karang untuk pembangunan Masjid Alfurqon, menunjukkan betapa lemahnya jajaran aparat penegak hukum terhadap tindak pelanggaran perusakan terumbu karang. Sebelumnya pihak Panitia Masjid sudah meminta izin kepada Kepolisian, tetapi tidak melarangnya, dan juga tidak mengizinkannya, lalu meminta izin ke

Kodim, juga tidak berani mengambil keputusan, kemudian disarankan minta izin ke LPSTK, dengan alasan untuk kepentingan sarana ibadah, maka pihak LPSTK dan Fasilitator Desa hanya bisa tutup mata terhadap tindakan pengambilan batu karang itu.

Praktik perusakan lingkungan yang lain berupa penangkapan ikan dengan menggunakan racun potassium masih berlangsung. Sejumlah nelayan di Mabola menyatakan terus terang bahwa mereka menggunakan racun potassium dalam kegiatan penangkapan ikan. Hanya dengan modal Rp 75.000,-potas seberat 1 kg sudah bisa digunakan dalam waktu 1 minggu. Kepada siapa mereka bisa memperoleh barang tersebut, mereka tutup mulut. Kasus lain yang dialami oleh KJA Pokmas Mariana di Dusun Tubeket, juga mengindikasikan masih adanya aktivitas pemotasan. Diduga kuat bahwa, banyak para pedagang penampung ikan yang menggunakan sistem KJA di sepanjang tepi selat Sikakap dipasok dari nelayan-nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan potassium. Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum.

Dalam kaitannya dengan penentuan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sudah ditetapkan kawasan perairan Siburiay sebagai kawasan perlindungan. Wilayah perairan seluas 50 ha ditetapkan sebagai Zona Inti melalui Surat Keputusan Desa, sebagaimana telah tercantum dalam RPTK Desa. Kendatipun demikian, pengelolaan lebih lanjut menyangkut penataan kawasan, penandaan batas-batas kawasan DPL, aturan-aturan dan sanksi pelanggaran yang terjadi di kawasan perairan ini masih dalam proses persiapan. Dalam kondisi sekarang, konsentrasi aktivitas kegiatan penangkapan nelayan tradisional masih berlangsung di kawasan perairan tersebut, di tempat perairan ini pula program KJA Pokmas Mikeke Baga di Dusun Tubeket dibangun, juga sejumlah rakit-rakit tempat budidaya rumput laut dilakukan. Status lokasi perairan ini juga masih diklaim sebagai milik adat setempat. Pengalaman pengusaha dari Hongkong pada tahun 1990-an dalam melakukan Budidaya rumput laut, pergi meninggalkan lokasi tersebut antara lain karena tidak adanya

kepastian hukum menyangkut status wilayah perairan ini dan ketidakcocokan ekologi laut di daerah tersebut.

Informasi yang disampaikan oleh Petugas Fasilitator Desa juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga sedang merencanakan penempatan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) pada wilayah perairan tersebut. Klaim adat atas wilayah perairan ini terakhir juga muncul dari Aliansi Masyarakat Adat Mentawai. Banyaknya pihak yang terkait dalam pemanfaatan kawasan perairan itu, apabila dalam pengelolaannya tidak melibatkan banyak pihak, maka akan memicu timbulnya konflik dikemudian hari.

Kegiatan UEP

1. Pokmas Budidaya Rumput Laut

Terdapat sejumlah 15 pokmas Budidaya rumput laut yang tersebar di beberapa lokasi perairan Desa Sikakap, antara lain 5 kelompok berlokasi di perairan Dusun Mabola, 5 kelompok di perairan Siburiay, 3 kelompok di perairan Dusun Berkat, dan 2 kelompok di Dusun Seiay Baru. Dari sejumlah pokmas budidaya rumput laut tersebut, 5 pengurus dan anggota pokmas telah diwawancarai secara mendalam, juga telah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi budidaya rumput laut. Sejumlah pokmas dan lokasi Budidaya rumput laut yang lain telah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi Budidaya. Kegiatan peninjauan ini disaksikan langsung oleh sejumlah pengurus LPSTK Desa Sikakap, dan petugas Fasilitator Teknis Desa Sikakap.

Ke lima Pokmas yang ada di Dusun Mabola antara lain: Pokmas Saina Bangkit, Saina Musyara, Pusara Saina, Getaioba, dan Mabola. Seluruh anggota pokmas ini adalah kaum ibu yang bermukim di tepi pantai Mabola. Kata Saina itu sendiri berasal dari bahasa setempat Mentawai yang artinya "Kaum Ibu". Kendatipun tempat tinggal mereka berada di tepi pantai, namun orientasi hidup mereka tidak ke laut, melainkan ke darat. Mereka sendiri mempersepsikan dirinya sebagai Orang Darat. Mata pencaharian utama mereka adalah petani pekebun.

Sebagai petani, terutama kaum ibu tidak pernah ke laut, dan tidak ada pekerjaan yang ditangani dalam hubungannya dengan sumber daya laut. Bagi kaum laki-laki, sesekali memang pernah pergi kelaut mencari ikan dengan cara memancing di tepi-tepi pantai. Pekerjaan mencari ikan ini sifatnya hanya sambilan. Dalam perkembangan terakhir, karena pengaruh dari luar dan kebutuhan akan uang tunai yang semakin meningkat, mereka mulai aktif mencari ikan.

Ke lima kelompok pembudidaya rumput laut ini tinggal mengelompok di suatu permukiman tepi pantai Mabola. Antara satu rumah tangga yang satu dengan yang lain saling berhadap-hadapan dan berdampingan. Plank-plank papan nama pokmas pun saling berdekatan. Diantara ke lima plank-plank papan nama, terdapat satu plank "Saina Bangkit" yang dipasang terbalik persis di depan pintu rumah penduduk. Timbul pertanyaan apa maksudnya papan plank dipasang dengan huruf terbalik, apakah karena kesalahan teknis, tidak bisa membaca (buta huruf), atau copot pengait papannya terkena angin sehingga terpasang dengan posisi huruf terbalik. Setelah didekati, ternyata pengikat papan plank cukup kuat terpaku di batang pohon, dengan paku besar ukuran 7 cm pada tepi bagian atas dan bagian bawah.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pokmas Saina Bangkit, ternyata bukan karena kesalahan teknis papan plank tersebut dipasang terbalik, tetapi ada makna yang tersirat dari tindakan tersebut yakni mengandung arti yang sebaliknya dari nama kelompok Saina Bangkit yang berarti "ibu-ibu yang sedang bangkit" menjadi "ibu-ibu yang sedang terpuruk"

Ke lima kelompok ini, masing-masing kelompok telah menerima bantuan modal usaha dana bergulir sebesar 14 juta rupiah, yang harus dikembalikan dalam tempo 3 tahun. Uang pinjaman modal sebesar itu dipotong dengan biaya administrasi LPSTK sebesar Rp 1.120.000,-, pembuatan proposal Rp 250.000,-, pembuatan papan plank Rp 150.000,-, dan biaya pembelian bibit Rp 7000.000,-. Sisa dana yang diterima pokmas Rp 5.480.000,-. Sisa dana ini sudah dibelikan bahan

material Budidaya rumput laut oleh LPSTK, antara lain waring, bambu, kayu bakau, tali waring, dan tali ris.

Sebagian bibit rumput laut tersebut sudah didatangkan dari Balai Benih Lampung melalui seorang petugas Kepala Balai Benih Hatchery Sikakap pada bulan Februari 2009 yang lalu. Sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak perjanjian yang ditandatangani antara Pokmas dengan LPSTK, masing-masing Pokmas akan mendapat jatah bibit rumput laut sebesar 400 kg. Total untuk pembelian bibit rumput laut untuk 15 pokmas sebesar 6 ton, yang akan disalurkan dalam dua tahap.

Untuk ke lima pokmas di Dusun Mabola, pada tahap pertama turun bulan Februari 2009 sebesar 400 kg. Bibit tersebut berada dalam sejumlah kotak kardus. Setelah ditimbang, ternyata bobotnya hanya 290 kg. Bibit sebesar itu kemudian didistribusikan kepada ke lima kelompok pembudidaya rumput laut, masing-masing menerima kurang dari 60 kg bibit rumput laut. Total jatah untuk 5 kelompok pembudidaya rumput laut di Dusun Mabola sesuai dengan bunyi kontrak perjanjian sebesar 2 ton, tetapi baru disalurkan sebesar 290 kg untuk tahap pertama. Meskipun demikian pihak petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang terlibat dalam kegiatan pengadaan benih rumput laut tersebut mengaku tinggal 1 ton yang belum tersalurkan, dan rencananya akan didistribusikan pada tahap ke dua nanti yakni tanggal 18 Mei 2009. Saat survey ini dilakukan 20 Mei 2009, penyaluran bibit sesuai dengan tanggal yang dijanjikan belum juga turun. Berulang kali relasi petugas DKP di Lampung dihubungi oleh ke lima pokmas di Mabola, jawabannya kekurangan bibit akan diantar setelah dibayar semua.

Mendengar jawaban seperti itu, membuat kaget jajaran pengurus pokmas Budidaya rumput laut di Dusun Mabola, karena sepengetahuan mereka semua bibit rumput laut yang dijanjikan sudah dibayar lunas. Mereka sadar telah terjadi tindak penyimpangan administrasi dalam pengadaan bibit rumput laut yang tidak sesuai dengan bunyi kontrak yang ditandatangani. Mereka kecewa, tetapi tidak tahu kemana harus mengadu. Bukan hanya sampai disitu mereka

dikecewakan, tetapi juga menyangkut cara-cara pembentukan kelompok dan penentuan program kegiatan yang dipaksakan oleh petugas Fasilitator Teknis Desa dan Ketua LPSTK Sikakap.

Pembentukan kelompok diawali dengan kedatangan seorang petugas Fasilitator Desa. Setelah melihat-lihat lokasi perairan pantai Dusun Mabola, kemudian mereka mendatangi warga yang tinggal di sekitar, sambil berbaik hati menawarkan bantuan pinjaman dana bergulir sejumlah uang, dengan syarat kalau warga mau melakukan program kegiatan budidaya rumput laut. Tawaran tersebut membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, tetapi tidak tertarik untuk melakukan usaha budidaya rumput laut, karena memang usaha semacam itu belum pernah mendengar, apa lagi melihatnya secara langsung. Pendek kata program kegiatan budidaya rumput laut yang ditawarkan, memang tidak ada dalam kerangka berpikir dan budaya mereka. Hal yang sangat dikhawatirkan bagi mereka adalah karena sifat bantuan modal tersebut adalah pinjaman yang harus dikembalikan dalam tempo tertentu. Mereka takut kalau usahanya gagal akan terjerat hutang.

Kekhawatiran seperti ini kemudian diredam oleh petugas Fasilitator Teknis Desa bersama Ketua LPSTK melakukan bujuk rayu agar kelompok sasaran yang sedang "digarap" ini mau menerima program yang ditawarkan. Setelah melalui upaya pengkondisian seperti itu, maka segeralah dibentuk ke lima pokmas wanita pembudidaya rumput laut. Harapan ketua LPSTK dan Fasilitator Teknis Desa, bila usaha ini berhasil, maka akan dapat mengisi waktu luang bagi kaum wanita, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga mereka. Secara tidak langsung diharapkan agar suami-suami mereka yang mulai aktif mencari ikan dengan cara-cara eksploitasi yang bersifat destruktif dengan menggunakan racun potassium dapat ditarik ke pengembangan budidaya rumput laut

Tidak lama setelah pembentukan kelompok, maka datanglah semua yang dijanjikan. Sejumlah bibit rumput laut didatangkan oleh petugas Kepala Balai Benih Hatchery Sikakap, sedang sejumlah

peralatan sebagai media budidaya dibelanjakan oleh LPSTK Sikakap. Dengan kata lain, semua bantuan diberikan dalam bentuk barang, nilainya setara dengan uang 14 juta rupiah. Pinjaman ini harus dikembalikan dalam tempo selama 3 tahun.

Langkah persiapan dimulai dengan pemasangan media Budidaya yang dilakukan oleh bapak-bapak dibawah bimbingan dari petugas Fasilitator Teknis Desa. Lokasi pemasangan jaring keramba Budidaya rumput laut tersebut berada kurang lebih 500 m dari tepi pantai Mabola. Dibangun di atas hamparan terumbu karang, tanpa lantai jaring karena permukaan dasar laut yang tidak memungkinkan untuk dipasang lantai jaring. Dalam tahap persiapan ini, tidak ada ibu-ibu satu pun yang terlibat dalam pekerjaan ini, karena tidak bias mendayung dan tidak biasa bekerja di laut.

Tahap selanjutnya adalah penanaman rumput laut dengan cara mengaitkan tali rafia di dalam keramba jaring, antara tepi jaring yang satu ke tepi jaring yang lain, sehingga membentuk garis lurus barisan yang berjarak 0,5 m, dan antara bonggol bibit rumput laut yang satu dengan yang lain berjarak antara 25 cm – 30 cm. Dalam satu lubang jaring antara 15 m x 15 m ditebar bibit rumput laut sebanyak kurang lebih 60 kg. Pekerjaan ini pun dilakukan oleh bapak-bapak dibantu oleh petugas Fasilitator Teknis Desa. Tahap selanjutnya adalah tahap pemeliharaan, yang seharusnya dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatannya berupa membersihkan kotoran yang nempel pada tanaman rumput laut, dan mengontrol tali-tali rumput laut agar tetap kuat mengait dengan tali ris tepi bagan. Serta menghalau hama rumput laut berupa serangan ikan-ikan kecil tamban dan ikan marang (baronang).

Pekerjaan memelihara tanaman rumput laut ini pun dilakukan oleh bapak-bapak. Pendek kata hampir seluruh rangkaian pekerjaan usaha budidaya rumput laut dilakukan oleh bapak-bapak. Demikian juga secara informal keanggotaan dan kepengurusan kelompok beralih ke suami-suami mereka. Bagi bapak-bapak yang terlibat dalam pekerjaan ini, umumnya mereka merasa terpaksa melakukannya karena kasihan melihat beban yang harus dipikul istri-istrinya. Dengan kehadiran

program kegiatan ini, membuat pekerjaan dikebun terbengkelai. Sementara ibu-ibu juga terpaksa harus tinggal di rumah untuk melayani keperluan suaminya yang tengah disibukkan dengan pekerjaan Budidaya rumput laut. Sementara itu hasil yang diharapkan dari pekerjaan Budidaya rumput laut ini tidak kunjung tampak.

Di perairan ini, rumput laut memang dapat tumbuh bagus, tetapi habis dimakan oleh ikan - ikan kecil dan ikan marang. Lama kelamaan tanaman menjadi layu, putus-putus, menguning, dan akhirnya mati. Seluruh bibit rumput laut yang ditebar pada 5 unit keramba jaring ludes habis dimakan ikan. Sementara itu, informasi yang disampaikan oleh Ketua LPSTK dan petugas Fasilitator Desa, menyatakan bahwa kegagalan Budidaya rumput laut di perairan pantai Mabola lebih disebabkan oleh bencana alam berupa gempuran gelombang laut yang kuat pada bulan April yang lalu. Untuk menghindari serbuan hama tersebut, posisi keramba tersebut kini sebagian di pindahkan ke tepi pantai, kurang lebih 300 m dari tepi pantai, mencari dasar laut yang berpasir, menghindari dari dasar terumbu karang yang tidak memungkinkan untuk dibuat jaring. Kendatipun demikian, tempat yang baru ini juga penuh resiko, yakni terkena hempasan gelombang laut yang begitu kuat. Sebagian yang lain sambil menunggu turunnya bibit pada tahap yang ke dua, waring yang ada didaratkan dan dirajut kembali pada bagian-bagian yang berlubang.

Kegagalan usaha budidaya rumput laut ini membuat mereka kecewa, bukan saja merasa terbebani oleh pekerjaan yang tidak jelas hasilnya, tetapi juga hutang yang harus mereka tanggung. Resiko yang sebelumnya sudah mereka bayangkan, kini menjadi kenyataan pahit yang harus mereka tanggung. Rasa kekesalan mereka juga tertuju kepada sejumlah aparat terkait yang terlibat dalam program kegiatan ini, yang dinilai lalai dalam melakukan pembinaan dan pendampingan.

Lalu bagaimana dengan pokmas budidaya rumput laut yang lain ? Di Dusun Berkat Baru tepatnya bersebelahan dengan keramba Hatchery Sikakap yang dilakukan oleh Kelompok "Obboi" awalnya tanaman rumput laut tumbuh bagus, tidak lama kemudian semua tunas

rumpun laut ludes dimakan ikan – ikan kecil, dan secara tiba-tiba mati semua. Informasi yang disampaikan oleh petugas FGasilitator Teknis Desa dan Ketua LPSTK menyebutkan bahwa kematian rumput laut tersebut diduga ada orang lain yang meracuni. Tetapi informasi yang disampaikan oleh warga masyarakat setempat menyebutkan bahwa yang meracuni rumput laut adalah anggota dari pokmas sendiri, tujuannya adalah untuk membasmi ikan-ikan kecil dengan menyemprotkan serbuk potassium ke permukaan laut, tidak diduga bahwa tindakan ini justru berakibat fatal, bukan hanya ikan yang mati, tetapi rumput lautnya ikut mati pula. Pada hal kelompok ini akan dijadikan sebagai percontohan.

Kelompok “Surya Mentawai”, lokasinya di perairan Seiay Baru. Usahanya sudah pernah memanen seberat 150 kg. Bonggol bibit rumput laut tersebut seberat 100 kg telah dijual kepada salah satu pokmas pembudidaya rumput laut di Desa Tuapejat, dan cabang-cabangnya seberat 50 kg yang masih tersisa dibiarkan tidak terurus, menunggu jatah bibit tahap ke dua datang. Tampaknya kelompok ini juga telah patah semangat, dan kecewa dengan program kegiatan ini. Menghabiskan dana tidak sedikit, menguras tenaga, dan hasilnya justru malah membuat masyarakat nelayan terperangkap hutang. Kunjungan di lokasi menemukan bahwa media budidaya rumput laut masih ada, tetapi bibit rumput lautnya sudah tidak dijumpai lagi. Di 5 pokmas yang lain yakni di perairan Siburiay, usaha budidaya rumput laut tampak masih berjalan, tetapi rumput laut tumbuh merana, berwarna hijau pucat, dan tidak menunjukkan warna hijau transparan yang cerah dan bening, sebagaimana layaknya rumput laut yang sehat.

Satu-satunya usaha budidaya rumput laut yang dianggap cukup berhasil adalah milik salah seorang warga Desa Sikakap yang tinggal di perairan pantai sebelah timur P. Bakat Binuang diujung utara selat Sikakap. Usaha ini dilakukan semata-mata didorong oleh rasa keingintahuaannya yang kuat untuk mengetahui sifat tumbuhan rumput laut. Tanaman rumput laut ditanam di permukaan keramba jaring apung tempat budidaya ikan kerapu tradisional. Belajar dari hasil pengamatan budidaya rumput laut milik pokmas, rumput laut banyak yang mati

karena dimakan ikan kecil-kecil. Bertolak dari fenomena ini, ia menemukan ide, ada baiknya dilakukan uji coba budidaya rumput laut di dalam keramba jaring ikan kerapu. Pikirnya di tempat ini, ikan-ikan kecil pemangsa rumput laut tidak berani masuk keramba, dan kalau bisa lolos masuk ke dalam keramba, maka ikan-ikan kecil akan dimakan ikan kerapu sebagai predatornya. Uji coba yang dilakukan ternyata berhasil, kendatipun hanya dilakukan secara kecil-kecilan, berukuran 2,5 m x 3 m. Bibit rumput laut berasal dari pemberian program COREMAP yang tercecer sebanyak 10 bonggol. Saat penelitian dilakukan, umur tanaman rumput laut sudah empat bulan, sudah memenuhi permukaan air keramba. Pak Arifin cukup puas dengan hasil uji cobanya itu. Hal lain yang menentukan keberhasilannya itu adalah, kondisi air yang jernih, kedalaman air yang ideal antara 1,5m – 2m, dasar perairan yang berpasir sehingga memungkinkan penyinaran matahari tembus ke dasar laut, dan memantulkan sinarnya kembali ke permukaan air laut. Juga ketekunan serta ketelitian dalam perawatan membersihkan rumput laut setiap hari dengan cara menggoyang-goyang tali rafia pengikat bonggol rumput laut.

Lokasi inilah yang sering difoto-foto oleh petugas Fasilitator Teknis Desa untuk diambil gambarnya dipajang di Pondok Informasi dan dipromosikan sebagai tanda keberhasilan usaha budidaya rumput laut hasil binaan program kegiatan COREMAP. Gambar yang dipajang di kantor Pondok Informasi memang cukup mengesankan akan keberhasilan penanganan usaha budidaya rumput laut, mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan sampai produk akhir dalam bentuk makanan olahan siap saji, seperti dodol rumput laut, agar-agar rumput laut, dan jus rumput laut. Sejumlah petugas foto bersama di lokasi budidaya rumput laut, onggokkan panen rumput laut, dan aktifitas pengolahan rumput laut bersama ibu-ibu pokmas yang terlibat dalam program kesetaraan gender. Siapapun pengunjung yang datang ke Pondok Informasi akan memperoleh kesan keberhasilan kegiatan budidaya rumput laut, dan akan mengundang decak kagum.

Hal yang sebaliknya justru dirasakan oleh Pak Arifin, tindakan yang terbilang tipu muslihat untuk mengelabui orang lain seperti itu jelas mencerminkan rendahnya kualitas mental para pihak yang terlibat dalam kegiatan COREMAP di Desa Sikakap. Baginya tindakan seperti itu juga telah menyadarkan bahwa selama ini, dirinya telah “dimanfaatkan oleh orang lain” dengan cara mengklaim keberhasilan program COREMAP. Saat kunjungan dilakukan ke lokasi tersebut, dengan nada lantang pemilik keramba budidaya rumput laut tersebut menuding kepada petugas Fasilitator Teknis Desa untuk menunjukkan secara langsung dimana lokasi budidaya rumput laut binaan LPSTK yang selama ini dianggap berhasil.

Dengan rasa malu menanggung beban moral, tidak sepele kata pun petugas Fasilitator Teknis Desa membalas permintaan orang tersebut. Situasi yang demikian, membuat rombongan tidak bias berlama-lama berada di lokasi ini. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju lokasi budidaya rumput laut di perairan Siburiay. Setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh dengan jarak waktu tempuh sekitar 40 menit, sampailah ke lokasi yang dituju. Usaha budidaya rumput laut di lokasi ini baru saja disemai kurang lebih satu minggu yang lalu. Rumput laut mulai tumbuh tunas, tetapi tumbuh merana, tidak memancarkan warna hijau yang cerah dan transparan, sebagaimana layaknya tumbuhan rumput laut yang normal. Di lokasi ini terdapat 5 unit keramba budidaya rumput laut, kondisinya sama. Di lokasi perairan ini pula, lokasi Daerah Perlindungan Laut tumpang tindih dengan usaha budidaya ikan kerapu jaring apung.

Mengamati hasil kegiatan budidaya rumput laut, timbul pertanyaan, bagaimana program ini dirancang ? Dari hasil kajian tahun sebelumnya 2007, sehubungan dengan kegagalan usaha budidaya rumput laut tahun 2006, telah direkomendasikan agar dilakukan kajian awal yang lebih mendalam menyangkut kesesuaian ekologis dan ekonomis, serta perlunya mempersiapkan sumber daya manusia dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, baik kelompok masyarakat sebagai binaannya, maupun para petugas sendiri. Tampaknya

rekomendasi tersebut belum diperhatikan. Tanpa melalui sebuah kajian awal yang mendalam, kegiatan ini hasilnya jelas tidak optimal, kalaulah tidak mau dikatakan gagal. Sebuah program yang dibangun dari mimpi indah yang menjanjikan seperti peluang pasar ekspor dan harga yang menggiurkan, telah membuat orang lupa berkalkulasi dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Apabila hasil rumput laut bisa mencapai 18 ton tiap sekali panen, maka kapal Hongkong siap menampungnya. Untuk mengejar target panen sebesar itu, maka secara masal dibentuk pokmas Budidaya rumput laut. Hasilnya bukan untung yang didapat, tetapi sejumlah anggota pokmas justru malah terlibat hutang.

Sisi lain, temuan kunjungan lapangan tersebut menunjukkan adanya gelagat firasat yang kurang baik. Sejumlah anggota pokmas dan masyarakat yang diwawancarai, menunjukkan sikap kurang simpati dan ragu terhadap kinerja para petugas yang terlibat dalam kegiatan COREMAP di Desa Sikakap. Akumulasi permasalahan yang tidak ditangani secara tuntas, telah melahirkan resistensi terhadap pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kegiatan ini. Situasi yang demikian, jelas tidak kondusif bagi kelangsungan program kegiatan COREMAP di waktu-waktu yang akan datang bila tidak segera dibenahi kinerja dan manajemen program COREMAP II utamanya pembenahan jajaran pengurus LPSTK, agar terhindar dari intervensi dari pihak luar yang diduga bisa mengganggu jalannya program kegiatan COREMAP.

2. Pokmas Pengolahan Rumput Laut

Antara usaha pengembangan Budidaya rumput laut dan pembentukan pokmas pengolah rumput laut merupakan satu paket kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Ide yang mendasari kegiatan ini adalah perelunya penanganan usaha yang utuh dan tuntas bergerak dari hulu ke hilir. Demikianlah informasi yang disampaikan oleh Ketua LPSTK dan petugas Fasilitator Teknis Desa. Dalam wawancara tersebut dinyatakan bahwa pokmas pengolah rumput laut yang ada sekarang ini sudah bisa mengolah hasil rumput laut dari produk Pokmas Pembudidaya rumput laut binaan LPSTK. Kecuali itu, pokmas pengolah

rumput laut juga sudah bisa memasarkan hasil olahannya di warung-warung setempat, sekolahan, bahkan ke sebuah kafe yang sengaja dibangun untuk menyajikan makanan khusus dari bahan rumput laut.

Sebuah ide yang bagus, merupakan kesan pertama yang disampaikan oleh Ketua LPSTK dan petugas Fasilitator Teknis kepada peneliti. Benarkah demikian dalam realitasnya? Uraian di bawah ini merupakan hasil temuan penelitian lapangan dan wawancara langsung dengan Ketua Pokmas di Kampung Kaliang, Dusun Tengah, yang akan dicoba uraikan secara lebih detail. Informasi juga dilengkapi dari suami ketua pokmas, dan Ketua Pokmas Ayam Potong Dusun Tengah, yang saat wawancara dilakukan kebetulan sedang berada di rumah Ketua Pokmas Pengolah Rumput laut, dan satu orang warga yang menyertai Ketua Pokmas Ayam Potong dalam perjalanan menuju rumah informan utama. Sebelumnya informasi menyangkut berbagai masalah yang dihadapi pokmas pengolah rumput laut juga diperoleh dari Ketua Dusun Tengah, Desa Sikakap.

Di seluruh Desa Sikakap terdapat 5 pokmas pengolah rumput laut, 3 pokmas ada di Sikakap Timur yakni Pokmas Si Umbu, Anggur Laut dan Kampung Kaliang, 2 pokmas yang lain berada di Dusun Seay sebelah Timur Selat Sikakap, yakni Pokmas Ogek Simbagat dan Seay Melati. Masing-masing pokmas pengolah rumput laut beranggota 5 orang. Adapun beberapa produk hasil pengolahan rumput laut tersebut antara lain, dodol rumput laut, agar-agar rumput laut, manisan rumput laut, dan jus rumput laut.

Keterampilan mengolah rumput laut diperoleh melalui kegiatan pelatihan selama 3 hari, dengan melibatkan seorang tenaga pelatih dari Lampung yang merupakan relasi atau teman dekat seorang petugas Balai Benih Hatchery Sikakap. Kegiatan pelatihan itu sendiri diselenggarakan pada bulan Maret 2009 di Dusun Seay Baru. Beberapa bahan-bahan material yang dibutuhkan dalam kegiatan pelatihan pengolahan rumput laut tersebut antara lain, formula 1,2, rumput laut kering, resep rasa (pasta), gula pasir, dan pewarna serta citra rasa (essence). Bahan-bahan tersebut dibawa dari Lampung oleh rekan petugas DKP tersebut.

Dikemas dalam bungkus plastik kecil-kecil tanpa label dan tanggal kedaluarsa. Adapun beberapa peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelatihan tersebut antara lain; kual, kompor, sendok, blender, talam, dan mesin pengering blower.

Dari ke 5 pokmas pengolah rumput laut, hanya Pokmas Kampung Kaliang yang berhasil dikunjungi dan diwawancarai, karena kebetulan tempat tinggal pokmas ini tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau dengan menggunakan jalan darat dari tempat peneliti menginap. Kelompok ini diketuai oleh Ibu Yulfitriani, beranggota 5 orang wanita. Bantuan pinjaman dana bergulir yang telah diterima sebesar 40 juta rupiah. Setelah dikurangi biaya modal peralatan, potongan dana pendamping LPSTK sebesar 8% atau sebesar 3,2 juta rupiah, mesin pengering blower 8 juta rupiah, biaya pelatihan tiga kali pertemuan 3 juta rupiah, dan ongkos administrasi pembuatan proposal sebesar Rp 250.000,-. Total bersih uang yang diterima kelompok sebesar Rp 25.400.000,-, tetapi harus menanggung beban hutang sebesar 40 juta rupiah yang harus dilunasi dalam waktu 3 tahun.

Semua bahan-bahan baku untuk keperluan pelatihan pengolahan rumput laut, dibeli oleh 3 pokmas pengolah dodol sebesar 30 kg rumput laut kering dengan harga Rp 20.000,- per kg, ditambah dengan bahan-bahan dan ranuan bumbu yang lain, dibeli secara tunai oleh peserta latihan. Demikian juga 2 kelompok kafe yang lain diminta untuk membayar bahan-bahan pelatihan dalam jumlah yang sama besarnya per kelompok. Dalam realisasinya ke 3 pokmas pengolah dodol rumput laut hanya menerima 10 kg rumput laut kering dan 20 Kg rumput laut basah dengan harga Rp 20.000,- per kg, baik yang kering maupun basah dihargai sama.

Kelompok pengolah rumput laut Kampung Kaliang pernah mempraktikkan sendiri pembuatan dodol rumput laut. Modal untuk bahan baku rumput laut seberat 30 kg atau sebesar Rp 600.000,-. Hasil dodol rumput laut dijual di sekolahan SDN Dusun Tengah 3 biji dodol rumput laut Rp 1000,-. Selain itu, bahan tersebut juga dijual dalam bentuk agar-agar rumput laut, jus rumput laut, dan manisan rumput laut.

Dalam satu kali buat olahan rumput laut tersebut, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 500.000,-. Sisa bahan baku tersebut dan sisa kegiatan pelatihan dari 5 kelompok sekitar 2 bulan yang lalu, telah dikumpulkan untuk membuat dodol rumput laut, agar-agar, manisan, dan jus rumput laut yang disajikan untuk menyambut tamu kunjungan dari ADB tanggal 20 Mei 2009 yang baru saja berlalu.

Kini Pokmas Kampung Kaliang sudah tidak memiliki bahan baku rumput laut yang tersisa, tidak pula bisa membeli bahan baku yang diperlukan, karena bahan baku yang diberikan saat pelatihan tidak berlabel, sehingga mengalami kesulitan dalam mencari bahan baku tersebut. Ibu-ibu peserta pelatihan juga tidak tahu persis apa nama – nama bahan baku yang diperlukan, serta dimana memperolehnya, tidak diberi tahu saat pelatihan.

Selain itu, yang membuat ibu Yulfitriani selaku ketua kelompok, merasa kecewa dengan petugas yang terlibat dalam menangani kegiatan ini, terutama menyangkut masalah besarnya potongan bantuan pinjaman modal, serta tingginya harga bahan peralatan pengolahan rumput laut. Contoh salah satunya adalah harga mesin pengering blower yang dihargai sebesar 8 juta rupiah, pada hal kualitas barangnya buruk sekali. Alat tersebut baru dipakai 2 jam sudah meledak. Bila disuruh membeli langsung dengan harga Rp 500.000,- saja pun sesungguhnya dia gak mau beli, karena alat tersebut tidak terlalu diperlukan, cukup hanya dengan dijemur dibawah terik matahari.

Menurut pengakuan Ibu Yulfitriani, ia terpaksa menerima bantuan tersebut, karena memang ada unsure pemaksaan. Hanya karena rasa segan kepada seorang petugas, ia terpaksa menerima bantuan tersebut, walaupun sesungguhnya membebani ekonomi rumah tangga anggota pokmas dan dirinya. Kelompok yang lain yakni Si Umbu, menghadapi perlakuan yang sama. Berbeda dengan perlakuan Pokmas Anggur Laut, menerima bantuan mesin pengering blower yang berkualitas bagus dan bermerek. Perlu diketahui bahwa Ketua Pokmas ini adalah istri dari petugas DKP Pembenihan Hatchery Sikakap, yang keberadaannya disegani oleh masyarakat dan pokmas yang lain. Nasib

ke 2 Pokmas pengolah rumput laut yang lain yakni yang berada di Deay Baru, tidak diperlakukan seperti pokmas Kaling, diduga mungkin karena Ketua Pokmasnya merangkap juga sebagai pengurus LPSTK. Salah satu ketua pokmas yang mengelola sebuah kafe rumput laut di Dusun Seay Baru, menurut informasi dari masyarakat juga terlibat pada kegiatan pokmas pembudidaya rumput laut yang gagal. Informasi yang diperoleh dari masyarakat juga menyebutkan bahwa diantara jajaran pengurus LPSTK terlibat konflik internal menyangkut masalah administrasi pemotongan dana pinjaman bergulir. Pihak Pokmas merasa keberatan pemotongan diperlakukan sama dengan pokmas yang bukan masuk dalam kepengurusan LPSTK. Persoalan ini sempat diajukan ke kepolisian setempat, dan berakhir dengan pemenuhan tuntutan pihak pokmas tanpa memberi potongan pinjaman dana bergulir yang diterima.

Harus diakui bahwa pemotongan pinjaman dana bergulir dengan dalih biaya administrasi yang beraneka ragam jenisnya, serta pemberian bahan baku pelatihan dan peralatan dengan harga yang terlalu tinggi, tidak transparan, dan terkesan mengada-ada memang sangat dirasakan membebani anggota pokmas penerima pinjaman dana bergulir. Bagi Ibu Yulfitriani selaku ketua pokmas yang ketempatan peralatan dan tempat praktik usaha kelompok juga terbebani secara ekonomis karena terpaksa harus menambah daya listrik dari 450 watt menjadi 900 watt. Alat pengering mesin blower itu sendiri berkapasitas 700 watt, sehingga saat dipakai kegiatan, terpaksa aktivitas yang lain seperti mencuci, kulkas, dan TV, harus dicabut. Beban pemakaian listrik bertambah, biaya abunemen bertambah, demikian juga biaya untuk menyambung instalasinya, terpaksa harus menjadi beban tanggungan keluarganya.

Kegiatan pengolahan rumput laut ini terhenti karena kesulitan mendapatkan bahan baku baik berupa bumbu-bumbu penyedap maupun ketiadaan rumput laut. Pokmas pembudidaya rumput laut gagal mensuplay bahan baku untuk industri rumah tangga pengolahan rumput laut, apa lagi untuk keperluan ekspor sebagaimana yang diharapkan dalam kegiatan ini.

3. Pokmas Pembudidaya Ikan Kerapu Keramba Jaring Apung (KJA)

Program pembudidayaan ikan kerapu dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) terdapat 4 kelompok, yakni Pokmas Mikeka Baga di Tubeket (sekitar 40 menit perjalanan dari Sikakap ke arah Timur menyusuri perairan pantai Sikakap menggunakan perahu motor tempel berkekuatan 40 PK). Kelompok ini beranggota 6 orang, diketuai oleh Mariana Sarnain, yang merangkap sebagai petugas Motifator Desa. Kemudian Kelompok Pusarat beranggota 10 orang, berlokasi di Dusun Tengah Sikakap, diketuai oleh Yohanes yang merangkap sebagai Sekretaris LPSTK. Kelompok Binuang Indah, beranggota 5 orang diketuai oleh Suripno, dan ke 4 kelompok KJA Sikakap beranggota 5 orang diketuai oleh Dian Wendratno.

Masing-masing pokmas sudah menerima bantuan dana bergulir, dengan besar bantuan yang tidak sama besarnya. Kelompok Mikeke Baga misalnya mendapat pinjaman sebesar 55 juta rupiah, dikurangi biaya administrasi pembuatan proposal Rp 300.000,- dan pemotongan dana operasional LPSTK sebesar 8%. Pokmas Pusarat memperoleh pinjaman dana bergulir sebesar 55 juta rupiah, Pokmas Binuang Indah memperoleh pinjaman dana bergulir sebesar 51,133 juta rupiah, dan KJA Sikakap memperoleh pinjaman dana bergulir sebesar 51,133 juta rupiah. Sesuai dengan bunyi kontrak yang ditandatangani antara Pokmas dengan LPSTK, pinjaman tersebut harus dilunasi selama 3 tahun.

Dari ke 4 Pokmas KJA, hanya Pokmas Mikeke Baga yang bisa digali informasinya, dan berhasil dikunjungi ke lokasi budidayanya. Ke tiga pokmas yang lain, sulit ditemui untuk diwawancarai, tanpa alasan yang jelas. Pokmas yang berhasil diwawancarai pun hanya secara kebetulan ketua pokmasnya dapat ditemui di Pondok Informasi karena sedang terlibat kegiatan mempersiapkan kunjungan tamu ADB. Ketua pokmas yang lain sibuk dengan acara persiapan kunjungan tamu tersebut, sehingga dengan dalih ini sulit dihubungi.

Menurut informasi dari masyarakat dan salah seorang tokoh masyarakat setempat ketua Dusun Sikakap Tengah, kelompok KJA yang

diketahui oleh salah seorang pengurus LPSTK sendiri malah sampai saat ini belum dibuat, ada dugaan dananya digunakan untuk keperluan lain, kelompok KJA yang lain seperti KJA Sikakap medianya sudah ada, tetapi tidak ada isinya. Usaha budidaya ikan kerapu dengan sistem KJA ini diberikan kepada sejumlah anggota yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap atau sejumlah nelayan yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang bersifat destruktif seperti para pekerja penambang pasir laut dan batu karang, dan pembius ikan. Harapannya agar dengan terciptanya usaha baru ini kerusakan ekosistem laut dapat dikurangi. Dalam kenyataannya 3 KJA yang ada tidak dapat berjalan, tanpa alasan yang jelas, kendatipun bantuan pinjaman dana bergulir sudah mereka terima. Lebih memprihatinkan lagi justru dialami oleh jajaran pengurus LPSTK yang seharusnya menjadi teladan masyarakat dalam mensukseskan program nasional penyelamatan terumbu karang ini.

Salah satu pokmas KJA yang menjalankan usaha ini adalah Pokmas Mikeke Baga berlokasi di perairan Dusun Tubeket. Pokmas ini telah mendapat pinjaman dana bergulir sebesar 50 juta rupiah pada tahun anggaran 2008. Tidak lama setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut, kelompok ini segera membangun media keramba jaring apung sejumlah 4 lubang dengan ukuran masing-masing lubang 2,5 x 3 m. Nilai total 1 unit KJA lengkap dengan peralatannya seperti drum-drum penampung air, bak penampung pakan, perahu dayung, dan pondok tempat jaga KJA senilai 30 juta rupiah. Sisanya sebesar 20 juta rupiah, digunakan untuk modal pembelian ikan, pembelian pakan, dan upah pekerja buat seorang petugas penunggu KJA.

Dalam praktiknya, pokmas ini hanya melakukan kegiatan penampungan ikan dari hasil tangkapan ikan nelayan setempat, dan bukan usaha budidaya sebagaimana yang dipahami oleh para ahli pembudidaya ikan mulai dari penetasan, pembenihan, penebaran benih sampai pembesaran. Adapun beberapa jenis ikan yang ditampung meliputi ikan kerapu tiger "buleget" warna merah kelas super dengan bobot 5 ons ke atas dalam kondisi hidup Rp 90.000,-, ukuran sedang Rp

35.000,- - Rp 40.000,-. Jenis ikan kerapu tikus bintik hitam per ekor kelas super Rp 75.000,-, ukuran sedang Rp 25.000,- - Rp 30.000,-. Ikan-ikan tersebut dibeli dari nelayan setempat dalam keadaan masih hidup. Namun selang beberapa hari kemudian ikan-ikan tersebut banyak yang jatuh sakit dan cacat, matanya putih, buta, siripnya putih, sisiknya mengelupas, ekornya putus, dan akhirnya banyak yang mati. Ikan mati yang masih dalam kondisi fisiknya yang utuh, hanya laku dijual kepada pedagang setempat atau konsumen langsung per kg Rp 8000,- - Rp 9000,-. Untuk dikonsumsi langsung atau dibuat ikan asin. Dalam tempo yang relative singkat kurang lebih 2 bulan terhitung bulan September 2008 saat usaha budidaya dilakukan, semua dana sebesar 20 juta rupiah sudah ludes terkuras untuk membiayai usaha ini. Pokmas ini kini sudah tidak jalan lagi, dan media yang ada hanya diisi dengan beberapa ekor ikan yang tidak lagi dikelola secara rutin, tetapi hanya sambil lalu saja agar media tetap terjaga dan tidak nganggur.

Saat Ibu Mariana ditanya kenapa usaha ini begitu cepat mengalami kebangkrutan ? dan apa yang mendorong kelompok ini tertarik untuk melakukan usaha ini ? Dengan kepolosan dan keluguannya ia menjawab teropsesi oleh usaha-usaha serupa yang banyak dilakukan oleh para pedagang penampung ikan di Desa Sikakap. Menurutnya usaha ini pasti menjanjikan keuntungan yang besar, sebab usaha mereka cukup berkembang dan sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dari hasil usaha ini, kehidupan ekonomi rumah tangga mereka cukup mapan, bahkan sebagian besar dari mereka tergolong sebagai orang-orang kaya di Desa Sikakap. Rumah tinggalnya besar, motornya banyak, perahu dan anak buahnya bertambah semakin banyak saja. Bahkan akhir-akhir ini jumlah perahu pompong yang berbobot 5 GT ke atas yang dimiliki oleh pedagang-pedagang pengumpul ini tampak semakin banyak saja jumlahnya dan berjubel berlabuh di depan pelabuhan kantor Desa Sikakap, berselang seling dengan kapal porsin berbobot 50 GT ke atas yang jumlahnya mencapai puluhan.

Pengalaman berbudidaya itu membuat Ibu Mariana sadar bahwa pasti ada perlakuan tertentu serta persyaratan tertentu ikan yang bisa dibeli dari nelayan sehingga mereka masih tetap eksis dengan usaha ini, dan hal itulah yang selama ini tidak dikuasainya sehingga usahanya bangkrut. Ia sadar bahwa ada kemungkinan besar bahwa ikan-ikan yang dibeli berasal dari hasil pemotasan yang setelah ditawarkan kepada penampung lain tidak mau membeli baru dibawa ke keramba Pokmas Mikeke Baga. Bila dugaan ini benar, maka usaha budidaya KJA yang sebetulnya hanya melakukan kegiatan penampungan dari kegiatan penangkapan nelayan setempat, tampaknya justru menjadi kontra produktif dengan tujuan dilaksanakannya program kegiatan COREMAP II yang salah satu tujuannya adalah menyelamatkan ekosistem terumbu karang, yang terjadi justru sebaliknya malah memfasilitasi kegiatan penangkapan ikan yang diduga berasal dari penangkapan ikan dengan menggunakan racun potasium.

Informasi yang disampaikan oleh Petugas Fasilitator Teknis Desa Menyatakan bahwa tujuan pengembangan usaha budidaya ikan kerapu dengan system KJA adalah untuk menampung benih ikan kerapu yang dihasilkan oleh Pusat Pembenuhan Balai Benih Hatcheru Sikakap. Untuk tujuan yang sama, pemerintah daerah melalui dana APBDtelah mempersiapkan sejumlah 18 unit KJA yang terletak di sepanjang tepi pantai Desa Sikakap. Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2008. Upaya ini juga telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dengan mendatangkan seorang tenaga ahli pembudidayaan ikan kerapu dari Balai Benih Lampung milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Selama tiga bulan tenaga ahli tersebut didatangkan untuk menetaskan indukan ikan kerapu di Hatchery Sikakap. Indukan ikan sudah berhasil ditelorkan, tetapi kolam penebaran benih, alat gelembung udara (aerator), pakan alam, dan peralatan budidaya di Hatchery yang ada tidak memadai, sehingga tidak memungkinkan kegiatan pembenuhan dilakukan di Hatchery yang ada. Setelah beberapa hari telur ikan berada

di suatu tempat, akhirnya telur ikan berubah warna menjadi putih, dan mulai membusuk. Dalam kondisi demikian telur ikan dibuang di perairan Selat Sikakap. Kepada masyarakat Sikakap, diberitakan oleh seorang petugas Kepala Balai Benih Hatchery Sikakap bahwa pada suatu saat nanti perairan Selat Sikakap akan banyak tersedia stok ikan kerapu yang jumlahnya mencapai jutaan ekor.

Menurut informasi dari salah seorang pekerja yang pernah terlibat dalam pekerjaan pengadaan 18 unit KJA, telur tersebut sudah dalam keadaan membusuk, menjadi sarang jentik-jentik nyamuk, bukannya bibit ikan kerapu dari telur yang menetas. Bagaimana kondisi yang demikian diberitakan sebagai keberhasilan upaya pembenihan bibit ikan kerapu guna menambah stok ikan kerapu di perairan Selat Sikakap? Tindakan ini jelas merupakan pemutar balikan fakta yang sebenarnya terjadi, dan sudah diketahui oleh masyarakat luas.

Menghadapi keadaan seperti itu, seorang tenaga ahli pembudidaya ikan kerapu tersebut, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-harinya yang masih tersisa dihabiskan untuk duduk-duduk di warung makan, dan mondar-mandir di seputar Desa Sikakap. Semula dengan kedatangan seorang tenaga ahli tersebut, masyarakat cukup menaruh harapan besar akan sukses budidaya ikan kerapu. Kepada masyarakat seorang tenaga ahli tersebut bersedia menampung ikan kerapu seberapa pun jumlahnya, gak usah besok ataupun lusa, sekarang kalau ada barang tinggal angkat telpon akan segera diambil. Harapan ini disebarluaskan melalui rekaman siaran langsung Radio Komunitas Sikakap yang dikelola oleh salah seorang warga setempat, bahkan seorang pemilik radio ini pun sempat tergiur dengan mimpi yang ditebar melalui siaran radio tersebut. Terdorong oleh harapannya itu, seorang pemilik radio tersebut mulai mendekati seorang petugas ahli pembudidaya ikan kerapu tersebut untuk mendapat informasi yang lebih mendalam lagi soal budidaya ikan kerapu dengan system keramba jaring apung.

Diluar dugaan, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikatakan bahwa tidak ada usaha apapun yang bisa

berhasil, hanya semata-mata mengharapkan bantuan, apa lagi usaha budidaya ikan kerapu, tidak mudah. Disarankan kalau memang punya keinginan kuat, lebih baik melakukan usaha sendiri, dipelajari dari hal-hal yang paling kecil seperti mengenal kelakuan ikan, pola makan ikan, lingkungan hidup ikan kerapu, mengenal jenis-jenis penyakit, obat-obatan yang digunakan, ketersediaan pakan buatan dan pakan alami, serta cara-cara membiasakan berkomunikasi dengan ikan. Langkah awal ini butuh kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Tidak sulit bagi yang memiliki hobi dengan pekerjaan ini, tetapi sangat sulit dan terasa berat bagi yang semata-mata mengharapkan keuntungan material sesaat dari usaha ini. Mendengar penjelasan seperti ini, kini tidak terbayangkan sekecil apa pun untuk melakukan usaha budidaya ikan kerapu, serta merta musnah keinginan tersebut untuk melakukan usaha ini setelah mendengarkan langsung penjelasan dari seorang tenaga ahli tersebut.

Kondisi yang sebenarnya terjadi pada Hatchery Sikakap lambat laun menyebar di tengah masyarakat. Harapan yang digantungkan terlalu tinggi berubah menjadi kekecewaan yang terlalu dalam terhadap kinerja jajaran terkait yang terlibat dalam kegiatan pembenihan Hatchery Sikakap. Di tengah kekecewaan masyarakat yang meluas beredar isu bahwa akan ada sejumlah dana bantuan dari Provinsi sebesar 1 milyar yang bisa digunakan untuk menunjang operasionalisasi dari kegiatan sejumlah 18 unit KJA, dengan syarat pengajuannya mendapat persetujuan bupati. Orang yang ditunjuk masyarakat untuk menghadap Bupati adalah Ketua UPTD dan tokoh masyarakat setempat yang kebetulan berbeda partai politiknya dengan yang dianut Bupati, akibatnya Bupati tidak mau menandatangani surat permohonan bantuan tersebut.

Terlepas isu yang beredar benar atau salah, tetapi dengan melihat realitas yang terjadi di lapangan, siapapun akan berfikir panjang untuk menyetujui permohonan tersebut. Rendahnya kualitas moral aparat pelaksana yang terlibat dalam kegiatan ini, serta tidak dikuasainya teknik budidaya yang baik oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran maupun para petugas sendiri membuat Bupati ragu terhadap prospek

usaha ini. Sisi lain dari kasus ini, juga telah mengindikasikan adanya permainan politik menyusup dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Demikian juga program kegiatan COREMAP pun tidak luput dari penyusupan partai politik. Hal ini ditengarai adanya tokoh dari partai tertentu yang menyanggupi melanjutkan usaha pembuatan batu bata merah dengan menyediakan sejumlah dana dengan syarat hasilnya harus dijual kepada tokoh tersebut. Unsur kepentingan yang bermain dalam partai politik pada ujungnya diduga bisa berakibat memecah belah anggota pokmas binaan LPSTK.

Ide membangun pusat pengadaan benih melalui Hatchery Sikakap, guna mengembangkan Budidaya ikan kerapu dan meningkatkan potensi perairan setempat, adalah merupakan ide cemerlang yang patut dihargai. Hanya sangat disesalkan, program ini diperhadapkan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sehingga usaha ini kandas di tengah jalan.

4. Pokmas Pengolahan Ikan

Kelompok pengolahan ikan asin berada di Dusun Masabuk Jaya bernama Pokmas Tunas Muda, dipimpin oleh Ibu Taufik Mursinah, beranggota 6 orang. Kelompok pengolahan ikan dibentuk dalam kerangka mewadai kegiatan pengolahan ikan kering. Merasa tertarik kepada tawaran yang disampaikan petugas Fasilitator Desa, maka Ibu Mursinah segera mengumpulkan ibu-ibu tetangga sekitarnya yang bekerja sebagai pedagang pengumpul ikan di Pasar Sikakap. Pasar tradisional ini yang kemudian direhap menjadi bangunan pasar ikan higienis melalui program COREMAP 2008 yang buka khusus pada hari Jumat. Atas persetujuan seluruh anggota kelompok pokmas ini dibentuk dengan disaksikan oleh petugas Fasilitator Teknis Desa dan jajaran pengurus LPSTK, tanpa sepengetahuan Kepala Desa maupun jajaran anggota Dewan Perwakilan Desa (DPD),

Kelompok ini memperoleh bantuan pinjaman dana bergulir sebesar 20 juta rupiah. Pinjaman sebesar itu dipotong 8% untuk dana pendamping LPSTK, biaya pembuatan proposal Rp 300.000,-, biaya

pembuatan papan nama plank Rp 150.000,-. Total bersih yang diterima Rp 18.250.000,- Usaha kelompok ini sudah dilakukan sejak bulan April 2009 yang lalu dengan membuat pengeringan ikan asin sebesar 100 kg. Ikan basah jenis ikan kembung (geriga/gembolo), dengan harga per kg Rp 6000,-.Setelah diolah menjadi ikan asin susut menjadi 50 kg Untuk mengolah ikan asin sebanyak itu dibutuhkan garam sebanyak 20 kg a Rp 2000,-. Harga eceran ikan asin di pasar setempat Rp 30.000,- total penjualan Rp 1500.000,-. Harga di pasar padang per kg Rp 20.000,-, atau setara dengan nilai jual sebesar Rp 1.000.000,-. Dipotong ongkos transport kapal 50 kg Rp 100.000,-. Bila dijual di pasar Padang ada keuntungan sekitar Rp 200.000,-. Hasil olahan ikan asin ini lebih suka dijual di pasar Padang, karena langsung ada penampungnya meskipun untungnya sedikit. Dibanding dengan harga setempat memang jauh lebih tinggi, tetapi pembelinya jarang, kecuali ada pegawai-pegawai yang mau pulang ke Padang atau kunjungan tamu dari luar buat oleh-oleh.

Saat dikunjungi hasil olahan ikan masih ditumpuk dikeranjang dan belum dibawa ke Padang karena belum mencapai berat 100 kg, sehingga tanggung kalau mau dijual ke Padang. Sejak kehadiran kapal purseine sejak 2005 yang lalu, ikan geriga sebagai bahan baku pembuatan ikan asin semakin sulit didapat, sehingga aktivitas pembuatan ikan asin sekarang ini terhenti karena menghadapi kelangkaan bahan baku. Dahulu sebelum kedatangan kapal purse seine, mencari ikan gembolo, ikan lemuru, ikan tembang, ikan lanjan, ekor kuning, belanak, dan ikan putih, mudah didapat dalam jumlah yang banyak. Masing-masing pedagang bisa mengumpulkan sebanyak 0,5 ton dalam sehari. Kini untuk mendapatkan ikan sebesar 50 kg per hari susah sekali. Di perairan ini sudah beroperasi kapal pursine sebanyak 25 buah pukat cincin berbobot 50 GT ke atas. Kapal-kapal tersebut adalah milik nelayan Sibolga, Padang dan Bengkulu. Hal yang sama dihadapi oleh Pokmas Masabuk Jaya, memiliki usaha yang sama, beranggotakan 7 orang. Kelompok ini dipimpin oleh Ibu Elias Gosmita.

Kendatipun ke dua kelompok ini dihadapkan pada persoalan yang sama yakni kelangkaan bahan baku, ke dua kelompok ini sudah 2 kali membayar angsuran. Dalam satu kali mengangsur masing-masing sebesar Rp 1000.000,-. Pinjaman ini terhitung selama 2 tahun 4 bulan. Ke dua pimpinan Pokmas ini tinggal saling bersebelahan di Dusun Masabuk. Komitmen yang tinggi untuk membayar angsuran ditunjukkan oleh ke dua kelompok ini. Mereka sadar bahwa apa pun resiko usaha yang dihadapi, hutang tetap harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Latar belakang anggota ke dua pokmas ini umumnya adalah ibu-ibu pedagang ikan. Profesinya sebagai pedagang menuntut akan kejujuran. Mereka sadar bila kejujuran tidak ada, maka kepercayaan tidak akan dimiliki, maka dengan cepat atau lambat usahanya akan bangkrut. Tampaknya pandangan ini masih dipegang kuat, setidaknya oleh pimpinan ke dua kelompok ini, sehingga walau dalam keadaan bagaimana pun, hutang tetap harus dibayar.

5. Pokmas Pengolahan Minyak Nilam

Terdapat 4 Pokmas penyulingan minyak nilam, 2 di Dusun Seay Baru dibentuk tahun 2007 bernama Pokmas Tulasimasingin dan Buluksimasingin. Masing-masing kelompok beranggota 10 orang. Bantuan pinjaman dana bergulir masing-masing kelompok sebesar 5 juta rupiah. Usaha ini sudah berjalan, masing-masing pokmas sudah memiliki alat suling tradisional yang diperoleh dari swadaya murni masyarakat sendiri. Di Dusun Berkat dekat Seay Baru sudah terdapat seorang pedagang pengumpul semua produk hasil bumi, merangkap sebagai seorang guru, sekaligus sebagai seorang penyiar Radio Komunitas Sikakap. Harga rata-rata per Kg minyak nilam Rp 290.000, pada tahun 2007 yang lalu harganya bisa mencapai pada kisaran Rp 850.000,- - Rp 1.000.000,- per kg-nya. Sudah berlangsung sekitar 5 bulan ini harga tetap bertengger pada kisaran Rp 250.000,- - Rp 290.000,- per kg-nya. Jatuhnya harga minyak nilam membuat petani kurang bergairah menjalankan usaha ini, sebab merasa tidak sebanding dengan curahan tenaga kerja yang diburuhkan.

Sebagai gambaran dapat diketahui, misalnya untuk mendapatkan minyak nilam sebesar 1 kg, dibutuhkan bahan baku sebanyak 10 karung plastik, masing-masing berbobot 25 kg. Waktu penyulingan sehari penuh sekitar 12 jam, dengan menghabiskan kayu baker sebanyak 3 m kubik.

Pada tahun anggaran 2008 dibentuk lagi 2 pokmas penyulingan minyak nilam di Dusun Sei Bai Bai, yakni Pokmas Gabu Ibara dipimpin oleh Jhon Irpepanus, dan Pokmas Koatsimalebeh diketuai oleh Paner Sidatan sekaligus merangkap sebagai Kepala Dusun Sei Bai Bai. Ke dua kelompok ini masing-masing sudah menerima pinjaman dana bergulir sebesar 5 juta rupiah yang harus dikembalikan dalam tempo 3 tahun. Di Dusun Sei Bai Bai memang memiliki potensi yang cukup melimpah tanaman nilam. Terdapat hamparan tanaman nilam yang luasnya mencapai puluhan hektar. Sifat tanaman ini mudah berkembang, sekalipun tanpa perlakuan dan perawatan khusus dari petani. Mampu tumbuh pada lahan yang marginal sekalipun.

Untuk mengembangkan usaha ini dan mendekatkan lokasi tanaman nilam, secara pribadi Bupati Kepulauan Mentawai telah merintis pembukaan jalan sepanjang 5 km dengan menggunakan doser. Di kanan kiri jalan, diberikan kapling selebar 500 m dan memanjang ke belakang. Kapling-kapling ini diberikan kepada setiap pemuda dengan harapan menghapus sifat malas dari para pemuda.

Upaya lain untuk mengembangkan usaha penyulingan minyak nilam, di Dusun Sei Bai Bai juga sudah dibangun sebuah tempat penyulingan minyak nilam secara moderen. Tempat ini dibangun secara permanent, menempati bangunan pondok seluas 10 m x 15 m. Tempat ini selaligus menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat sekitar. Untuk mendapatkan keterampilan dalam mengolah minyak nilam sekaligus peningkatan kualitas, juga telah didatangkan seorang tenaga teknis dari PT. KELMA DI BEKASI Kalimantan, Cikunir, yang bertindak sebagai tenaga pelatih.

Kendatipun demikian, usaha penyulingan minyak nilam masih tetap kurang bergairah, karena harga minyak nilam jatuh secara drastic. Kurang bergairahnya petani minyak nilam ditunjukkan oleh sejumlah peserta pelatihan minyak nilam yang dikirim dari desa lain. Mereka hanya duduk-duduk tidak mau bekerja, sehingga seorang pekerja teknisi sebagai pelatihnya terpaksa bekerja sendirian.

Untuk menyuling sebanyak 10 karung, di tempat ini akan dipotong sebesar 2 ons tiap 1 kg minyak nilam. Semua kayu baker ditanggung oleh pemilik daun nilam. Potongan 2 ons akan digunakan untuk membiayai operasionalisasi kegiatan penyulingan nilam yang paling sedikit melibatkan 2 orang tenaga kerja yang harus bekerja sehari semalam penuh. Dalam waktu ini, paling banyak hanya bisa menghasilkan 3 kg minyak nilam.

Sebelumnya, hampir seluruh penduduk Sei Bai Bai terlibat dalam kegiatan penyulingan minyak nilam. Di Dusun ini juga ada seorang pedagang pengumpul minyak nilam. Sejumlah minyak nilam kini masih disimpan, menunggu harga naik baru akan dijual. Minyak nilam merupakan produk barang ekspor yang dikirim ke India dan Timur Tengah sebagai bahan baku minyak wangi, kosmetik dan obat-obatan. Hingga saat ini, keempat pokmas penyuling minyak nilam belum ada satu pun yang mengangsur pinjamannya.

6. Pokmas Pembuatan Batu Bata Merah

Pokmas pembuatan batu bata merah, beranggotakan 5 orang anggota. Lokasi menempati pekarangan tempat tinggal Ketua Pokmas di Dusun Masabuk, berbatasan dengan Dusun Sei Bai Bai. Ide pembuatan batu bata merah ini dimaksudkan untuk menemukan bahan pengganti material bangunan batu karang, atau batako cetak yang terbuat dari bahan pasir laut dan semen. Kendatipun usaha ini sesungguhnya tidak membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi, namun tetap kelompok ini tidak bisa membuatnya. Lebih menyedihkan lagi pekerjaan ini hanya diupahkan, tanpa ada keinginan dari anggota pokmas untuk dapat membuatnya sendiri. Rendahnya motivasi kerja, merupakan persoalan

dasar yang dihadapi kelompok ini. Semua peralatan yang ada dibiarkan tanpa perawatan, sehingga mesin molen pembuat bubur adonan bata dalam kondisi berkarat semua. Batu bata yang dicetak berukuran tebal 5 cm, lebar 12 cm, dan panjang 20 cm. Melihat tanah yang diaduk dan dilumatkan, terbuat dari lapisan tanah top soil yang lembut dan gembur bercampur dengan batu kerikil dan tanah padas, sehingga hasilnya berkualitas rendah. Batu bata banyak yang tidak utuh, retak-retak karena adonannya bercampur dengan batu kerikil dan tanah cadas. Seharusnya yang dibuat hanya pada lapisan tanah permukaan yang gembur dan sudah dilumatkan, dan dipastikan dulu tidak ada campuran kerikil, sehingga hasilnya utuh dan tidak akan pecah.

Batu bata yang sudah dicetak diletakkan secara berhamburan, sehingga menyulitkan penghitungannya. Batu bata ini terhampar di lantai tanah dan tidak terlindung dari aliran dan hampasan air hujan. Lantai pondok yang lembab dan basah, membuat batu bata dalam keadaan basah dan lembab. Bila dijemur dibawah terik sinar matahari langsung, pasti akan pecah karena adonan batu bata merah yang bercampur dengan kerikil dan tanah cadas.

Menurut taksiran ketua pokmas, jumlah batu bata yang siap dibakar sekitar 20.000 biji – 23.000 biji. Saat dilakukan pengecekan dan penghitungan ulang, ternyata hanya ada sekitar 6000 biji – 7000 biji. Sebagian besar batu bata tersebut masih berada di pondok, sedang sebagian yang lain sudah siap ditata untuk dibakar, tetapi dibiarkan terbengkelai karena tenaga yang dipercaya untuk membakarnya juga masih menghadapi kesulitan dalam menyusun tungku pembakaran.

Kelompok ini telah memperoleh kucuran dana sebesar 46 juta rupiah pada tahun anggaran 2008. Sejumlah 20 juta rupiah telah dibelikan mesin molen penggiling adonan bata, 4,4 juta rupiah dibelikan mesin Gen Set, bikin cetakan mal bata 3 juta rupiah, ongkos buat pondok 7 juta rupiah, dana petugas pendamping 2 orang 10 juta rupiah, kayu baker untuk membakar bata sebesar 4 juta rupiah, upah untuk lahan pembuatan bata merah Rp 50 per biji untuk 20.000 biji bata, dan

masih ditambah upah tenaga pembakar dihitung Rp 400 per biji untuk 20.000 biji sekitar Rp 8.000.000,-

Kini pembuatan batu bata merah terhenti karena masih ada kekurangan dana sekitar 15 juta rupiah. Sementara realitas kondisi di lapangan jumlah dan kualitas hasil cetakan batu bata tersebut tidak sesuai dengan taksiran semula. Kekurangan dana tersebut akan ditutup dari patungan 5 anggota pokmas, masing-masing akan memberikan sumbangan sebesar 3 juta rupiah. Bila hasil pembakaran batu bata merah ini berjalan optimal, harga batu bata merah per biji di tempat Rp 1000,-, dan harga sampai ditempat pembeli Rp 1500,-. Batu tersebut sudah ada yang memesan bila berhasil dibakar dan bagus kualitasnya.

Mengamati kondios di lapangan, tampak bahwa usaha ini tidak ditangani secara serius, motivasi kerja kelompok rendah, seluruh rangkaian pekerjaan diupahkan, sehingga tidak tumbuh partisipasi aktif dalam menjalankan usaha ini. Sementara itu ke dua tenaga kerja upahan yang sudah dianggap cukup ahli dan berpengalaman dalam membuat batu bata merah di Tuapejat, ternyata tidak memiliki kemampuan. Menurut pengamatan dari seorang teknisi dari PT. Kelma dari Bekasi yang kebetulan sedang bertugas memberikan pelatihan penyulingan di Dusun Sei Bai Bai, mengatakan bahwa pekerja tersebut tidak professional, seperti yang pernah juga dilihat di Desa Tuapejat. Cetakan bata lengket karena terbuat dari lempengan plat besi yang mudah berkarat, sehingga adonan bata lengket. Seharusnya cetakan lempengan bata tersebut dibuat dari plat kuningan, sehingga licin dan adonan bata tidak lengket. Menurutnya adonan bata yang dibuat cetakan satu-satu, sangat tidak efisien, karena akan memakan waktu dan tenaga. Sarannya dari pada bekerja seperti itu, dikirim saja orang ke Cikarang untuk melihat dan mempraktikkan langsung teknik pembuatan batu bata merah. Setelah keterampilan itu diperoleh, baru orang tersebut dimodali, kalau perlu didampingi oleh tenaga ahli yang didatangkan dari tempat magangnya, sampai pada suatu saat berhasil mencetak dan membakar batu bata merah, baru kemudian ditinggalkan.

7. Pokmas Ternak Ayam Potong

Pokmas peternak ayam potong dilakukan di Desa Sikakap Tengah. Kelompok ini bernama “Maju Bersama”, beranggota 5 orang, dipimpin oleh Aliasis. Lokasi usahanya menempati pekarangan rumah Budi Bakti, salah seorang pengurus LPSTK bidang pengembangan pokmas dan kelembagaan. Total bersih dana bergulir yang diterima sebesar 13,5 juta rupiah, setelah dikurangi biaya pembuatan proposal sebesar Rp 250.000,- dan pemotongan untuk dana pendamping LPSTK sebesar 8% senilai Rp 1.120.000,-, seharusnya hanya terima Rp 12.630.000,-. Dalam hal ini Pokmas mendapat dispensasi karena ada anggota yang berasal dari pengurus LPSTK.

Pinjaman dana bergulir terhitung 14 juta rupiah harus kembali dalam waktu 2 tahun, dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp 600.000,-. Dana pinjaman tersebut telah dibelanjakan untuk pembelian bahan material pembuatan kandang, pasang instalasi listrik 4 juta rupiah, dibelikan anak ayam 2 boks isi 200 ekor. Dari jumlah bibit ayam sebesar itu, hanya bisa dipanen sebanyak 150 ekor, yang berarti memiliki tingkat kematian sebesar 25%. Harga jual per ekor berumur 40 hari Rp 25.000,-. Total nilai jual sebesar Rp 3.750.000,-.

Menurut pengakuan Budhi Bakti selaku pengelola usaha ini mengatakan bahwa usaha ini tidak memiliki keuntungan dan prospek usaha yang cerah, sebab harga pakan 511 mahal. Listrik mahal, dan resiko kematian tinggi. Penyakit yang sering diderita adalah penyakit “tetelo”, tanda-tandanya ayam ngorok, dan tidak lama kemudian ayam mati. Selain itu, usaha ini juga menghadapi saingan “ayam tiren”, ayam mati yang sudah diawetkan dengan es. Apakah ayam-ayam yang dijajakan keliling rumah tersebut memang mati karena sakit, atau dipotong, persisnya tidak ada yang mengetahui. Ayam-ayam ini disetor ke warung-warung makan Padang, yang banyak bertebaran di Desa Sikakap. Hingga saat ini, pokmas ini juga belum pernah mengangsur pinjaman, alasannya usahanya merugi.

Usaha ini berjalan tanpa ada pendampingan, petugas penyuluh peternakan pun tidak ada, penguasaan teknik beternak ayam juga tidak dimiliki, kendatipun demikian usaha ini tetap dilakukan. Harapannya bila usaha ini berhasil, akan dapat memberikan keuntungan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Pemasaran hasil peternakan ini tidak sulit, karena banyak warung-warung makan yang siap menampung dari hasil peternakan ini. Persoalan yang paling berat dirasakan adalah menghadapi persaingan harga dengan ayam tiren atau ayam fiber, harga per ekor hanya Rp 20.000,-.

8. Pokmas Transportasi Laut

Pokmas transportasi laut bernama "Turkere", berasal dari bahasa Mentawai yang artinya berangkat bersama. Kelompok ini beranggota 5 orang, diketuai oleh Mangantar. Sesuai dengan usulan yang disampaikan dalam proposal, kelompok ini bergerak dalam bidang transportasi laut. Bantuan dana bergulir sebesar 33,33 juta rupiah telah dibelikan mesin robin seharga 3,5 per orang. Perahu robin atau yang lazim dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama "*long tale*" tersebut, sudah dibagikan kepada masyarakat.

Dalam kenyataannya perahu tersebut tidak dimanfaatkan untuk keperluan sesuai dengan pengajuan dalam proposal, tetapi digunakan untuk mencari ikan dengan memancing. Kelompok yang menjadi sasaran program ini adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penambangan pasir laut dan terumbu karang. Harapannya setelah diberi bantuan ini, mereka bisa mengalihkan usahanya. Saat penelitian ini dilakukan, baru saja terjadi kasus pencurian mesin di Dusun Berkat Baru. Pihak kurban telah melaporkan kejadian pencurian ke LPSTK dan minta untuk segera mendapat penggantian yang baru. Tanggapan pihak LPSTK meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dalam internal kelompok. Diduga bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian pemiliknya, meninggalkan perahu di pinggir selat tanpa mengambil mesin motornya.

Bagaimana sebenarnya aktivitas keseharian mereka setelah diberi bantuan ? Pada saat penelitian ini dilakukan mereka sulit dihubungi, sedang melaut bila siang hari, begitu pun pada malam hari terkendala oleh keterbatasan sarana transportasi. Kendatipun Kapal Pokmaswas ada, kenyataannya pihak LPSTK merasa enggan untuk meminjamkan perahu tersebut, guna memperlancar tugas kedinasan ini. Informasi yang disampaikan oleh Petugas Fasilitator Desa dan Ketua LPSTK tidak cukup untuk menggali informasi menyangkut kegiatan Pokmas ini, karena pokmas ini tidak pernah memberi laporan kegiatan kepada LPSTK, begitu pula sebaliknya pihak LPSTK dan Petugas Fasilitator Desa tidak pernah pula memonitor langsung kegiatan Pokmas ini.

Kegiatan Fisik

1. Perbaikan Sanitasi Lingkungan

Suatu pemandangan yang lazim ditemukan pada masyarakat nelayan Sikakap adalah adanya kebiasaan nenbuang sampah di laut selat Sikakap. Perbuatan ini dilakukan tanpa rasa risih dan muncul rasa bersalah sedikit pun. Laut masih dipandang sebagai tempat membuang sampah. Semua sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol minuman, botol dan gelas air kemasan plastik, kantong-kantong plastik, limbah sayur, limbah cair deterjen, kertas-kertas pembungkus, dan membuang hajat besar, semuanya dibuang ke laut. Tingkah laku pembuangan limbah domestik ini menunjukkan bahwa sikap hidup bersih dan sehat masih belum menjadi bagian dari hidup mereka serta rendahnya tanggung jawab untuk kepentingan publik.

Gema kesadaran lingkungan dan perlunya menjaga kebersihan dan keutuhan ekosistem pesisir melalui konverensi laut dunia (World Ocean Convergence) yang dilakukan di Manado sesungguhnya telah menyentuh kesadaran masyarakat lapisan atas, yang ditunjukkan pada seruan perlunya menjaga kelestarian ekosistem laut dan terumbu karang. Hal ini diungkapkan dalam kunjungan tamu dari ADB yang berlangsung

pada tanggal 20 Juli 2009 di Pelabuhan TPI Desa Sikakap. Dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan, tampaknya himbauan tersebut belum mempunyai daya ungkit untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan. Pendek kata peristiwa penyadaran lingkungan sejagad, terkesan berlalu begitu saja, tanpa meninggalkan jejak seberkas harapan perbaikan sedikitpun dalam upaya pelestarian lingkungan ekosistem laut.

Upaya perbaikan lingkungan penanganan sampah, sudah dirintis oleh pemerintah desa sejak tahun 2006 yang lalu. Upaya ini terhenti oleh karena terkendala macetnya setoran warga, sehingga mobil pengangkut sampah tidak bisa beroperasi lagi. Usaha ini ingin dilanjutkan kembali oleh LPSTK. Untuk keperluan tersebut, sebidang tanah seluas 1 ha di daerah Mabola tepatnya Dusun Mapinang. Tanah tersebut merupakan tanah milik seorang janda penduduk Dusun Mapinang. Lokasi calon Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) tersebut berupa cekungan tanah sawah yang sudah tidak digarap lagi oleh pemiliknya. Berjarak kurang lebih 2 km dari Desa Sikakap, dan sekitar 300 m dari tepi pantai Mabola. Jalan masuk menuju lokasi bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Lahan calon TPA tersebut menurut pengakuan Ketua LPSTK sudah disewa seharga 10 juta rupiah, dengan perjanjian “waktu yang tak terhingga”. Masih menurut keterangan Ketua LPSTK, masyarakat sekitar sudah menerima ide rencana tersebut, kendatipun baru dalam bentuk lisan. Tahap selanjutnya apakah harus dibuat dalam bentuk bak-bak penampung sampah sementara di pinggir-pinggir jalan, berapa iuran warga harus dikenakan, dan bagaimana mengelola kegiatan ini, hingga pertengahan tahun 2009 masih dalam proses yang harus segera dimusyawarahkan kepada seluruh warga masyarakat.

Saat kunjungan tim peneliti ke lokasi dilakukan, ternyata masyarakat sekitar belum mengetahui rencana tersebut. Marlius sebagai Kepala Dusun Mabola bersikap tegas menolak rencana tersebut, karena dampak buruk yang akan dialami oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh pembuangan sampah di Mabola tepatnya di samping lokasinya

di bawah tempat peternakan sapi milik warga setempat, telah berakibat buruk bagi anak-anak. Pengalaman menunjukkan bahwa pada saat lokasi tersebut pernah dijadikan TPA banyak anak-anak yang sering bermain memunguti limbah makanan roti, sehingga banyak anak yang sering sakit perut. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh ke dua Ketua Pokmas pembudidaya rumput laut di Mabola yakni Laurensius Ketua Pokmas "Saina Bangkit", dan Marinus Ketua Pokmas "Getaioba", keduanya menolak rencana tersebut. Sementara itu menurut informasi dari salah seorang pemuka masyarakat setempat Dusun Tengah menyatakan bahwa di tingkat desa sendiri program tersebut masih dihadapkan dengan persoalan administrasi menyangkut besar dana operasional yang akan dianggarkan oleh LPSTK. Sebagian tokoh masyarakat merasa keberatan untuk terlibat membahas perencanaan ini bila tidak ada transparansi menyangkut masalah administrasi keuangan.

Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya kesimpangsiuran mengenai jalannya program kegiatan COREMAP II di Desa Sikapak. Pada hal informasi awal yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai menyebutkan bahwa program ini sudah berjalan lancar, pergi mengangkut sampah, pulang membawa pasir, ternyata di lapangan kenyataannya lain. Hal ini menunjukkan lemahnya kelembagaan dan kemampuan manajerial dalam mengelola informasi. Sisi lain juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari aparat yang terlibat, terbukti tidak menguasai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

11. Program Village Grant

Bantuan *village grant*, berupa tambat perahu di Desa Berkat Baru, kondisinya sudah hancur karena diterjang ombak 6 bulan yang lalu. Bangunan yang lain berupa sarana umum MCK yang terletak di kompleks bangunan Gereja Kristen Protestan di Dusun Sikapak Tengah. Kondisi bangunan tersebut cukup bersih, dan banyak digunakan oleh masyarakat, terutama para jemaat Kristen. Bangunan yang lain berupa pasar ikan Higienis, berlantai semen, bertiang kayu, dan beratap seng.

Bangunan tersebut terletak di Dusun Masabuk Sikakap Barat menempati tanah kantor Unit Pelaksana Teknis (UPTD) dinas DKP Provinsi seluas 48 m². Pasar ikan yang letaknya persis bersebelahan dengan pasar tradisional Dusun Masabuk sudah dimanfaatkan oleh para pedagang ikan. Kondisi bangunan cukup rapih dan bersih, hanya penataan lingkungan sekitar masih perlu dilakukan, seperti pembuatan saluran air selokan, pembuatan bak penampung sampah, dan pembersihan rumput liar di sekitarnya.

Semua bangunan ini dilakukan oleh kontraktor setempat tanpa melibatkan masyarakat. Harus pula diakui bahwa kondisi Pondok Informasi sudah banyak perubahan secara fisik. Pada dinding-dinding sudah tertempel berbagai poster penyelamatan terumbu karang, foto-foto yang mendokumentasikan COREMAP II. Terpampang juga peta lokasi kegiatan COREMAP II, bagan Struktur Kepengurusan LPSTK, daftar jumlah pokmas dan kegiatannya. Kesibukan pengurus LPSTK dan Pokmas juga mewarnai seluruh isi ruang pondok informasi. Kesemua kegiatan itu dilakukan dalam rangka menyambut kunjungan tamu dari ADB dan Tim CRITIC Pusat Jakarta pada tanggal 20 Mei 2009, selepas mengikuti *World Ocean Convergence* di Manado.

2.3. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN/PROGRAM COREMAP

Program kegiatan COREMAP II merupakan serangkaian program kegiatan yang disusun secara bertahap, seperti tahap sosialisasi, tahap persiapan, dan tahap implementasi. Keberhasilan masing-masing tahap akan sangat menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat menuntut pengetahuan koqnitif yang dapat membimbing sebuah proses kejiwaan sampai pada pengertian dan pemahaman, sehingga orang tergerak hatinya untuk ikut terlibat dalam suatu kegiatan. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada suatu kegiatan menjadi penting, kerana merupakan indicator keberhasilan suatu kegiatan atau sebaliknya. Secara kuantitas indicator tersebut bisa diukur dari seserapa besar angka keterlibatan suatu

kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan, dengan melalui kuisisioner. Penelitian ini telah mengambil sejumlah sample responden sebanyak 120 reaponden, dan 1 responden dinyatakan gagal. Demikian pula secara kualitas bisa diukur dari tolok ukur sebagaimana dikemukakan Boyle (1981) yang menyatakan (1) Partisipasi dari suatu warga komunitas dalam suatu kegiatan dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk mendidik warga komunitas tersebut. Hal ini penting karena akan menghasilkan pengertian, consensus, rasa tanggungjawab, dan keputusan yang bijaksana. (2) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai, karena merupakan suatu tolok ukur diterima atau tidaknya suatu kegiatan oleh masyarakat. (3) Partisipasi itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang digalakkan untuk mendorong lahirnya inisiatif, kreatifitas, lahirnya keswadayaan, dan kepercayaan diri. Artinya sangat tergantung pada bagaimana suatu kegiatan ditangani oleh pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan. (4) Keterlibatan masyarakat akan memberikan informasi yang lebih akurat tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat dan juga untuk menghindari salah konsepsi para petugas.

Secara kuantitas keterlibatan masyarakat pada program kegiatan COREMAP dapat dilihat pada tabel 2.1. Dari angka-angka dalam tabel 2.1. tersebut, tampak bahwa pengetahuan masyarakat terhadap program kegiatan COREMAP terutama pada keberadaan COREMAP, kegiatan penyelamatan terumbu karang, pengawasan pesisir/laut, dan pembentukan LPSTK cukup tinggi, diatas 50 persen. Angka ini menurun pada item-item kegiatan, angkanya berada dibawah 45 persen. Kusus pada kegiatan Budidaya dan pengolahan hasil laut, angkanya cukup tinggi, karena memang mendapatkan prioritas utama dan jumlah pokmasnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan keberhasilan didalam melakukan kegiatan sosialisasi.

Tabel 2.1.
Pengetahuan Responden tentang Program/Kegiatan COREMAP

No	Jenis kegiatan	Mengetahui	%	Tidak tahu	%
1	Keberadaan COREMAP	95	79,8	24	20,2
2	Penyelamatan TK	89	74,8	30	25,2
3	Perlindungan pesisir/laut	71	59,7	48	40,3
4	Pembentukan LPSTK	58	48,7	61	51,3
5	Pelatihan UEP	43	36,1	76	63,9
6	Pendampingan UEP	35	29,4	84	70,5
7	Penyusunan RPTK	32	26,9	86	72,3
8	Konservasi	31	26,1	88	73,9
9	Pokmas ekonomi	44	37,0	75	63,0
10	produktif	31	26,1	87	73,1
11	Pokmas jender	76	63,9	43	36,1
12	Budidaya	45	37,1	74	62,2
13	Perikanan tangkap	43	36,1	76	63,9
14	Ternak ayam	67	56,3	52	43,7
	Pengolahan hasil laut				

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

Lalu bagaimana dengan angka keterlibatan responden pada program kegiatan COREMAP, rincian angka keterlibatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan COREMAP

No	Jenis kegiatan	Terlibat	%	Tidak terlibat	%
1	Pengetahuan dan	28	23,5	51	42,9
2	kesadaran TK	22	14,3	58	48,7
3	Perlindungan TK	17	18,5	49	41,2
4	Pembentukan LPSTK	17	14,3	26	21,8
5	Pelatihan UEP	10	8,4	25	21,0
6	Pendampingan UEP	11	9,2	21	17,6
7	Penyusunan RPTK	14	11,6	17	14,3
8	Konservasi	19	16,0	25	21,0
9	Pokmas ekonomi produktif	1	0,8	30	25,2
10	Pokmas jender	16	13,4	60	50,4
11	Budidaya	13	10,9	32	26,9
12	Perikanan tangkap	3	2,5	40	33,6
13	Ternak ayam	10	8,4	57	47,9
	Pengolahan hasil laut				

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

Manfaat program kegiatan COREMAP, sebagian besar responden yang menyatakan terlibat, menyatakan bahwa bantuan tersebut bermanfaat buat penambahan modal usaha, tetapi belum mampu meningkatkan pendapatan keluarga karena usahanya belum berhasil. Jawaban responden secara rinci mengenai manfaat keterlibatan dalam program kegiatan COREMAP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Pendapat Responden tentang Manfaat
Program Kegiatan COREMAP

Jenis kegiatan	Bermanfaat	%	Tidak bermanfaat	%
Budidaya	15	12,6	1	0,8
Perikanan tangkap	13	10,9	-	-
Ternak ayam	3	2,5	-	-
Pengolahan hasil laut	14	11,6	-	-

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang terlibat dalam kegiatan menyatakan ada manfaatnya. Namun demikian, secara kuantitas tingkat partisipasi masyarakat sulit diukur tinggi rendahnya dengan angka-angka dalam tabel tersebut di atas, karena mungkin saja orang-orang yang terlibat dalam kegiatan COREMAP tidak terdaftar sebagai responden. Kesulitan ini akan dijumpai dengan melihat indikator kualitatif, sebagaimana telah diuraikan di atas. Bila diukur dengan indikator kualitatif harus diakui bahwa pelaksanaan program kegiatan COREMAP masih jauh dari apa yang dikonsepsikan Boyle (1981) di atas. Program COREMAP belum mampu menumbuhkan kreatifitas masyarakat, inisiatif masyarakat, kemandirian masyarakat, dan swadaya masyarakat.

Tabel 2.4.
Program Kegiatan COREMAP II Di Desa Sikakap
Kondisi dan Permasalahan

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Dana (Rp 000)	Kondisi	Permasalahan
1	Budidaya rumput laut 15 Pokmas	2008	210.000	Kegiatan berjalan tidak optimal	Dimakan ikan, tidak dikuasai teknik budidaya, dan tidak ada pendampingan
2	Pengolahan rumput laut 5 Pokmas	2008	200.000	Kegiatan berjalan tidak optimal	Tidak ada bahan baku, ada indikasi KKN dalam pengadaan peralatan, bahan baku tidak berlabel, serta tidak jelas spesifikasi bahan dan peralatan.
3	Pengolahan ikan 2 Pokmas	2008	35.000	Terhenti karena kelangkaan bahan baku	Kelangkaan bahan baku karena beroperasinya kapal purnis dari luar
4	Budidaya ikan kerapu sistem KJA 4 kelompok	2008	212.266	1 kelompok bangkrut, 2 tidak jalan, dan 1 tidak dibuat	Tidak dikuasai teknik budidaya, tidak ada pendampingan, ada indikasi menampung hasil tangkapan ikan pembiusan
5	Penyulingan nilam	2007 2008	20.000	Terhenti sementara	Harga minyak nilam jatuh

6	Pembuatan batu bata	2008	46.000	Jalan tidak optimal	Tidak dikuasai teknik pencetakan, lemah motivasi kerja, hanya diupahkan
7	Sanitasi lingkungan	2009	?	Belum jalan	Lokasi belum mendapat persetujuan masyarakat sekitar, rencana pengelolaan masih dalam pembahasan
8	Konservasi	2009	?	Perahu Pokmas masih bagus	Pengawasan tidak optimal, tidak jelas kewenangan Pokwasmas, DKP belum ada PPNS, tidak memiliki kapal patroli
9	Lokasi DPL sudah ditetapkan Desa	2008	?	Tumpang tindih dengan penggunaan lain	Belum ada pembicaraan antar stakeholders menyangkut tata ruang dan sanksi
10	Village grant	2008	?	1 MCK bagus dan dimanfaatkan, tambat perahu hancur, pasar ikan higienis bagus dan sudah dimanfaatkan	Pekerjaan ini dilakukan oleh kontraktor setempat dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

BAB III

PENDADAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA

Penelitian data dasar aspek sosial ekonomi terumbu karang di Desa Sikakap menunjukkan pendapatan perkapita penduduk tahun 2007 sebesar 196.445 rupiah. Sebagian besar penduduk termasuk dalam kategori miskin baik menurut kategori bank dunia maupun garis kemiskinan tingkat kabupaten (Suko Bandiyono, dkk, 2007). Meskipun sifatnya sebagai data dasar, tetapi beberapa program coremap waktu itu telah berjalan dan memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi pengaruh tersebut sebagian besar berupa pengaruh negatif karena program budidaya rumput laut yang telah mendatangkan bibit sekitar 6 ton dari Lampung ternyata tidak berhasil. Semua bibit mati, dan tidak ada kepastian pemenuhan bibit sisa (6 ton) yang masih menjadi hak kelompok masyarakat. Program yang dijalankan waktu itu masih sebatas program yang tidak memiliki perencanaan matang, tidak didasarkan pada kajian potensi wilayah. Apakah daerah Sikakap cocok untuk Budidaya rumput laut tidak dibuktikan secara ilmiah, sehingga program hanya terkesan sebagai program yang bersifat coba-coba. Sampai saat itu, belum ada hasil apapun yang didapatkan dari program ekonomi produktif coremap.

Pada pertengahan tahun 2009 dilakukan penelitian dalam rangka mengkaji pengaruh program COREMAP terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat. Program COREMAP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setelah dilaksanakan selama beberapa tahun di desa lokasi studi. Perubahan pendapatan selama beberapa tahun pelaksanaan program diharapkan dapat menjelaskan tingkat keberhasilan program yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi kelangsungan program. Penghitungan

pendapatan dalam penelitian ini masih berdasarkan harga yang berlaku, sehingga penjelasan tentang perubahan pendapatan penduduk akan dihubungkan dengan laju inflasi, maupun tingkat upah di daerah setempat.

3.1. PENDAPATAN PENDUDUK

Data hasil penelitian (Tabel 4.1) menunjukkan bahwa antara tahun 2007-2009 di Desa Sikapak terjadi peningkatan pendapatan penduduk sebesar 46,32 persen. Peningkatan pendapatan ini lebih tinggi daripada laju inflasi di daerah yaitu 20,35 persen pada dua tahun yang terakhir. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan langsung dengan COREMAP yang sedang dijalankan di daerah tersebut. Kondisi ini disebabkan belum ada program usaha ekonomi produktif dari COREMAP yang telah berhasil di daerah penelitian. Program tahun 2006 yang semula ditujukan untuk Budidaya rumput laut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana ditemukan pada waktu dilakukan survai data dasar bahwa sekitar 6 ton bibit rumput laut yang telah dipesan mati semua sebelum sempat ditanam. Sisa bibit yang diperkirakan sekitar 6 ton juga tidak datang dan akhirnya program tersebut diputihkan dalam arti masyarakat dibebaskan dari kewajiban mengangsur.

Tahun 2009 COREMAP juga merealisasikan beberapa program usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Rumput laut yang telah gagal pada tahun sebelumnya, dijadikan sebagai program unggulan lagi, tanpa disertai studi kelayakan. Sekitar 24 kelompok telah dibentuk terdiri dari 15 kelompok rumput laut, 5 kelompok pengolahan rumput laut, 1 kelompok pengolahan ikan, 2 KJA dan 1 jasa transportasi, dengan dana yang digulirkan sebesar 563 juta rupiah. Akan tetapi seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak ada dari 24 kelompok tersebut yang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik rumput laut kembali terjadi, meskipun berbeda dengan tahun sebelumnya. Rumput laut yang ditanam warga tidak ada yang tumbuh dengan baik dengan berbagai kendala dilapangan yang dihadapi. Sampai saat ini belum ada

kelompok yang dapat panen, dan mereka tinggal menunggu separuh dari bibit yang masih menjadi hak mereka. Jika tidak ditangani dengan teliti ada kemungkinan terjadi pemutihan utang sebagaimana terjadi tahun sebelumnya. Kelompok lain juga menghadapi kendala yang menyebabkan terhambatnya usaha yang mereka jalankan. Oleh sebab itu, program COREMAP sampai saat tahun 2009 belum dapat memberikan manfaat positif bagi perekonomian penduduk.

Dampak COREMAP terhadap perekonomian masyarakat belum dapat terlihat dan masyarakat mengaku belum merasakannya. Sebagian besar masyarakat justru merasa dirugikan karena mereka harus menanggung beban utang yang cukup tinggi, sementara program ekonomi produktif tidak jalan. Meskipun demikian, data statistik pendapatan penduduk menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan rumah tangga masing-masing sebesar 42,47 persen dan 37,98 persen selama tahun 2007-2009. Peningkatan pendapatan tersebut lebih besar daripada inflasi di daerah yaitu 6,9 persen pada tahun 2007 dan 13,45 persen pada tahun 2008. Dengan demikian, secara umum terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di desa lokasi studi. Peningkatan rata-rata pendapatan ini masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat karena hanya ada 15 persen masyarakat mengaku kehidupan mereka lebih baik dibandingkan dengan sebelum ada COREMAP, sementara 85 persen mengaku sama saja atau bahkan lebih buruk. Pendapatan perkapita penduduk di lokasi studi lebih kecil dibandingkan dengan garis kemiskinan di Padang tahun 2009 (217.649 rupiah). Pendapatan perkapita juga lebih kecil jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Bank Dunia. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di Desa Sikakap.

Tabel 3.1.
 Statistik Pendapatan penduduk di Desa Sikakap,
 Tahun 2007 dan 2009

No	Jenis pendapatan	Tahun		Perubahan (%)
		2007	2009	
1	Per kapita	196.445	279.872	42,47
2	Rata-rata rumah tangga	851.353	1.174.682	37,98
3	Median	575.000	882.500	53,48
4	Minimum rumah tangga	50.000	50.000	0,00
5	Maksimum rumah tangga	4.233.333	4.983.333	17,72

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

Peningkatan pendapatan juga terjadi pada angka median yang meningkat sebesar 53,48 persen atau menjadi 882.500 rupiah pada tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa 50 persen rumah tangga mempunyai pendapatan di bawah median, sedangkan 50 persennya berada di atas batas median. Di sisi lain pendapatan minimum rumah tangga selama dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu 50 ribu rupiah. Pendapatan minimum pada tahun 2009 terdapat pada rumah tangga yang mempunyai sumber pendapatan dari buruh angkut barang di kapal. Pendapatan rumah tangga ini sangat kecil sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda halnya dengan pendapatan maksimum yang mengalami peningkatan sebesar 17,72 persen, sehingga pada tahun 2009 menjadi 4,98 juta per bulan. Pendapatan tertinggi terdapat pada rumah tangga yang mempunyai sumber penghasilan dari perdagangan dan perikanan. Pendapatan dari luar sektor perikanan rumah tangga ini tampak lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari kegiatan perikanan.

Tabel 4.2.
Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan
di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009

No	Kelompok pendapatan	2007	2009
1	< 500.000	38,0	24,6
2	500.000 - 999.999	37,0	29,7
3	1.000.000 - 1.499.999	9,0	16,9
4	1.500.000 - 1.999.999	5,0	11,0
5	2.000.000 - 2.499.999	4,0	7,6
6	2.500.000 - 2.999.999	2,0	6,8
7	3.000.000 - 3.499.999	2,0	0,8
9	3.500.000 +	3,0	2,5
	Total	100	100

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

Distribusi pendapatan rumah tangga menunjukkan adanya peningkatan proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan antara 1– 1,99 juta dari 14 persen pada tahun 2007 menjadi 27,9 persen pada tahun 2009. Sementara itu terjadi penurunan proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah 1 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendapatan rumah tangga dari kelompok paling rendah ke kelompok di atasnya. Salah satu sebab kenaikan pendapatan adalah terjadinya inflasi, sehingga meskipun secara nominal pendapatan mereka bertambah akan tetapi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tidak mengalami peningkatan. Pada dasarnya belum ada perubahan sumber mata pencaharian penduduk di lokasi studi, sehingga secara riil tidak ada perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa Sikakap sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah baik di darat maupun di laut. Akan tetapi sumber daya tersebut belum tergarap secara optimal bahkan terdegradasi sehingga tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perekonomian khususnya jasa dan perdagangan lebih banyak

diperankan oleh penduduk migran terutama dari daratan Sumatera, sementara penduduk lokal belum dapat berperan aktif karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar penduduk lokal etnis Mentawai banyak bermukim jauh dari pusat pemerintahan dan hidup masih tergantung pada lingkungan alam.

3.2. PENDAPATAN ANGGOTA POKMAS

Jumlah kelompok masyarakat di Sikakap yang terbentuk dalam rangka kegiatan COREMAP ini cukup besar, sehingga cukup banyak masyarakat yang terdata sebagai anggota Pokmas. Pada tahun 2008 saja terdapat 24 kelompok usaha ekonomi produktif bentukan COREMAP dengan anggota lebih dari 100 orang, selain itu pada tahun 2006 juga telah terbentuk 6 kelompok masyarakat. Diantara anggota Pokmas tersebut, terdapat 40 orang anggota yang menjadi responden pada penelitian ini. Anggota Pokmas diharapkan dapat memperoleh manfaat program COREMAP melalui pengembangan dana bergulir untuk pengembangan usaha ekonomi produktif.

Dilihat dari kondisi ekonominya, anggota Pokmas berasal dari berbagai kelompok mulai dari yang termiskin sampai dengan yang terkaya. Tabel 4.3 menunjukkan pendapatan perkapita dari anggota Pokmas sekitar 274.911 rupiah, sementara rata-rata pendapatan rumah tangga mencapai 1,27 juta rupiah. Rata-rata pendapatan rumah tangga Pokmas lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan rumah tangga di desa Sikakap. Meskipun demikian, pendapatan perkapita anggota Pokmas lebih rendah dari pendapatan perkapita penduduk desa. Hal ini menunjukkan jumlah anggota rumah tangga anggota Pokmas lebih besar daripada rata-rata penduduk desa.

Tabel 3.3.
 Statistik Pendapatan anggota kelompok masyarakat
 di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009

No	Jenis pendapatan	Jumlah (rupiah)
1	Per kapita	274.911
2	Rata-rata rumah tangga	1.269.837
3	Median	943.333
4	Minimum rumah tangga	50.000
5	Maksimum rumah tangga	4.983.333

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 dan 2009

Pendapatan rumah tangga terendah dan tertinggi ternyata berasal dari rumah tangga yang menjadi anggota Pokmas. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat pendapatan rumah tangga yang cukup tinggi diantara anggota Pokmas. Variasi pendapatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha ekonomi produktif, karena penduduk yang memiliki pendapatan tinggi dapat memfasilitasi anggota yang lain agar bisa lebih maju. Akan tetapi, secara faktual belum ada satu jenis usaha ekonomi produktif yang dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Satu-satunya usaha yang cukup berjalan adalah usaha pengeolahan ikan asin, karena pengelola usaha sudah berpengalaman dalam menjalankan usaha. Usaha ini mengalami kendala ketersediaan bahan baku (ikan segar) karena beberapa tahun ini hasil usaha penangkapan ikan di Sikakap hanya cukup untuk dijual segar kecuali pada bulan tertentu. Penurunan secara signifikan populasi ikan yang akan dikeringkan terutama terjadi pada 2 tahun terakhir. Hal ini diduga berkaitan dengan masuknya kapal-kapal besar di sekitar daerah Sikakap. Belum ada aturan yang melindungi kepentingan nelayan setempat dari eksploitasi sumber daya laut kapal luar Sikakap. Permasalahan bahan baku tersebut membuat kapasitas produksi ikan asin sangat berkurang.

Tabel 3.4.
Distribusi Rumah Tangga Pokmas Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009

No	Kelompok pendapatan	Persentase
1	< 500.000	30,0
2	500.000 - 999.999	22,5
3	1.000.000 - 1.499.999	20,0
4	1.500.000 - 1.999.999	2,5
5	2.000.000 - 2.499.999	10,0
6	2.500.000 - 2.999.999	10,0
9	3.500.000 +	5,0
	Total	100

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2009

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi anggota Pokmas umumnya merupakan masyarakat lokal yang tidak dapat mengelola sumber daya dengan baik. Sebagian besar kekayaan yang diperoleh secara turun menurun telah mereka jual, sehingga asset yang dimiliki sudah sangat minim. Pada waktu ditawarkan alternative untuk usaha ekonomi produktif sebagian besar diantara mereka menyambut dengan harapan yang cukup tinggi untuk meningkatkan taraf hidup. Akan tetapi, harapan tersebut tidak pernah terwujud karena kegiatan tidak disertai dengan persiapan yang matang serta jenis usaha tidak sesuai potensi setempat. Usaha rumput laut yang diharapkan menjadi program unggulan desa, ternyata belum pernah diujicobakan keberhasilannya dan kesesuaian dengan ekosistem daerah setempat. Program tersebut sampai saat ini masih terbatas pada angan-angan yang tidak disertai dengan uji kelayakan, sehingga sampai saat ini tidak pernah berhasil.

Proporsi anggota Pokmas yang mempunyai pendapatan di bawah 1 juta rupiah sebanyak 52,5 persen, sementara yang mempunyai pendapatan di atas 2 juta rupiah sebesar 25 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggota Pokmas dapat berasal dari kelompok penduduk berpenghasilan tinggi maupun rendah. Pengajuan dana

berkelompok dimaksudkan agar diantara anggota kelompok dapat saling mengingatkan, jika ada anggota yang belum membayar. Meskipun ada anggota yang mempunyai pendapatan tinggi, tetapi dampak positif terhadap kelancaran pembayaran angsuran tidak dirasakan kelompok. Terbukti selama ini hanya sedikit peminjam yang dapat mengembalikan angsuran bulanan. Hal ini disebabkan hasil usaha ekonomi produktif yang dilakukan belum dapat berjalan. Sebagian besar warga bahkan merasa merugi karena telah mengajukan pinjaman ke COREMAP, sementara hasil yang diharapkan tidak mereka dapatkan. Pinjaman dari COREMAP justru dianggap penambah beban oleh sebagian warga, karena menambah tanggungan berupa utang.

3.3. PENDAPATAN DARI KEGIATAN KENELAYANAN

Statistik pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita pada dua tahun terakhir sebesar 19,34 persen, dan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 32,68 persen. Peningkatan pendapatan ini lebih rendah dari peningkatan pendapatan masyarakat dari seluruh sumber mata pencaharian. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan dari sektor kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Jika dibandingkan dengan inflasi di daerah Sumatera Barat, pertumbuhan pendapatan perkapita dari kegiatan kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi. Hal ini menunjukkan selama dua tahun terakhir pendapatan penduduk dari perikanan relative stabil bahkan berkurang. Meskipun demikian rumah tangga ini masih dimungkinkan memiliki sumber mata pencaharian di luar sector perikanan, yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pendapatan dari sector perikanan.

Usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh masyarakat, selama ini lebih banyak bersentuhan dengan sektor kelautan, sementara masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk pengembangan usaha tersebut. Meskipun ada potensi usaha ekonomi yang tidak berhubungan dengan sektor kenelayanan, masyarakat tidak

bisa mengajukan usaha tersebut karena tidak sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh DKP. Usaha ekonomi produktif yang sedianya digunakan untuk mendorong pendapatan dari sektor perikanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga manfaat yang diambil dari program tersebut belum dapat dirasakan khususnya untuk peningkatan pendapatan nelayan.

Tabel 3.5.
Statistik Pendapatan rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009

Jenis gelombang/ Pendapatan	Tahun		Perkembangan (%)
	2007	2009	
Per kapita	133.113	158.860	19,34
Rata-rata RT	565.462	750.279	32,68
Minimum RT	56.250	80.000	42,22
Maksimum RT	2.562.500	2.966.666	15,77

Sumber: Data primer, Survei Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2007 dan 2009

Pekembangan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan memiliki pola yang berbeda menurut musim gelombang lemah, pancaroba dan gelombang kuat. Musim gelombang lemah ditandai dengan ombak yang relative bersahabat sehingga sebagian besar nelayan malaut. Pada waktu musim tersebut terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan sebesar 59,9 persen, sementara pendapatan perkapita meningkat 43,24 persen (Tabel 4.6). Tidak diketahui secara pasti penyebab peningkatan pendapatan pada waktu musim gelombang tenang ini, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh alam. Oleh sebab itu, peningkatan pendapatan tidak dihubungkan dengan keberadaan berbagai program pembangunan termasuk COREMAP. Meskipun secara rata-rata mengalami peningkatan, akan tetapi perkembangan negative justru terjadi pada nelayan yang berpenghasilan paling rendah. Pendapatan minimum menurun sebesar 25 persen dibandingkan dengan pendapatan minimum pada tahun 2007. Di sisi lain terdapat peningkatan pendapatan sebesar 73 persen

pada nelayan yang berpendapatan tertinggi. Hal ini dapat memberikan fakta bahwa peningkatan pendapatan hanya dimiliki oleh nelayan kaya dengan alat tangkap yang memadai.

Musim pancaroba merupakan musim peralihan dari gelombang kuat ke lemah ataupun sebaliknya. Nelayan lebih sedikit melaut karena gelombang tidak menentu, kadang kuat kadang tenang. Di Sikakap musim pancaroba terjadi selama 4 bulan masing-masing 2 bulan peralihan dari kuat ke tenang dan dari tenang ke kuat. Pendapatan perkapita dan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada waktu musim pancaroba meningkat masing-masing sebesar 5,81 persen dan 50,5 persen.

Tabel 3.6.
 Statistik Pendapatan RT dari Kegiatan Kenelayanan
 menurut musim di Desa Sikakap, tahun 2007 dan 2009

Jenis gelombang / Pendapatan	Tahun		Perkembangan (%)
	2007	2009	
Lemah			
Per kapita	187.763	268.956	43,2
Rata-rata RT	803.571	1.223.770	52,3
Median	735.000	800.000	8,8
Minimum RT	80.000	60.000	-25,0
Maksimum RT	2.250.000	3.900.000	73,3
Pancaroba			
Per kapita	128.240	135.697	5,81
Rata-rata RT	410.552	617.700	50,5
Median	300.000	375.000	25,0
Minimum RT	21.000	80.000	281,0
Maksimum RT	1.500.000	3.200.000	113,3
Kuat			
Per kapita	90.552	83.549	-7,7
Rata-rata RT	350.972	396.111	12,7
Median	237.500	200.000	-15,8
Minimum RT	60.000	20.000	-66,7
Maksimum RT	3.750.972	3.200.000	-14,7

Sumber: Data primer, Survei Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2007 dan 2009

Perbedaan perkembangan pendapatan yang cukup tinggi antara pendapatan perkapita dan rumah tangga menunjukkan adanya variasi dalam jumlah anggota rumah tangga. Pada tahun 2009 pendapatan rumah tangga cukup tinggi tetapi jumlah ART lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2007. Oleh sebab itu, pendapatan perkapita hanya mengalami sedikit peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan, pendapatan perkapita penduduk masih sangat rendah (135.697 rupiah) sehingga sebagian besar penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Tabel 3.7.
Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, Tahun 2007 dan 2009

Pendapatan (juta)	Ombak lemah		Pancaroba		Ombak kuat	
	2007	2009	2007	2009	2007	2009
< 0,50	28,6	33,9	84,2	55,7	88,9	81,8
0,50 – 0,99	33,3	24,2	7,9	23,0	8,3	10,9
1,00 – 1,49	31,3	6,5	5,3	13,1	0,0	1,8
1,50 – 1,99	0,0	8,1	2,6	3,3	0,0	0,0
2,00 – 2,49	7,1	12,9	0,0	1,6	0,0	0,0
2,50 – 2,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
3,00 – 3,49	0,0	4,8	0,0	3,3	0,0	3,6
≥ 3,5	0,0	9,7	0,0	0,0	2,8	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Data primer, Survei Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2007 dan 2009

Musim gelombang kuat ditandai dengan adanya badai dan gelombang tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk melaut. Sebagian nelayan mengalihkan kegiatan dengan bekerja di darat seperti pertanian, dan perdagangan. Sementara sebagian yang lain melakukan persiapan dengan memperbaiki peralatan tangkap yang rusak. Pendapatan perkapita penduduk dari kegiatan kenelayanan menurun sekitar 7,7 persen, sementara pendapatan rumah tangga meningkat 12,7 persen. Pendapatan rumah tangga pada waktu musim gelombang kuat ini hanya seperempat dari pendapatan pada waktu musim gelombang

tenang. Sebagian masyarakat, menggunakan tabungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sebagian yang lain mengandalkan hasil darat yang mereka kelola pada waktu musim gelombang kuat berlangsung.

Distribusi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan adanya perubahan pola distribusi pendapatan pada tahun 2007 dan 2009. Proporsi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah yang kurang dari 0,5 juta pada tahun 2007 sebesar 28,9 persen sementara pada tahun 2009 meningkat menjadi 33,9 persen. Hal ini berbeda dengan musim pancaroba dan gelombang kuat yang menunjukkan penurunan proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari 0,5 juta. Perubahan proporsi pendapatan juga terjadi pada rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi (≥ 3 juta). Besarnya proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan rendah tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.

3.4. FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN PENDUDUK

Pendapatan rumah tangga dan perkapita di Desa Sikakap selama dua tahun terakhir (2007-2009) secara umum mengalami peningkatan sebesar 37,98 persen dan 42,47 persen. Peningkatan pendapatan ini lebih besar dibandingkan dengan inflasi di daerah yaitu sebesar 20,37 persen, sehingga secara nyata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Pendapatan penduduk dari sektor kenelayanan juga mengalami peningkatan sebesar 32,68 persen untuk pendapatan rumah tangga dan 19,34 persen untuk pendapatan perkapita. Secara umum perubahan pendapatan dapat dikaitkan dengan beberapa faktor diantaranya kebijakan pemerintah, perubahan sumber pendapatan, teknologi penangkapan ikan, wilayah tangkap, biaya produksi dan kualitas SDM.

3.4.1. Kebijakan Pemerintah (COREMAP dan Program Pemerintah lainnya)

Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang berkaitan langsung dengan sumber mata pencaharian penduduk cukup banyak dilakukan. Beberapa program pemerintah yang masuk ke Desa Sikakap diantaranya adalah : Corel Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP), PNPB-Mandiri, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan program bantuan jaring apung dari dinas perikanan kabupaten. Program-program tersebut secara langsung dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program bantuan keramba jaring apung yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan merupakan program yang cukup strategis. Namun sayang keramba jaring apung yang telah dirancang untuk Budidaya ikan laut khususnya ikan kerapu belum dapat dimanfaatkan dengan baik.

Budidaya ikan tidak dapat berjalan karena bibit ikan sulit didapatkan dan mereka belum menguasai teknis budidaya secara benar. Selama ini mereka adalah nelayan tangkap yang belum terlatih untuk melakukan budidaya, sehingga pengetahuan mereka masih rendah. Pelatihan yang diberikan selama ini masih belum cukup karena hanya dilakukan selama satu minggu. Kalaupun mereka mendatangkan dari Lampung, bila tidak diikuti pelatihan dan pendampingan bibit ikan kerapu mempunyai resiko kematian yang tinggi. Pemberian bantuan ini justru dapat menambah panjang masalah perikanan, karena masyarakat seolah diberi fasilitas untuk menampung ikan hasil pembiusan. Ikan yang dibius diterapi dalam keramba dan setelah sehat baru dijual. Meskipun demikian, program tersebut sebenarnya merupakan program yang cukup strategis, hanya saja perlu disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang menjalankan program.

Program penyelamatan terumbu karang atau sering disebut COREMAP juga secara langsung memberi kegiatan untuk menciptakan usaha alternatif seperti Budidaya rumput laut, keramba jaring apung, pengolahan rumput laut, pembuatan ikan asin, dan pembuatan batu bata. Namun semua usaha alternatif yang diajukan masyarakat tersebut

juga belum ada yang berhasil. Bisa dikatakan semua usaha ekonomi produktif sebagai alternatif mata pencaharian telah gagal karena tidak disesuaikan dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Kegiatan rumput laut yang menjadi program unggulan di desa, namun setelah 4 tahun diusahakan ternyata ini tidak memberikan hasil apapun kepada masyarakat. Pengurus LPSTK mengatakan bahwa sebagian Budidaya rumput laut sudah pernah panen tetapi kemudian hancur oleh badai. Akan tetapi sebagian besar masyarakat terutama anggota Pokmas mengatakan bahwa rumput laut belum pernah dipanen, baru tanam sekali sudah hancur baik karena tidak tumbuh maupun diserang oleh ikan baronang.

Masyarakat yang menjadi anggota kelompok ekonomi produktif bahkan merasa terbebani oleh besarnya utang, sementara usaha yang dijalankan tidak berhasil. Beban masyarakat menjadi semakin besar karena mereka diharuskan memberikan sebagian uang pinjaman sebesar 8 persen kepada pengurus LPSTK sebagai biaya administrasi. Selain itu sebagian barang yang digunakan untuk operasional usaha dibelikan oleh pengurus LPSTK dengan harga yang sangat tinggi sementara mutu barang sangat rendah. Salah satu contoh adalah pembelian alat pengering hasil olahan rumput laut yang baru dipakai 3 kali sudah rusak tidak dapat digunakan lagi, sementara harga yang ditetapkan oleh LPSTK sangat tinggi.

Program pembangunan fisik oleh COREMAP di Desa Sikakap berupa tambatan perahu, pasar higienis dan WC umum. Tambatan perahu saat ini sudah rusak/keropos sehingga tidak berfungsi lagi, sementara WC umum masih terjaga dan dimanfaatkan khususnya oleh masyarakat gereja. Program pembangunan fisik kurang memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat, karena semua pekerjaan dikoordinasikan oleh kabupaten. Kabupaten menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu dan kualitas yang telah ditetapkan. Penunjukkan kontraktor oleh Pemerintah Kabupaten tidak melibatkan pemerintah tingkat desa maupun LPSTK

sehingga masyarakat tinggal memanfaatkan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah kabupaten. Penentuan sarana yang dibangun juga kurang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui jenis usulan pembangunan fisik di desanya. Pasar higienis selama ini dimanfaatkan oleh pedagang di pasar tradisional, tetapi bangunan tersebut hanya mampu menampung sekitar 4 orang pedagang. Oleh sebab itu masih banyak pedagang ikan yang berdagang di luar bangunan pasar higienis.

3.4.2. Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pendapatan penduduk diantaranya adalah sumber pendapatan, teknologi, wilayah penangkapan, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal sumber pendapatan, peningkatan proporsi pendapatan dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan dari 66 persen pada tahun 2005 menjadi 75 persen pada tahun 2007 menunjukkan kegiatan kenelayanan dalam rumah tangga di Desa Sikakap mempunyai peran yang lebih tinggi dalam ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, kehidupan nelayan selama ini sangat tergantung dari kegiatan kenelayanan.

Sumber pendapatan alternatif (di luar kegiatan kenelayanan) di Desa Sikakap selama ini belum berkembang termasuk usaha ekonomi produktif yang diprogramkan oleh COREMAP. Sebenarnya usaha ekonomi di luar sektor kenelayanan yang diusulkan masyarakat sudah ada seperti pembuatan batu bata, dan Budidaya tanaman nilam. Tetapi program ini belum berhasil dan masih perlu pembuktian lebih lanjut apakah usaha tersebut cocok dilakukan di Desa Sikakap.

Sebagian besar program usaha ekonomi produktif yang diusulkan masyarakat merupakan usaha di sektor perikanan, karena program dikoordinasikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Egoisme sektoral menjadikan pedoman usaha ekonomi produktif diutamakan pada sektor perikanan seperti halnya Budidaya rumput laut. Pada tahun 2008 terdapat 15 kelompok rumput laut yang masing-masing

mendapatkan dana pinjaman 14 juta rupiah sehingga total dana untuk budidaya rumput laut mencapai 210 juta rupiah. Dana 14 juta untuk kelompok dialokasikan untuk administrasi LPSTK 1,12 juta, penyusunan proposal 250 ribu, papan nama 150 ribu, bibit 7 juta dan sisanya (5,48 juta) diberikan tunai kepada Pokmas.

Saat penelitian ini dilakukan bibit rumput laut yang diberikan kepada masyarakat sudah 50 persen (200 kg) meskipun sebagian besar masyarakat mengaku bahwa sebenarnya bibit yang diberikan kurang dari 200 kg. Sekitar 80 persen dari bibit hidup kemudian ditanam oleh masyarakat, tetapi sebagian besar dari mereka kesulitan untuk memelihara. Hampir semua bibit rumput laut tidak ada yang tumbuh, dan masyarakat mengalami kerugian yang tinggi. Saat ini mereka masih menunggu bibit sekitar 200 kg yang dijanjikan oleh LPSTK. Kegagalan pada penanaman tahap pertama dan tahun-tahun sebelumnya membuat masyarakat ragu untuk melanjutkan Budidaya rumput laut tersebut. Seperti halnya pinjaman tahun sebelumnya yang gagal dan diputihkan (tidak perlu mencicil), kemungkinan besar program pada tahap ke dua ini akan bernasip sama yaitu gagal dan diputihkan. Kebijakan pemutihan yang dilakukan tentunya menjadi pelajaran yang kurang baik untuk kelangsungan pengelolaan, karena mereka merasa tidak takut untuk tidak mengembalikan pinjaman secara penuh.

Teknologi alat tangkap yang digunakan nelayan maupun wilayah penangkapan ikan selama ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Degradasi sumber daya laut memaksa nelayan beradaptasi untuk mendapatkan hasil tangkapan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan tersebut dapat dilakukan baik dengan peningkatan kualitas teknologi alat tangkap maupun perluasan wilayah tangkap. Teknologi alat tangkap dari nelayan selama 4 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bom telah mengalami penurunan yang cukup tinggi. Masyarakat setempat sudah tidak lagi mendengar maupun melihat orang yang menangkap ikan dengan bom. Penggunaan potassium sebenarnya sudah cukup berkurang, namun itu disebabkan oleh

penggunaan yang dirahasiakan sehingga masyarakat luas tidak mengetahuinya. Secara umum potasium masih banyak digunakan untuk menangkap ikan terutama oleh penyelam kompressor.

Perubahan teknologi hanya akan terjadi jika ada masukan atau inovasi teknologi yang dilakukan oleh pihak luar maupun dari nelayan. Selama ini cukup banyak program yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat terutama dengan Budidaya rumput laut, keramba jaring apung, dan pengolahan rumput laut. Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat namun sampai saat ini program tidak dapat berhasil, sehingga banyak masyarakat yang kecewa. Masukan teknologi tidak disertai dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai baik pendamping (dinas) maupun masyarakat sehingga program masih sebatas mimpi.

Selama ini tidak ada program terintegrasi yang disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia maupun alam sehingga masukan teknologi baik budidaya maupun penangkapan selalu gagal. Tidak adanya perubahan teknologi penangkapan ikan juga dapat dilihat dari rumah tangga yang memiliki kapal motor mesin dalam (5,9 persen), dan motor mesin tempel (16,8 persen). Kondisi ini tidak berbeda dengan kepemilikan perahu motor pada tahun 2007 yaitu 1 persen rumah tangga memiliki motor dalam dan 22 persen memiliki motor mesin tempel.

3.4.3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pendapatan penduduk pada tahun 2009 sama dengan tahun pertama tahun 2007 yaitu pemasaran (harga dan akses), permintaan terhadap hasil tangkapan, produksi, iklim dan degradasi sumber daya pesisir. Musim/ iklim merupakan faktor alam yang tidak menentu, karena selama ini gelombang di laut sudah sulit untuk diprediksi. Meskipun demikian secara umum nelayan masih membagi iklim dalam tiga macam yaitu musim gelombang kuat, lemah dan pancaroba yang masing-masing

terjadi selama empat bulan. Iklim secara langsung berdampak pada volume dan hasil tangkapan ikan di laut yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan nelayan.

Sebagaimana yang terjadi selama ini musim gelombang kuat merupakan musim yang kurang bersahabat bagi nelayan karena banyak nelayan yang tidak dapat melaut sehingga tidak mendapatkan ikan. Sebagian nelayan mempunyai pekerjaan sampingan pada waktu musim gelombang kuat, sedangkan nelayan yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan melakukan persiapan seperti perbaikan alat tangkap. Pada waktu musim gelombang kuat, nelayan membutuhkan mata pencaharian alternatif yang dapat memberikan penghasilan karena pendapatan dari sektor kenelayanan sangat kecil bahkan tidak ada.

Harga dan akses pasar ikan di Sikakap selama ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nelayan di Sikakap umumnya menjual hasil tangkapan pada masyarakat lokal yaitu di pasar desa yang biasa dilakukan pada hari jum'at. Pembeli ikan segar umumnya merupakan orang lokal yang bekerja di luar sektor perikanan terutama pedagang dan jasa. Jenis ikan tertentu dijual kepada pedagang luar terutama ikan kualitas ekspor yang dijual kepada pedagang dari Hongkong. Ikan hasil tangkapan biasa ditampung oleh penampung lokal di keramba jaring apung. Ikan tersebut dipelihara dan pada waktu kapal datang dijual kepada pedagang tersebut. Peningkatan harga jual ikan di tingkat nelayan lebih menyesuaikan laju inflasi setempat sehingga jika dikontrol dengan laju inflasi harga ikan tersebut relative sama. Dalam hal ini tidak ada perubahan harga jual ikan yang dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Akses pasar para nelayan di Desa Sikakap juga tidak mengalami perubahan selama dua tahun terakhir.

Masuknya kapal besar ke daerah Sikakap selama dua tahun terakhir berdampak pada hasil tangkapan ikan di laut. Penurunan hasil tangkapan ini berdampak langsung pada penduduk yang membuat ikan asin. Dua tahun yang lalu pengolah ikan kering ini dapat 0,5-1 ton per bulan ikan kering, tetapi saat ini ikan sangat minim. Nelayan memilih

untuk menjual ikan segar karena hasil tangkapan sedikit, harganya lebih mahal dan ada permintaan dari masyarakat. Akibatnya ikan yang dijual kepada pengolah ikan asin sangat sedikit. Satu bulan yang lalu (Maret) ia hanya mendapatkan 50 kg ikan kering, sehingga belum berani menjual ke Padang. Ongkos ke Padang tidak dapat tertutupi jika hanya menjual 50 kg, minimal ia harus menjual 100 kg agar tidak merugi.

Menurunnya hasil tangkapan juga disebabkan oleh adanya degradasi sumber daya pesisir dan laut. Beberapa tahun yang lalu jumlah ikan di perairan sekitar Sikakap masih cukup banyak, tetapi saat ini terjadi penurunan yang signifikan. Praktek pengambilan karang dan pasir di laut yang selama ini dilakukan oleh sebagian warga menjadi faktor utama terjadinya degradasi sumber daya pesisir dan laut. Penggunaan bom oleh nelayan dari luar maupun potassium yang dilakukan oleh nelayan lokal juga menjadi pemicu utama perusakan terumbu karang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Mentawai, tepatnya Desa Sikakap. Ide dasar penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa program COREMAP II telah dilaksanakan di daerah ini sejak tahun 2005 sehingga perlu dikaji bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut sampai pada tahun 2009. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian telah diketahui dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga akan menjadi masukan untuk penyempurnaan program COREMAP II selanjutnya (2010-2011).

Dipilihnya Desa Sikakap sebagai daerah intervensi program COREMAP didasarkan hasil penelitian LIPI tentang kesehatan terumbu karang yang menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di kawasan laut Desa Sikakap meskipun sangat potensial namun telah mengalami proses degradasi serius. Kerusakan tersebut terutama akibat ulah manusia yang masih melakukan praktik perusakan terumbu karang dengan penggunaan potasium untuk menangkap biota laut, pembuangan limbah domestik ke selat Sikakap, masih terjadi penggalian karang dan pasir laut untuk fondasi bangunan, meskipun telah mengalami penurunan. Selain itu banyak nelayan andon yang beroperasi di daerah ini dengan menggunakan kapal di atas 15 GT dengan alat tangkap yang canggih misalnya pukat cincin.

Akibat degradasi lingkungan pesisir dan degradasi ekologi terumbu karang telah menimbulkan berkurangnya stok ikan di daerah tersebut yang pada gilirannya dapat bermuara pada penurunan tingkat kesejahteraan penduduk nelayan. Permasalah lebih rumit dimana dalam pelaksanaan program COREMAP yang kurang persiapan yang matang

dan dilaksanakan dengan mengabaikan kaidah *good and clean* dan dikelola oleh SDM tidak profesional, telah menghasilkan kegagalan dan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Mereka bekerja tanpa tanpa pedoman RPTK yang memang tidak tersedia di pondok informasi. Persoalan tersebut sebenarnya telah kami kemukakan dalam hasil laporan tahun 2007, namun ternyata tidak ditindaklanjuti bahkan jumlah dan dana kegiatan COREMAP di desa ini lebih mendapat prioritas.

Ketidakpercayaan masyarakat terlihat nialnya ketika Pokmas melakukan rapat dengan LPSTK pada tanggal 29 Mei 2009 dan diikuti pertemuan lanjutan. Pada saat itu banyak anggota Pokmas UEP yang telah mengemukakan berbagai keluhan kepada pengurus LPSTK dan Fasilitator Teknis. Dalam pertemuan tersebut mereka telah menanyakan pelaksanaan program kegiatan ekonomi produktif yang tersendat, telah merugikan bahkan ada kegiatan yang dialihkan. Mereka mendesak agar pengurus LPSTK diganti agar ada perbaikan kinerja kegiatan, kalau perlu akan dilaporkan ke Polsek. Seorang oknum di luar struktur LPSTK, tetapi berpengaruh Ardiansyah, dalam rapat menyatakan ketidaksetujuan untuk diadakan pergantian pengurus LPSTK dengan alasan bahwa mereka telah mendapat pelatihan baik di Lampung maupun di Padang. Ardiansyah yang sebenarnya berada di luar struktur kepengurusan LPSTK tersebut ternyata telah terlibat dalam kolusi, terutama dalam penyediaan bibit rumput laut dan pelatihan pengolahan rumput laut.

Kemudian 26 Agustus 2009 diadakan rapat yang dimotori oleh tokoh masyarakat Alex Zalukhu guna menyelesaikan persoalan masalah petanggungjawaban LPSTK. Dalam acara tersebut tidak dihadiri oleh pengurus LPSTK meskipun telah diundang. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2009 kembali diadakan rapat yang dihadiri Ketua LPSTK, Sekretaris LPSTK, Bendahara LPSTK, dan Staf DKP Ardiansyah. Fasilitator Teknik dari Yayasan Kirekat tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat tersebut semua pihak sepakat untuk mengganti kepengurusan LPSTK pada tanggal 2 September 2009. Dalam rapat tersebut anggota Pokmas, Pengurus Desa dan minta agar LPSTK

membuat pertanggungjawaban keuangan pada kurun waktu 2006-2008 (Pualliggoubat no.181.14 Des 2009).

Nampaknya pihak pengurus LPSTk dan kelomponya tidak senang dengan keputusan tersebut. Mereka bahkan membujuk dan melarang Pokmas untuk menghadiri rapat pergantian pengurus tersebut dengan menjanjikan akan mendfapatkan bagian dari dana COREMAP II tahun 2009. Usaha ini berhasil dimana dari 40 Pokmas yang ada hanya lima Pokmas yang hadir sehingga pergantian pengurus tertunda. Dua Pokmas yang melakukan perlawanan yaitu Suria Mentawai dan Pokmas Aleuita, dikeluarkan dari keanggotaan dengan alasan telah melanggar AD/ART LPSTK.

Sebagai kelanjutan atas masalah ini kemudian tokoh masyarakat membentuk tim delapan yang menindaklanjuti pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Mentawai pada tanggal 9 September 2009. Kemudian untuk menndaklanjuti masalah di LPSTK Sikakap, Dinas DKP Mentawai mengirimkan tim pencari fakta (TPF). Salah satu anggota TPF adalah Ardiansyah yang sebenarnya merupakan oknum DKP yang merupakan bagian permasalahan program COREMAP di Sikakap. Tanggal 20 Desember TPF datang ke Sikakap langsung mengadakan investigasi ke 19 Pokmas dan tanggal 23 Desember malakukan pertemuan di Kantor Kepala Desa Sikakap.

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan lima rekomendasi yaitu (Pualliggoubat N0 183,1-14 Januari 2010):

- LPSTK Desa Sikakap agar lebih teliti,cermat.dan transparan dalam mengelola lembaga.
- Memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan standardisasi pembukuan MPA.
- Menindaklanjuti dan merealisasi kekurangan bibit rumput laut 3 ton lagi.
- Mengevaluasi dan memberikan tindakan tegas kepada Pokmas yang tidak serius dalam mengelola dana MPA.

- Melakukan rapat anggota tahunan dengan agenda mengevaluasi kinerja pengurus LPSTK dan pemilihan pengurus LPSTK baru.

Dalam kenyataan sampai 15 Januari 2010 rekomendasi tersebut tidak ada realisasinya. Namun demikian tim Kejaksaan Provinsi dan Kejaksaan Kabupaten Mentawai telah melakukan penyidikan dengan datang ke Sikakap. Penyelesaian secara pidana nampaknya akan dilaksanakan.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan substansi program COREMAP II di Sikakap adalah

1. Program COREMAP yang dalam kenyataan cenderung bersifat *top-down* tetapi tanpa diikuti oleh pengelolaan yang profesional. Dalam pengelolaan yang baik seharusnya diawali dengan kajian yang benar, dilaksanakan dengan prinsip *good and clean*, dilaksanakan oleh tenaga yang handal, dan selalu melakukan evaluasi. Kelompok CRITC seharusnya telah melakukan kajian lebih dahulu untuk melihat berbagai kelemahan dan sekaligus melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) guna menentukan UEP apa yang layak secara ekologis dan layak secara ekonomi. Dalam kenyataan hal ini tidak dilakukan sehingga muncul berbagai hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh ada seorang anggota pengurus LPSTK telah ikut tiga kali kegiatan Pokmas. Dua kegiatan sebelumnya menjadi anggota Pokmas dan telah gagal, bahkan telah diputihkan dan saat ini (2009) telah menjadi ketua Pokmas dengan anggaran 40 juta. Dalam tahun anggaran 2006 kegiatan budidaya rumput laut dan budidaya kepiting juga telah gagal dan telah diputihkan pula. Pada saat itu sebanyak 7 ton bibit rumput laut yang dibeli dari Lampung atas prakarsa oknum Tuan X dan Fasilitator ternyata setelah sampai di Sikakap telah mati semua. Dalam hal ini tidak ada sanksi untuk mereka yang melaksanakan kegiatan teledor tersebut.
2. Program COREMAP telah dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh rezeki meskipun harus mengorbankan hasil maupun, manfaat positif. Hal ini dilakukan secara sistemik oleh pengurus

LPSTK dan Fasilitator serta telah melibatkan seorang oknum DKP di Sikakap. Secara administrative program COREMAP telah berhasil mengoperasikan anggaran (*input*) namun secara substantive ternyata tidak berhasil baik dilihat dari hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

3. Banyak Pokmas yang dibentuk yang idenya datang dari pengurus LPSTK dan Fasilitator. Kelompok dibentuk bukan karena mempertimbangkan kemampuan berusaha. Masyarakat bersedia membentuk Pokmas karena pertimbangan praktis yaitu dengan mudah memperoleh uang, apalagi Fasilitator dan LPSTK telah memberi harapan bahwa kegiatan ekonomi dari kelompok sangat menguntungkan dan tidak ada sanksi hukum. Secara teknis pembuatan proposal Pokmas dibuat oleh anggota LPSTK bersama Fasilitator meskipun telah dibebani biaya. Kenyataan bahwa LPSTK banyak melakukan pemotongan dana sehingga banyak Pokmas pun enggan untuk mencicil uang pinjaman bergulir sesuai kontrak.
4. Koordinasi dan manajemen organisasi dalam internal Pokmas juga mengalami permasalahan. Secara budaya mereka tidak terbiasa hidup secara berkelompok, mereka umumnya bekerja sendiri dan pada dasarnya menggantungkan pada sumber daya daratan. Kegiatan berkelompok merupakan loncatan budaya yang tidak mudah diikuti, karena mensyaratkan dapat saling tenggang rasa, keterbukaan dan memerlukan kedisiplinan. Apa yang terjadi bahwa mereka saling bekerja tetapi tidak saling bekerja bersama.
5. Untuk program tertentu yaitu budidaya rumput laut secara ekologis tidak cocok, dan secara ekonomis juga tidak layak. Tanaman rumput laut memerlukan lingkungan yang tidak terpengaruh air tawar, tumbuh di pantai berkarang putih yang jernih, ombak tidak besar, dan tidak ada predator (ikan baronang, duyung, dan penyu). Di Sikakap karena banyak predator maka usaha budidaya rumput laut harus menggunakan waring. Hal ini jelas memerlukan biaya yang besar. Sementara itu belum ada kepastian untuk hidupnya rumput laut secara sehat maupun untuk memasarkan pun belum ada

kepastian. Untuk dapat hidup saja masih bermasalah apalagi untuk dapat dipasarkan. Dengan demikian pemikiran untuk dapat ekspor rumput laut masih mengalami banyak kendala teknis dan manajemen.

6. Pendamping yaitu Fasilitator Teknis apalagi ketua dan anggota Pokmas tidak menguasai sepenuhnya teknologi yang diperlukan tiap Pokmas misalnya dalam hal budidaya rumput laut, pembuatan batu bata dan budidaya kerapu. Hal ini karena rendahnya kualitas SDM mereka dalam penguasaan Iptek dan tidak serius menangani apalagi menangani jumlah Pokmas yang banyak. Kegiatan Pokmas umumnya merupakan hal baru yang belum pernah dilakukan kecuali kegiatan membuat ikan asin dan membuat minyak nilam secara tradisional.
7. Praktik perusakan ekosistem terumbu karang sulit dicegah antara lain kelemahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Nelayan lokal yang masih miskin pengetahuan dan miskin ekonomi dengan sendirinya tidak mampu bersaing dengan nelayan andon yang datang dari luar daerah seperti Sibolga, Padang, Bengkulu, Jakarta dan Jawa Tengah dengan penguasaan iptek yang modern.
8. Dari aspek sumberdaya manusia hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (58,5 % penduduk) masih berpedidikan SD ke bawah. Rendahnya kualitas penduduk tersebut terkait erat dengan daerah Pagai yang terisolir sehingga akses terhadap fasilitas publik juga terbatas.

Dampak yang diakibatkan oleh program COREMAP II nampak dari perubahan tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat kesejahteraan penduduk masih memprihatinkan dimana pada tahun 2007 pendapatan perkapita penduduk di Sikakap sebesar Rp 196.445,- per bulan. Berdasar garis kemiskinan 1 \$ US perhari sekitar 66 persen penduduk miskin dan jika garis kemiskinan dinaikkan 2\$ US perhari penduduk miskin menjadi 94 persen. Pendapatan yang rendah juga terjadi pada pendapatan dari sektor kenelayanan terutama dilihat dari proporsi rumah

tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500 ribu/ bulan. Pada waktu musim kuat sekitar 88,9 persen rumah tangga mempunyai pendapatan dari sektor kenelayanan kurang dari Rp 500 ribu, sementara pada waktu musim gelombang tenang hanya sekitar 28,6 persen.

Sampai tahun 2009 ini, dampak COREMAP terhadap perekonomian masyarakat di Desa Sikakap belum dapat terlihat dan sebagian responden mengaku belum merasakannya. Meskipun demikian, data statistik pendapatan penduduk menunjukkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan rumah tangga masing-masing sebesar 42,47 persen dan 37,98 persen selama tahun 2007-2009. Peningkatan pendapatan tersebut lebih besar daripada inflasi di daerah yaitu 6,9 persen pada tahun 2007 dan 13,45 persen pada tahun 2008. Dengan demikian, secara umum terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di desa lokasi studi. Peningkatan rata-rata pendapatan ini masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat karena hanya ada 15 persen masyarakat mengaku kehidupan mereka lebih baik dibandingkan dengan sebelum ada coremap, sementara 85 persen mengaku sama saja atau bahkan lebih buruk. Pendapatan perkapita penduduk di lokasi studi lebih kecil dibandingkan dengan garis kemiskinan di Padang tahun 2009 (217.649 rupiah).

Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir sebesar 19,34 persen, dan peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 32,68 persen. Peningkatan pendapatan ini lebih rendah dari peningkatan pendapatan masyarakat dari seluruh sumber mata pencaharian. Hal ini menunjukkan bahkan pertumbuhan pendapatan dari sector kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan sector yang lain. Jika dibandingkan dengan inflasi di daerah Sumatera Barat, pertumbuhan pendapatan perkapita dari kegiatan kenelayanan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi. Hal ini menunjukkan selama dua tahun terakhir pendapatan penduduk dari perikanan relative stabil bahkan berkurang. Meskipun demikian rumah tangga ini masih dimungkinkan memiliki sumber mata pencaharian di luar sector perikanan, yang dapat digunakan untuk menutup kekurangan

pendapatan dari sector perikanan. Sektor perdagangan dan peternakan, merupakan sector yang mengalami perkembangan cukup tinggi. Usaha ekonomi produktif yang sedianya digunakan untuk mendorong pendapatan dari sector perikanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga manfaat yang diambil dari program tersebut belum dapat dirasakan khususnya untuk peningkatan pendapatan nelayan.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan kehidupan penduduk, tidak saja pada aspek peningkatan kemampuan ekonomi tetapi juga peningkatan pengetahuan, termasuk tentang pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan pengembangan kelembagaan ekonomi kelompok masyarakat dan peningkatan kemampuan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah daerah dapat membuat sistem pengelolaan yang juga bertumpu pada kemampuan dan partisipasi masyarakat.

Praktek pemanfaatan sumber daya laut yang tidak kondusif bagi kesehatan terumbu karang tersebut dapat diperkecil manakala ada pemahaman yang ditunjang dengan sanksi sesuai peraturan daerah dan adanya alternative pekerjaan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses peningkatan pemahaman atau alih pengetahuan terkait erat dengan proses sosialisasi kepada khalayak luas. Sebagai respons atas isu kerusakan terumbu karang, Pemerintah Kabupaten telah membuat Perda tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Adapun program alternative pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain telah mulai digarap oleh Program COREMAP II.

Banyak kendala telah dihadapi dalam melaksanakan kegiatan program COREMAP di Desa Sikakap, dan ini merupakan pembelajaran untuk mengatasi persoalan yang timbul dan sekaligus menjadi masukan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik untuk tahun-tahun ke depan. Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pelaksanaan kegiatan COREMAP II antara lain:

- (1) Kegiatan COREMAP II seharusnya didasarkan pada Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) karena dalam buku tersebut memuat orientasi dan sekumpulan strategi serta program-program terkait dengan upaya pengelolaan sumberdaya perairan dan terumbu karang berkelanjutan lingkup desa yang disepakati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam kenyataan kegiatan COREMAP II tidak didasarkan pada RPTK, karena buku RPTK tidak ada di LPSTK Sikakap. Buku RPTK yang seharusnya diacu untuk kegiatan LPSTK ternyata hanya disimpan di Yayasan Kirekat dan Dinas DKP-Kabupaten Mentawai.
- (2) COREMAP sebagai sebuah kebijakan tingkat nasional, dalam operasionalisasinya di lapangan dihadapkan pada persoalan yang mendasar, yakni kekurangan tenaga profesional pada tataran kabupaten dan pengurus LPSTK. LPSTK Sikakap pada awal berdirinya telah mengalami kesulitan dana operasional karena tidak tersedia dana khusus. Namun akhir-akhir ini LPSTK tidak ada lagi mengalami masalah tentang dana operasional karena telah mengambil kebijakan dengan melakukan berbagai pemotongan dana tiap Pokmas. LPSTK dibantu oleh Fasilitator telah mengambil kebijakan pemotongan dana untuk Pokmas yang disetujui yaitu sebesar 8 persen. Dana tersebut belum termasuk biaya administrasi, biaya pembuatan proposal sekitar Rp 200-300 ribu dan biaya pembelian perlengkapan dan pelatihan.
- (3) LPSTK dibantu oleh fasilitator dan oknum DKP Sikakap telah memonopoli pembelian perlengkapan dan fasilitas tiap Pokmas yang telah disetujui antara lain untuk pengadaan bibit rumput laut, penyediaan waring untuk rumput laut dan jaring apung, pengadaan lemari pengering untuk pelatihan pengolahan rumput laut dan pembuatan makanan rumput laut serta formula pembuatan makanan rumput laut. Semua kebutuhan tersebut meskipun dapat dipenuhi namun biaya yang dikeluarkan secara langsung dipotong dan dibebankan kepada Pokmas yang

bersangkutan. Hal ini ternyata rawan terhadap apa yang disebut *mark-up*.

- (4) Pendampingan kepada tiap Pokmas tidak ada sehingga dengan pengetahuan yang sangat terbatas dan rendahnya penguasaan teknologi maka kegiatan Pokmas jadi terlantar. Fasilitator Teknis ternyata tidak mampu dalam pendampingan kegiatan yang beragam yaitu budidaya ikan di keramba jaring apung, budidaya rumput laut menggunakan waring, pengolahan hasil laut, pembuatan batu bata, penangkapan ikan dan usaha nilam. Setelah sisa dana termin pertama diberikan maka Pokmas harus menjalankan sendiri--- ibarat anak ayam kehilangan induk.
- (5) Di tingkat desa, upaya penegakkan hukum terhadap pelanggar dalam hal ini para pelaku panambang pasir laut dan pengambil terumbu karang, pelaku pemotasan ikan, masih terkendala oleh belum adanya pijakan tentang kewenangan Pokmaswas. Sampai tahun 2009 Pokmaswas belum pernah melakukan pengawasan zonasi DPL, karena letaknya cukup jauh (50 menit perjalanan dengan sampan motor 20 Pk) dan belum ada kesepakatan dengan nelayan setempat yang biasa menangkap biota laut di daerah tersebut. Di daerah DPL yang berada di lingkungan hutan mangrove juga menjadi lokasi salah satu Pokmas Keramba Jaring Apung untuk ikan kerapu dan salah satu lokasi budidaya rumput laut. Selain itu Pokwasmas kendati telah dilengkapi kapal patroli namun tidak diberi kewenangan menangkap pelaku kejahatan. Akhirnya kapal tersebut telah dimanfaatkan untuk mencari ikan oleh pengurusnya. Sekali-kali mereka hanya membuat laporan apa yang dijumpai selama mencari ikan.
- (6) Kegiatan COREMAP yang bertumpu kepada,LPSTK, Fasilitator dan Pokmaswas dihadapkan pada persoalan yang sangat serius menyangkut rendahnya kemampuan teknis penguasaan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan dari atas serta rendahnya kemampuan managerial. Hal ini berakibat lembaga tersebut tidak

sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagai agen perubahan.

- (7) Pada tahap persiapan sosialisasi dan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait dirasakan sangat kurang memadai. Sebagai contoh Desa Sikakap yang mengangkat kepengurusan LPSTK tidak banyak mengetahui kegiatan LPSTK selama kurun waktu 2005-2009 karena tidak pernah melakukan koordinasi maupun memberi laporan kegiatan kepada Kantor Desa. Padahal, surat keputusan (SK) pengangkatan pengurus LPSTK dikeluarkan oleh Desa Sikakap dan kantor LPSTK (Pondok Informasi) letaknya satu pekarangan dengan Kantor Desa Sikakap.
- (8) Dalam merumuskan program dan kegiatan COREMAP II, masih cukup kuat terkesan bersifat *top-down*, dirumuskan oleh sejumlah kecil orang yang tergabung dalam LPSTK, kurang disosialisasikan, sehingga tidak mendapatkan pembahasan dan masukan publik secara luas. Konsultasi publik terhadap program-program kegiatan yang akan dilakukan dipandang perlu, agar setiap program yang dirumuskan mendapat dukungan luas masyarakat.
- (9) Mekanisme penyaluran dana dalam bentuk barang hanya akan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap kejujuran petugas pelaksana kegiatan. Dalam hal ini LPSTK dapat menunjukkan secara transparan dalam bentuk jumlah uang tunai terlebih dahulu kepada masyarakat binaan. Untuk menjamin bahwa dana tersebut dibelanjakan sesuai dengan usulan kegiatan, maka petugas pendamping harus menemani masyarakat kemana belanja barang harus dilakukan, agar kelak bila barang yang sama diperlukan masyarakat tahu harga pasti, kualitas dan tempat membelinya. Mekanisme pemotongan dana untuk pembelian dan jasa hanya akan menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat, sebab besaran uang yang diterima telah menyangkut persoalan yang sangat sensitive.

4.2. REKOMENDASI

Mencermati kegiatan program COREMAP di Desa Sikakap, ada kesan kuat bahwa program dan kegiatan COREMAP bersifat paket kegiatan yang sudah baku untuk dilaksanakan di setiap desa. Apa yang dilakukan di Desa Sikakap, kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan di lima Desa COREMAP yang lain seperti di Tua Pejat dan di Desa Katurei. Dengan cara dan pendekatan yang sama dalam penanganan program COREMAP II, serta tingkat kemampuan SDM yang sama, maka apabila tidak ada perubahan strategi penanganan dan peningkatan kualitas SDM petugas pelaksana kegiatan akan terus mengalami kegagalan substansi.

Paradigma lama dalam penyusunan program kegiatan COREMAP II ditandai oleh penyusunan program yang bersifat *top-down*, penyeragaman (*uniformitas*) bersifat sentralistik, berorientasi proyek, dan jauh dari upaya yang mengedepankan berlakunya prinsip keswadayaan dan partisipasi luas masyarakat, di tingkat desa. Hal ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan otonomi daerah yang lebih mengedepankan azas demokrasi dan partisipasi luas masyarakat dalam setiap merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat. Minimnya perumusan konsep kegiatan COREMAP nampak dari terbatasnya pembahasan melalui dialog konsultasi publik. Hasil penelitian empirik menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program COREMAP II telah menurun. Hal ini karena pihak LPSTK sebagai roda penggerak kegiatan COREMAP II di Desa Sikakap tidak bekerja secara profesional yaitu tidak transparan, tidak menguasai substansi, bahkan tidak mau diberhentikan oleh desa meskipun periode kepemimpinan sudah berakhir.

Akhirnya kegiatan COREMAP yang dirancang cenderung kurang memperhatikan rambu-rambu sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan masyarakat (*Community Development*) sebagaimana dikemukakan pada uraian yang terdahulu. Akibatnya kegagalan demi kegagalan mengiringi perjalanan kegiatan program COREMAP. Suatu perkembangan yang sesungguhnya sudah bisa diprediksi sejak awal.

Lalu langkah apa yang bisa dilakukan ke depan untuk dapat melanjutkan kegiatan ini ?

Bertolak dari temuan penelitian tersebut, beberapa rekomendasi yang bisa diajukan antara lain:

- (1) Perlunya mengubah paradigma dalam merumuskan kegiatan COREMAP dengan mengedepankan azas partisipasi luas dan kepercayaan masyarakat. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, memperoleh komitmen masyarakat, menggali swadaya masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki program dan percaya diri masyarakat, serta memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan kegiatan, segi pembelajaran melalui pembuatan pilot proyek atau demonstrasi plot untuk Pokmas yang telah layak untuk didanai, yang selektif jauh lebih bermakna daripada mengejar target proyek yang berskala besar dengan membuat banyak Pokmas. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih dahulu diadakan studi kelayakan oleh CRITC. Dengan kegiatan demplot ini tekanan lebih diletakkan pada peningkatan penguasaan keterampilan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan, sehingga akan memperlancar proses alih pengetahuan dan teknologi. Kelebihan dari kegiatan selektif ini adalah pada percepatan proses difusi atau penyebaran pembaharuan kepada masyarakat melalui proses imitasi (peniruan) atas keberhasilan kegiatan tersebut, sekaligus akan memperbaiki citra kinerja aparat pemerintah dimata masyarakat. Usaha yang sangat variatif dan dalam jumlah yang banyak hanya dimungkinkan setelah melalui tahap ini. Kelangkaan tenaga profesional dapat diperoleh dengan cara *out sourcing* misalnya bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut dari Lampung. Dengan demikian mereka akan melakukan alih pengetahuan dan ketrampilan kepada penduduk Sikakap misalnya dalam budidaya kerapu. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih dahulu mendatangkan bibit ikan kerapu ukuran 10 cm guna

menurunkan resiko kematian, meskipun dengan harga yang lebih mahal. Keberadaan tenaga profesional dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut sekaligus akan mempercepat program *hatchery* di Sikakap dalam menyediakan bibit ikan kerapu. Kendala yang dihadapi program *hatchery* di Sikakap adalah ketidakcukupan prasarana dan tenaga ahli. Sampai tahun 2009 di selat Sikakap telah banyak dibuat keramba apung namun tidak berfungsi. Menunggu sampai program *hatchery* berhasil mengembangkan bibit kerapu, lebih baik membeli bibit kerapu ukuran 10-15 cm dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut, Lampung. Bibit kerapu dengan ukuran tersebut kemungkinan hidup cukup besar.

- (3) Perlunya penguatan kelembagaan menyangkut peningkatan kemampuan managerial jajaran pengurus LPSTK, dan Pokmas percontohan. Hal ini penting, karena kegiatan COREMAP bertumpu pada kegiatan kelompok, dan rendahnya kemampuan berorganisasi serta peningkatan keterampilan dalam penguasaan teknologi bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan secara selektif.
- (4) Mekanisme penyaluran dana perlu diubah dengan mencontoh program PNPM yang dapat mengindari kebocoran dana dimana sangat ketat dalam pengawasan dan ada sanksi tegas bila terjadi pelanggaran. Dalam hal ini bagi Pokmas yang telah memperoleh bantuan dana COREMAP wajib untuk mempertanggungjawabkan baik substansi kegiatan dan anggaran. Sejalan dengan itu LPSTK harus juga melakukan perbaikan dalam pembukuan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit anggaran oleh inspektorat DKP harus dilakukan secara periodik agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya korupsi.
- (5) Meningkatkan kemampuan SDM aparat pelaksana, keterbukaan manajemen administrasi keuangan, merupakan prasarat dibangunnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPSTK. Hal ini dapat ditempuh dengan reorganisasi LPSTK yang

kebetulan masa baktinya telah berakhir. Anggota LPSTK yang dinilai bersih tetap dipertahankan dan sebaliknya mereka yang terlibat KKN segera diganti. Prakarsa reorganisasi atau pergantian pengurus dapat dilaksanakan oleh Kepala atau Sekretaris Desa Sikakap melalui forum rapat bersama antar *stakeholders*.

- (6) Kekurangpahaman tentang manfaat dan bagaimana cara memanfaatkan ekosistem terumbu karang akan mempunyai pengaruh langsung dengan sikap dan tingkah laku yang tidak kondusif terhadap kesehatan terumbu karang dengan segala akibatnya. Oleh karena itu proses sosialisasi oleh COREMAP harus tetap digalakkan meskipun sebagian besar telah mengetahui hal ini. Kegiatan sosialisasi dan warta COREMAP sebaiknya diliput melalui media massa terutama lewat siaran radio amatir yang ada di Sikakap yang direncanakan akan memperoleh bantuan dana dari Pemda pada tahun anggaran 2010.
- (8) Kabupaten Mentawai, khususnya kawasan Desa Sikakap mempunyai resiko tinggi akibat bencana gempa dan tsunami. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami untuk daerah Kabupaten Mentawai perlu segera dipersiapkan, antara lain perlu menyusun Protap, ketersediaan anggaran dan stok kebutuhan pangan serta obat-obatan di kecamatan, melakukan latihan yang melibatkan *stakeholders* pemerintah daerah dan *stakeholders* pendukung dan melakukan gerakan menanam mangrove dan pelestarian terumbu karang. Hutan mangrove dan terumbu karang tidak saja bermanfaat untuk mengurangi resiko tsunami, juga sangat besar manfaatnya untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Mentawai. (2005). *Laporan Akhir Penyusunan Revisi RTRW, Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2004). *Analisis Pengembangan Profil Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai*.
- Boyle, Patrick (1981). *Planning Better Program*, New York McGraw Hill Book Company.
- BPS. (2006). *Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005*.
- Charles Victor Barber, Suraya Afiff, dan Agus Purnomo (1997). *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Jefta Leibo, 1995, Sosiologi Pedesaan; Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mead, Margaret(1970). "The Rights of Primitive Peoples", dalam *Cultures of the Pacific*, T.G. Harding dan B.J. Wallace. New York : The Free Press.
- Pualliggoubat, No.181.14 Des 2009
- Pualliggoubat, N0 183,1-14 Januari 2010
- Paul B. Harton dan Chester L. Hunt(1990). *Sosiologi Jilid 2*, Penerbit Erlangga Jakarta.

Reimar Schefold.(1985). "Keseimbangan Mentawai Dan Dunia Modern". Dalam *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.

Rogers M Evert and Burdge J. Rabel, (1972), *Social Change in Rural Societies*, Prentice Hall Inc, Englewood, New Jersey.

SUMBER INFORMASI

Kepala Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Petugas Fasilitator Kegiatan COREMAP Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dusun Sikakap Tengah, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dusun Saibaibai, Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua LPSTK Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jajaran Pengurus LPSTK, Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Kepolisian, POLSEK Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pokmas COREMAP Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua Pokmas Kepiting, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PPL Perikanan Kecamatan Pagai Utara - Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Staf DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, Petugas Penjaga Hatchery
Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

Penyiar Radio Amatir Sikakap, Kecamatan Pagai Utara - Selatan,
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Pejabat Pemegang Komitmen Program Kegiatan COREMAP II Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Sekretaris Yayasan Karekat (LSM) Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Team CRITIC Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai
Kepulauan.

Petugas Fasilitator Teknis Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan,
Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Petugas Motivator Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan,
Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Kepala Dusun Sei Bai-Bai Kecamatan Pagai Utara-Selatan, Kabupaten
Mentawai Kepulauan.

Kepala Dusun Sikakap Tengah, Kecamatan Pagai Utara Selatan,
Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Kepala Dusun Mabola, Kecamatan Pagai Utara-Selatan, Kabupaten
Mentawai Kepulauan.

Pemilik dan Operator Radio Komunitas Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-
Selatan, Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Sekretaris Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan, Kabupaten
Mentawai Kepulauan.

Ketua LPSTK Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan, Kabupaten
Mentawai Kepulauan.

Bendahara LPSTK Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan.

Sekretaris LPSTK Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara-Selatan,
Kabupaten Mentawai Kepulauan.

Pengurus dan sejumlah anggota pokmas Desa Sikakap, Kecamatan Pagai
Utara-Selatan, Kabupaten Mentawai Kepulauan.

